



KEPALA DESA KEMBARAN  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KEMBARAN  
KECAMATAN KALIKAJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KEMBARAN  
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 6 (enam) tahun atau sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;

9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN  
dan  
KEPALA DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA KEMBARAN TAHUN 2020 - 2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kalikajar.
3. Desa adalah Desa Kembaran.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

### Pasal 2

RPJM Desa Kembaran Tahun 2020 – 2025 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 6 (Enam) tahun ke depan, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. LATAR BELAKANG

##### 1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM

##### 1.3. HUBUNGAN PERENCANAAN DESA DENGAN PERENCANAAN KABUPATEN

##### 1.4. VISI DAN MISI DESA

##### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

#### BAB II GAMBARAN UMUM DESA

##### 2.1. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA

##### 2.2. SEJARAH DESA

##### 2.3. ASET DAN KEUANGAN DESA

#### BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA

##### A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

##### B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

##### C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

##### D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

#### BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM DESA

#### BAB V PENUTUP

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RPJM Desa Kembaran Tahun 2020 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RPJM Desa Kembaran Tahun 2020 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tiap tahunnya dijabarkan dalam RKP Desa.

### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kembaran

Ditetapkan di Desa Kembaran  
pada tanggal 16 Maret 2020

KEPALA DESA KEMBARAN,



**AGUNG HERMAWAN**

Diundangkan di Desa Kembaran  
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DESA KEMBARAN,



**ADY SETIAWAN**

LEMBARAN DESA KEMBARAN TAHUN 2020 NOMOR 2

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa Kembaran tidak berbeda dengan Desa-Desa lain yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan Desa sebagai akibat dari kebijakan pembangunan nasional masa lalu yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Penitikberatan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi disatu sisi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran serta perbaikan kualitas hidup rata-rata. Namun demikian karena tidak disertai dengan pembangunan dan penguatan institusi-institusi baik publik maupun institusi pasar, terutama keuangan yang seharusnya melakukan alokasi sumber daya secara efisien, proporsional dan bijaksana, ditambah dengan ketertutupan telah melemahkan institusi strategis, seperti sistem hukum dan kepastian hukum dan keadilan, sistem politik dalam menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan harmonis dan damai. Oleh karena itu, hasil pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Dibalik itu, kelumpuhan institusi-institusi strategis diatas telah menghasilkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang rapuh serta rawan terhadap guncangan yang suatu saat bisa meledak seperti pengalaman-pengalaman pada masa awal reformasi tahun 1997, karena kesenjangan, ketidakadilan seperti hal tersebut masih mewarnai dalam pola pemerintahan dan kebijakan saat ini dari tingkatan paling atas hingga ke bawah sehingga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah benar-benar semakin parah dan tak berdaya.

Berbagai implikasi negatif dari kebijakan pembangunan nasional di atas, di tingkat desa diperkeruh dengan kekurangtepatan dalam membangun konstruksi sistem pengelolaan pemerintahan. Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah melemahkan hak otonomi Daerah, sehingga disatu sisi menjadikan desa kurang memiliki diskreasi dan tidak kreatif dalam pengambilan kebijakan. Pada disisi yang lain menyumbat saluran partisipasi warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pada tingkatan desa, penerapan Undang-undang No 5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, disamping telah mengerdilkan otonomi desa

dengan mendudukan desa sebagai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, dana-dana bantuan semakin mambanjiri desa juga telah meninabobokan desa dalam menggali potensi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Kesadaran berswadaya semakin menipis, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah semakin lengket dan otomatis pula jaring atau lingkaran kebocoran dan pemborosan anggaran akan semakin membengkak jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat oleh institusi yang kuat dan independent.

Untuk memperlancar saluran dan memperkuat sistem demokrasi, MPR mengamandemen UUD 1945, Pemerintah mengganti beberapa Undang-undang politik yang dianggap tidak sesuai dengan semangat UUD 1945. Undang-undang No 5 tahun 1974 dan UU No 5 tahun 1979 diganti dengan Undang-undang No 22 tahun 1999. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan desa diperkuat dengan Undang-undang No 25 tahun 1999.

Undang-undang No 22 & 25 tahun 1999, ternyata disamping memberikan banyak manfaat dan dampak positif tetapi pada sisi yang lain juga tidak sedikit yang bersifat negatif bahkan justru mengarahkan pada pengelolaan pemerintahan yang tidak profesional. Untuk memperbaiki segala kelemahan dan dampak negatif yang ditimbulkan, akhirnya kedua Undang-undang itu diganti dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Berbagai persoalan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan Desa di atas, harus ditangani secara sistemik sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang. Penanganan secara sistemik terhadap permasalahan tersebut membutuhkan waktu yang tidak pendek, sementara masyarakat cenderung mengharap dan ingin melihat hasil yang dapat dinikmati secara langsung dan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, agar penuntasan berbagai persoalan tersebut dapat berjalan secara sistemik maka pemerintahan harus dijalankan secara efisien dan efektif. Sedangkan pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan manajemen pemerintahan secara baik, dalam arti dapat merencanakan penyelenggaraan pemerintahan secara matang, melakukan pengorganisasian secara efektif, menggerakkan organisasi secara padu dan mampu mengontrol dirinya sendiri demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Pendek kata pemerintahan yang efisien dan efektif

adalah pemerintahan yang menjalankan 4 (empat) aspek manajemen yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling* dengan optimal.

Agar keempat aspek tersebut dapat bekerja secara baik, maka harus diawali oleh suatu perencanaan yang matang, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 adalah Pedoman umum dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan merupakan perwujudan perubahan yang signifikan, ialah bahwa selama ini Desa dijadikan sebagai obyek pembangunan maka dengan lahirnya peraturan perundangan tersebut diatas akan membawa kepada Desa sebagai subyek pembangunan dengan menyusun perencanaan pembangunannya lewat “ Kewenangan Skala Lokal Desa ” yang dimiliki oleh “ Desa Kembaran ” sebagaimana tercover dalam “ UU Nomor 6 tahun 2014, pasal 79 ayat 7, paragraf 1 tentang Perencanaan”.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dengan berakhirnya RPJM Desa 2016 – 2018 dan setelahnya dalam 2 (dua) anggaran masih menggunakan RPJM Desa yang lama, maka menjadi kewajiban Desa untuk menyusun RPJM Desa Tahun 2020 – 2025. Rencana pembangunan jangka menengah Desa ini, pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi Kepala Desa Pada saat pemaparan Visi dan Misi Calon Kepala Desa. Oleh karena itu, untuk tahun 2020 – 2025 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan didasarkan pada Visi Kepala Desa. Dengan demikian kata kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Semangat ini dikembangkan tidak lain bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa selama 5 ( lima) tahun kedepan dapat mengimplementasikan esensi demokrasi.

Visi tersebut pada dasarnya merupakan pengungkapan secara populer dari cita-cita pemerintah desa periode 2020 – 2025, yaitu mengupayakan terselenggaranya pemerintahan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disadari ataupun tidak bahwa esensi otonomi desa adalah mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi dapat optimal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain partisipasi masyarakat, prinsip demokrasi yang lain adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara, baik yang menyangkut hak

politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Intinya, bahwa dalam konteks desa dan demokratisasi pengelolaan pemerintahan desa harus dengan partisipasi masyarakat dan dengan mengakui serta mewujudkan hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki warga masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pemerintahan desa harus partisipatif atau ada kebersamaan dengan masyarakat, dengan tujuan utama adalah kesejahteraan bersama masyarakat. Maka Visi Pemerintahan Desa Kembaran adalah **“Membangun Bersama Masyarakat”** ialah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Untuk itu, proses awal dalam penyusunan RPJMDesa Tahun 2020 – 2025 ini adalah penyerapan aspirasi masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan.

Salah satu cara dalam penyerapan aspirasi tersebut dilakukan dengan metode survey tentang “Mimpi Desa” yaitu guna mengetahui persepsi masyarakat tentang segala permasalahan dan kebutuhan yang paling dirasakan serta membutuhkan penanganan segera atau harus diselesaikan dan disediakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil survey tersebut kemudian diintegrasikan dengan program-program pembangunan yang telah disampaikan dalam Rapat Musrenbangdes Visi, misi dan program, untuk disajikan menjadi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dengan kata lain proses penyusunan dokumen RPJMDesa selain memerlukan berbagai masukan dari masyarakat dan para pelaku pembangunan, juga diperlukan koordinasi antar Lembaga Desa. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat dihasilkan dokumen RPJMDesa yang partisipatif, yang akhirnya dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Disamping sumber daya manusia dan uang, pelaksanaan RPJMDesa juga perlu didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai, baik yang berupa fasilitas umum ataupun fasilitas pemerintah. Jalan yang menjadi tanggungjawab desa, masih banyak yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Jaringan irigasi, ketersediaan air bersih, jaringan listrik, prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan masih banyak yang harus ditingkatkan kualitasnya. Tidak kalah pentingnya dengan ketiga sumber daya diatas, informasi atau data dan kewenangan adalah merupakan penentu dalam keberhasilan visi dan misi RPJMDesa. Oleh karena itu, perlu dibangun basis data dan jaringan informasi yang akurat dan berkesinambungan, sehingga implementasi RPJMDesa selalu didasarkan pada kondisi yang riil bukan atas prakiraan-prakiraan. Dalam konteks kewenangan, maka diperlukan identifikasi urusan-urusan pemerintahan yang efektif dikelola Desa Kembaran sehingga substansi RPJMDesa tidak keluar dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan tidak

bersinggungan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa lain ataupun Pemerintah.

Interaksi antar berbagai sumber daya di atas, yang didukung dengan proses pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang baik, dalam 5 ( lima ) tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, yaitu mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan secara optimal. Dalam konteks pelaksanaan fungsi mengatur, kedepan pemerintah Desa diharapkan tidak hanya mampu mengajukan sebanyak mungkin rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya menjadi Peraturan Desa. Lebih dari itu Pemerintah Desa harus mampu melaksanakan dan menegakkan Peraturan Desa yang telah diterbitkan, kemudian melakukan evaluasi secara rutin atas kinerja masing-masing Peraturan Desa. Dengan demikian Pemerintah Desa akan dapat memfasilitasi kepentingan masyarakat.

Untuk fungsi pelayanan, dengan tersedianya informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan *masyarakat* pembangunan diharapkan dapat diberikan pelayanan yang adil, merata dan transparan. Pertimbangan utama dalam hal ini adalah tingkat urgensi, bukan atas kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam 5 ( lima ) tahun kedepan pelayanan pemerintah Desa akan diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan fungsi pembangunan, disamping diarahkan untuk menunjang efektivitas fungsi pelayanan juga akan dititikberatkan pada upaya pembangunan yang bersifat investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk pelaksanaan fungsi pemberdayaan diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang tidak berdaya, baik tidak berdaya karena faktor ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan berpedoman Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan, tercover dalam bab III Ketentuan Peralihan, diperlukan penyusunan RPJM Desa Kembaran periode tahun 2020-2025.

RPJM Desa Kembaran tahun 2020-2025 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Desa Kembaran sampai dengan periode Kepala Desa habis masa jabatannya pada tahun 2025.

RPJM Desa Kembaran 2020-2025 ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa Kembaran dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJM Desa akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan

menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

RPJM Desa Kembaran Tahun 2020-2025 ini disusun berdasarkan hasil Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) dan dikombinasikan dengan visi misi Kepala Desa. Kombinasi keduanya tergambar secara utuh dalam “Masa Depan Desa” yang dihasilkan lewat pendekatan PAD. Di dalamnya akan memuat kepentingan-kepentingan seluruh elemen masyarakat, khususnya kelompok masyarakat marjinal sekaligus visi misi Kepala Desa yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### Matrix 1.1

#### Papan Masa Depan Desa



## 1.2 Maksud, Tujuan, Dan Dasar Hukum

### A. Maksud

Maksud penyusunan dokumen RPJM Desa ini antara lain untuk :

1. Mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif yang ditopang oleh tata kelola yang demokratis antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat desa demi terwujudnya kemandirian desa;
2. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa menjadi dokumen RPJM Desa yang digunakan sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan desa, yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah desa maupun non pemerintah desa selama kurun waktu empat tahun dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara

bertahap dan berkesinambungan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

## B. Tujuan

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa pada saat Pemaparan Visi Misi calon Kepala Desa kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau kurun waktu 2020 – 2025 yang dikombinasikan dengan dokumen Perencanaan Apresiatif Desa (PAD ) menjadi dokumen RPJM Desa yang digunakan sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan desa, yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah desa maupun non pemerintah desa selama kurun waktu empat tahun dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran Menjabarkan agenda-agenda yang ditawarkan Kepala Desa terpilih
2. Mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif dan apresiatif berbasis aset, yang ditopang oleh tata kelola yang demokratis antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa demi terwujudnya kemandirian Desa;
3. Mengupayakan agar pembangunan Desa berjalan efektif, efisien, bersasaran dan sinkron dengan pembangunan kabupaten
4. Memberi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Desa (Renstra–SKPD) serta rencana pembangunan desa
5. Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan / pemangku kepentingan
6. Mengoptimalkan partisipasi dan kemandirian masyarakat
7. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
9. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

#### 1.3 Hubungan RPJMDESA dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan pada Desa menyusun

perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Proses perencanaan pembangunan di tingkat desa melalui forum musyawarah desa (musdes) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan daerah dan nasional. Pasal 79 UU Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Meskipun musyawarah desa hanya sebagai input perencanaan daerah, akan tetapi proses musdes ini merupakan wujud pendekatan partisipasi dari bawah dan sebagai masukan terhadap perencanaan daerah dan perencanaan nasional.

Prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo sesuai RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2020 yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJM Des ini antara lain berupa ; 1) Penanggulangan Kemiskinan, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Infrastruktur, 5) Pertanian dan Ketahanan Pangan, 5) Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, 6 Iklam investasi dan usaha, 7) Energi dan Sumberdaya Mineral, 8) Kawasan Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh, serta 9) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Matrik 1.2  
Penyelarasan Program Kegiatan Desa  
Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Wonosobo	Program/Kegiatan desa yang mendukung Prioritas
1.	Penanggulangan Kemiskinan	a. Menurunnya prosentase jumlah keluarga Pra KS dan KS I menjadi 15 % pada tahun 2025; b. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; c. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; d. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata; e. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;

		<p>f. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang sehat;</p> <p>g. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin;</p> <p>h. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>i. Terjaminya rasa aman dari tindak kekerasan;</p> <p>j. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Untuk ini kebijakan pembangunannya diarahkan pada :</p> <p>a. Menjamin tersedianya kebutuhan bahan pokok.</p> <p>b. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan.</p> <p>c. Meningkatkan keswadayaan masyarakat miskin.</p>
2.	Pendidikan	<p>1) Program peningkatan Sarpras Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) ialah kerjasama antara Pemerintah Desa dan pihak ketiga dalam pengembangan dan perbaikan infrastruktur pendidikan PAUD / TK serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan ( insentif ) guru PAUD dan TK</p> <p>2) Progran meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI dan kejar paket A,</p> <p>3) Program meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs dan kejar paket B;</p> <p>4) Program meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan menengah SMA/SMK/MA dan kejar paket C;</p> <p>5) Program Meningkatkan angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/kejar paket A dan SMP / MTs dan kejar paket B;</p>

		<p>6) Program meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun dan anak usia 13 – 15 tahun;</p> <p>7) Program menurunkan rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah,;</p> <p>8) Program meningkatkan proporsi anak yang terlayani pada pendidikan usia dini,</p> <p>9) Program menurunkan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun,</p> <p>d. Program pemerataan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas, yang ditandai :</p> <p>1) Program meningkatkan proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik; Tersedianya standar pelayanan minimal pendidikan.</p>
3.	Kesehatan	<p>a. Meningkatkan umur harapan hidup dari 68,7 tahun menjadi 70 tahun;</p> <p>b. Menurunnya angka kematian bayi;</p> <p>c. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;</p> <p>d. Menurunnya angka giuzi buruk anak balita,</p> <p>Untuk mencapai kondisi seperti itu, maka kebijakan pembangunannya diarahkan pada :</p> <p>a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat, melalui Posyandu Balita / Lansia / Puskesmas II</p> <p>b. Membangun lingkungan yang sehat dengan menggerakkan partisipasi dan gotro masyarakat</p> <p>c. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang berkualitas, senam bumil dan peningkatan kegiatan Posyandu Balita / lansia</p> <p>d. Meminta tenaga kesehatan yang berkualitas;</p> <p>e. Pemerataan sarana kesehatan yang berkualitas;</p>

		<p>f. Peningkatan intensif bagi kader Posyandu / kesehatan</p> <p>g. Pengadaan ambulan desa / pembentukan kelompok pemilik mobil sebagai ambulan desa.</p>
4.	Infrastruktur	<p>A. Sumber Daya Air</p> <p>1) Peningkatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjaga kuantitas dan kualitasnya;</p> <p>2) Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan air bersih;</p> <p>3) Mengefektifkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pengelolaan sumber daya air;</p> <p>4). Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan sumber daya air melalui pengembangan kemitraan dan penataan usaha secara efisien, transparan dan profesional</p> <p>B. Transportasi</p> <p>1) Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang ditandai dengan meningkatnya lebar rata-rata jalan 4 meter menjadi 5 meter;</p> <p>2) Perbaikan infrastruktur pertanian ;</p> <p>3) Perbaikan jalan makam</p> <p>4) Meningkatnya peran aktif masyarakat dan swasta;</p>
5.	<p>Pertanian dan ketahanan Pangan</p>	<p>a. Meningkatnya kemampuan petani, peternak dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing;</p> <p>b. Tercukupinya kebutuhan bahan pangan masyarakat;</p> <p>c. Meningkatnya produksi pertanian:</p>

		<p>d. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian.</p> <p>Untuk itu kebijakan pembangunannya diarahkan pada :</p> <p>e. Peningkatan kemampuan petani, peternak dan pelaku pertanian serta penguatan lembaga pendukungnya;</p> <p>f. Peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;</p> <p>g. Pembangunan / Perbaikan irigasi untuk pertanian</p> <p>d. Membuat Peraturan Desa perlindungan mata air, kawasan pertanian serta peraturan pemanfaatannya bagi masyarakat.</p> <p>h. Meningkatkan akses pasar.</p>
6.	Konsolidasi dan reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan	<p>a. Peningkatan kesejahteraan kepada Aparatur Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa ;</p> <p>b. Pengadaan pelatihan-pelatihan bagi aparatur Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa ;</p> <p>c. Berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa.</p> <p>d. Terdapatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;</p> <p>e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.</p> <p>Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, kebijakan pembangunannya diarahkan pada :</p> <p>a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab dengan</p>

		<p>menghindarkan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta masyarakat, mengembangkan etika dan moral serta melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap setiap kegiatan pemerintah Desa.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan menyuntikkan semangat <i>enterpreneurial</i>, memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta menerapkan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi;</p>
7.	Iklm investasi dan usaha	<p>a. Terdapatnya keserasian kepentingan antara pemerintah Desa dan masyarakat;</p> <p>b. Terwujudnya kemitraan antara pemerintah Desa dan swasta dalam setiap kerjasama.</p> <p>Untuk itu kebijakan pembangunannya diarahkan pada :</p> <p>a. Mewujudkan adanya kepastian hukum dalam kerjasama;</p> <p>b. Mengefektifkan penatausahaan kerjasama</p> <p>c. Fasilitasi dan peningkatan Bumdes;</p> <p>d. Pengadaan pelatihan peningkatan kualitas produksi usaha masyarakat bekerjasama dengan dinas terkait</p>
8.	Energi dan sumber daya mineral	-
9.	Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	<p>1) Meningkatnya pelayanan persampahan;</p> <p>2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>3) Teraihnya piala Adipura.</p>

		<p>Untuk itu kebijakan pembangunannya diarahkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan kegiatan study banding tentang sampah ;</li> <li>b. Menggiatkan pemasyarakatan masalah pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup kepada masyarakat</li> <li>c. Membuat Peraturan Desa perlindungan mata air, kawasan pertanian serta peraturan pemanfaatannya bagi masyarakat.</li> <li>d. Menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.</li> <li>e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta untuk melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> </ol>
10.	Kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan akselerasi pembangunan yang strategis dusun tertinggal;</li> <li>b. Meningkatkan keseimbangan pertumbuhan antar dusun;</li> <li>c. Menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan;</li> <li>d. Meningkatkan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi.</li> </ol> <p>Dalam rangka mencapai sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antar dusun, diperlukan arah kebijakan pembangunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan Dusun yang strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan dusun tertinggal dalam suatu sistem wilayah pembangunan ekonomi yang sinergis;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyeimbangkan pemerataan pertumbuhan antar dusun beserta komunitasnya;</li> <li>c. Memantapkan pembangunan dan pengelolaan tata ruang;</li> <li>d. Melaksanakan sistem pengelolaan tanah yang efisien dan efektif.</li> </ul>
11.	Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak adanya ancaman gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;</li> <li>b. Semakin berkembangnya penerapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya Desa;</li> <li>c. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan / kesenian tradisional.</li> </ul>

#### 1.4 Visi Dan Misi

##### 1. Visi

“ Membangun Bersama Masyarakat ”

Penjabaran dari pada “ Membangun Bersama Masyarakat ” adalah :

1. Membangun hubungan yang harmonis antara pemerintahan desa dan ulama serta berbagai komponen yang ada di desa sehingga dapat menciptakan masyarakat yang damai, nyaman dan agamis.
2. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam ikut serta membangun desa dengan cara memberi ruang gerak yang luas bagi masyarakat dalam proses perencanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan itu sendiri.
3. Meningkatkan kinerja pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat dengan prinsip keramahan, kemudahan dan kecepatan.
4. Memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di desa dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

5. Membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan.

## 2. Misi

### a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan :

Perwujudan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sebagai prioritas pembangunan, bukan sekedar latak politik dalam mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan semasa Orde Baru. Akan tetapi pelebagaan *good govermant, clean and stronght govermant* di tingkat pemerintahan Desa, lebih merupakan perwujudan dari semangat reformasi politik yang diarahkan untuk mewujudkan otonomi dan demokrasi. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan Desa selama tahun 2016 – 2018 diupayakan melalui perwujudan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu secara khusus sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- a. Berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa.
- b. Terdapatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, kebijakan pembangunannya diarahkan pada :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab dengan menghindarkan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta masyarakat, mengembangkan etika dan moral serta melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap setiap kegiatan pemerintah Desa.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan menyuntikkan semangat *enterpreneurial*, memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta menerapkan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi;

b) Bidang pembangunan:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa, yang ditandai dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat desa yang ditandai dengan semakin besarnya nilai swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan peran kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan pedesaan diarahkan pada :

- a. Memperkuat Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat Desa untuk menyelenggarakan pembangunan dilingkungannya;
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan;
- d. Memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat pedesaan berupa jaringan kerjasama.

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

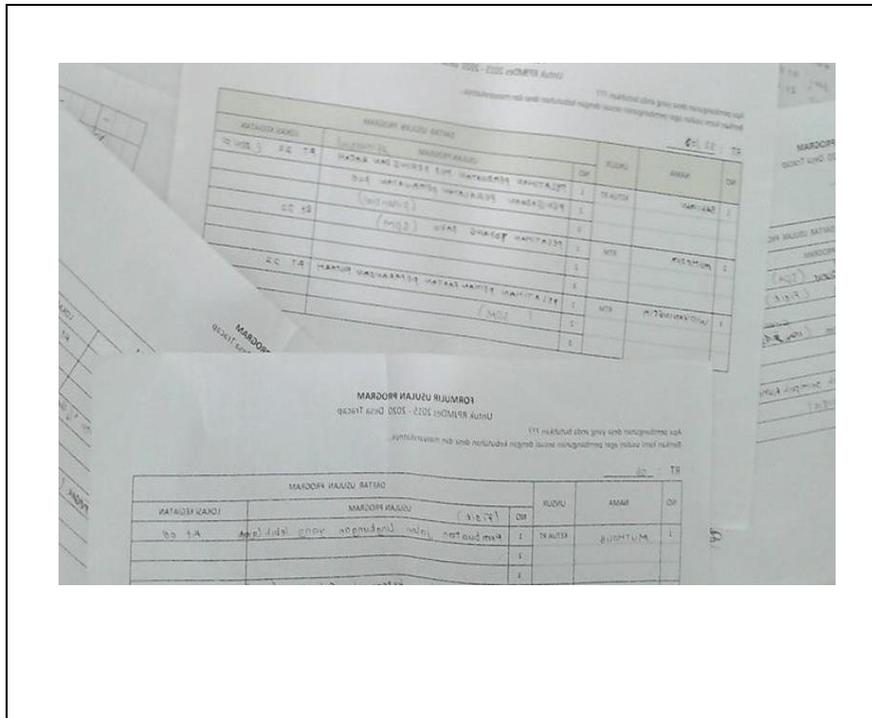
- a. Peningkatan Kamtibmas ;
- b. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana ;
- c. Pembentukan ronda malam ;
- d. Memperkuat musyawarah di tingkat RT, RW dan Dusun ;
- e. Peningkatan mediasi terhadap konflik internal & eksternal ;
- f. Fasilitasi kadarkum ;
- g. Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya adat.

d) Bidang pemberdayaan masyarakat:

- a. Meningkatkan semua potensi desa dengan cara melakukan penguatan kapasitas dan kaderisasi terhadap kelompok masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Mendukung penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (tani, pengrajin, pemuda, perempuan) dalam optimalisasi pembangunan desa ;

- c. Mendayagunakan semua potensi desa dengan cara membangun kerjasama antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan ;
- d. Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin dan usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi ;
- e. Penguatan kader pembangunan desa ;

Matrix 1.3  
Papan Masa Depan Desa



Matrix 1.4  
Visi dan Misi Desa

a. Lembar matrik untuk merumuskan visi dan misi desa

Rumusan	Menurut Kepala Desa Terpilih	Menurut Warga Masyarakat	Rumusan Akhir Menurut Keduanya ( Kades + Warga + Masyarakat
Visi	Membangun Bersama Masyarakat	Masyarakat sebagai subyek pembangunan	Desa Kembaran membangun dan maju dilakukan oleh masyarakat dengan pembinaan & pengawasan oleh Pemerintahan Desa
Misi	<p>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :</p> <p>a. Berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa.</p> <p>b. Terdapatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,</p>	<p>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :</p> <p>a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab dengan menghindarkan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta masyarakat, mengembangkan etika dan moral serta melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap setiap kegiatan pemerintah Desa.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan</p>	<p>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :</p> <p>Terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel</p>

	<p>profesional dan akuntabel;</p> <p>c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.</p>	<p>menyuntikkan semangat <i>entrepreneurial</i>, memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta menerapkan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi;</p>	
	<p>Bidang Pembangunan :</p> <p>a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa, yang ditandai dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Desa;</p> <p>b. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat desa yang ditandai dengan semakin besarnya nilai swadaya masyarakat dalam</p>	<p>Bidang Pembangunan :</p> <p>a. Memperkuat Perencanaan Pembangunan Desa;</p> <p>b. Memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat Desa untuk menyelenggarakan pembangunan dilingkungannya;</p> <p>c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan;</p> <p>d. Memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama.</p>	<p>Bidang Pembangunan :</p> <p>Mengedepankan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, menuju desa yang mandiri, partisipatif, terbuka dan kerjasama yang baik menuju Desa Kembaran lebih maju.</p>

	<p>pelaksanaan pembangunan desa;</p> <p>c. Meningkatnya peran kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.</p>		
	<p>Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat:</p> <p>a. Peningkatan Kamtibmas ;</p> <p>b. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana ;</p> <p>c. Pembentukan ronda malam ;</p> <p>d. Memperkuat musyawarah di tingkat RT, RW dan Dusun ;</p> <p>e. Peningkatan mediasi terhadap konflik internal &amp; eksternal ;</p> <p>f. Fasilitasi kadarkum ;</p>	<p>Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat:</p> <p>a. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</p> <p>b. Penyelenggaraan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat;</p> <p>c. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;</p> <p>d. Pemanfaatan radio komunitas untuk sistem keamanan Desa;</p> <p>e. Pengaturan siskamling</p>	<p>Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat:</p> <p>Terwujudnya hubungan yang dinamis antar organisasi masyarakat, yang dilakukan lewat kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat menuju masyarakat bersatu padu membangun desa disegala bidang yang berkelanjutan</p>

	<p>g. Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya adat.</p>	<p>Desa;</p> <p>f. Pembinaan kerukunan warga melalui penggiatan kegiatan kemasyarakatan;</p> <p>g. Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan fasilitasi mediasi di Desa;</p> <p>h. Penetapan peraturan Desa tentang penyelesaian konflik di Desa;</p> <p>i. Peningkatan kapasitas masyarakat tentang kesadaran hukum; dan</p> <p>j. Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa melalui penggiatan kegiatan kemasyarakatan.</p> <p>k. Menciptakan hubungan yang baik antar elemen, kelompok dan organisasi masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan Desa.</p> <p>l. .Penguatan peran organisasi masyarakat untuk optimalisasi pembangunan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan.</p> <p>m..Memberikan dukungan secara penuh terhadap organisasi masyarakat demi lahirnya kader desa yang handal.</p> <p>n.Mendukung penguatan</p>	
--	--	--	--

		kelompok dan organisasi masyarakat untuk terciptanya kelestarian budaya..	
	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat:</p> <p>a. Meningkatkan semua potensi desa dengan cara melakukan penguatan kapasitas dan kaderisasi terhadap kelompok masyarakat untuk penyelenggara n pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>b. Mendukung penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (tani, pengrajin, pemuda, perempuan) dalam optimalisasi pembangunan desa ;</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat:</p> <p>a. Pengembangan seni budaya lokal dan kontemporer;</p> <p>b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</p> <p>c. Fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat melalui kelompok tani, kelompok seni budaya dan kelompok masyarakat lainnya;</p> <p>d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</p> <p>e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;</p> <p>f. Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat:</p> <p>Penguatan dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan peningkatan potensi desa menuju optimalisasi pembangunan desa yang berkelanjutan.</p>

	<p>c. Mendayagunakan semua potensi desa dengan cara membangun kerjasama antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan ;</p> <p>d. Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin dan usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi ;</p> <p>e. Penguatan kader pembangunan desa ;</p>	<p>g. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>h. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;</p> <p>i. Pemetaan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Desa;</p> <p>j. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi Desa; dan</p> <p>k. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan perempuan dan anak di Desa.</p>	
--	---	--	--

b. Lembar Matrix Visi dan Misi Desa

<p>Visi Desa ( Impian / Masa Depan Desa Secara Keseluruhan )</p>	<p>Desa Kembaran membangun dan maju dilakukan oleh masyarakat dengan pembinaan &amp; pengawasan oleh Pemerintahan Desa</p>
<p>Misi Desa (Sub Impian, Yang Mendukung Terwujudnya Impian/ Masa Depan</p>	

Desa Keseluruhan)

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :

- a. Berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa.
- b. Terdapatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Bidang Pembangunan :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa, yang ditandai dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Desa;
- b. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat desa yang ditandai dengan semakin besarnya nilai swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatnya peran kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.

Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat:

- a. Peningkatan Kamtibmas ;
- b. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana ;
- c. Pembentukan ronda malam ;
- d. Memperkuat musyawarah di tingkat RT, RW dan Dusun ;
- e. Peningkatan mediasi terhadap konflik internal & eksternal ;
- f. Fasilitasi kadarkum ;
- g. Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya adat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Meningkatkan semua potensi desa dengan cara melakukan penguatan kapasitas dan kaderisasi terhadap kelompok masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Mendukung penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (tani, pengrajin, pemuda, perempuan) dalam optimalisasi pembangunan desa ;

- c. Mendayagunakan semua potensi desa dengan cara membangun kerjasama antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan ;
- d. Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin dan usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi ;
- e. Penguatan kader pembangunan desa ;

## 5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan RPJMDesa, hubungan RPJMDesa dengan Perencanaan Kabupaten, Visi dan Misi Desa, serta Sistematika Penulisan RPJMDesa.

### Bab II Gambaran Umum Kondisi Desa

Mendiskripsikan tentang kondisi geografis dan demografis, Sejarah Desa, Asset Desa dan Potensi Keuangan Desa.

### Bab III Apresiasi Sektor Pembangunan Desa

Menguraikan tentang kondisi umum, potensi, peluang dan perubahan yang diinginkan terjadi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

### Bab IV Strategi dan Program Desa

Menguraikan tentang strategi dan merupakan kebijakan dalam implementasi program pembangunan desa dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### Bab V Penutup

Berisi tentang penjabaran manajemen resiko terhadap tantangan dan / atau ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan RPJM Desa.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

A. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis Desa

1) Letak Wilayah

Secara geografis Desa Kembaran terletak antara 7,25 LU dan 7,27 LS. 109,54 BB dan 109,55 BT. disebelah tenggara / timur kota Wonosobo, yaitu :

- a) Jarak dari Ibu Kota Kecamatan Kalikajar : 5 km.
- b) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo : 14 km.
- c) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 132 km.
- d) Jarak dari Ibu Kota Negara : 494 km
- e) Jarak dari Dusun ke Kantor Pemer Desa :
  - Dusun Kembaran : 0 km.
  - Dusun Patran : 0,6 km.
  - Dusun Luwihan : 1 km.
  - Dusun wonokriyo : 2 km.
  - Ketinggian dari permukaan laut : 996M.
  - Banyak curah hujan : 2514 - 4387 Mm/th.
  - Topografi : Tinggi.
  - Suhu udara rata – rata pertahun : 15–30,5 ° C

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Kembaran  $\pm$  252,250 Ha terdiri dari :

- 1. Tanah Sawah : 113 Ha
- 2. Tanah Kering : 114 Ha
- 3. Lain-lain : 25,25 Ha

No	Kondisi Wilayah	Luas (Ha)	Prosentase
1.	Lahan Sawah	113	44,80
a.	Irigasi Teknis	-	-
b.	Irigasi ½ Teknis	42	37,17
c.	Irigasi Sederhana	71	62,83

	d.	Tadah Hujan	-	-
2.		Lahan Kering	139,250	55,20
	a.	Pekarangan dan Bangunan	13,40	9,60
	b.	Tegalan / Kebun	114	81,87
	c.	Padang Gembala	-	-
	d.	Kolam / Tambak	-	-
	e.	Hutan Negara	-	-
	f.	Lain-lain (jln, sungai dll)	11,85	8,53
		J u m l a h	252,250	100

a. Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Kembaran adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lamuk / Desa Bowongso
2. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tegalombo
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kalikuning
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Maduretno

B. Topografi

Dilihat dari aspek topografi, Desa Kembaran berkondisi sebagai berikut :

Desa Kembaran terletak pada ketinggian  $\pm$  996 M diatas permukaan laut sedangkan Kondisi topografinya dataran tinggi.

C. Jenis Tanah

Tanah Regosol

D. Kemiringan Tanah

Daerah dengan kemiringan antara 2 – 15 % seluas 252,250 Ha

E. Iklim

Desa Kembaran beriklim sebagaimana umumnya seluruh Wilayah Wonosobo yaitu beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 25 – 30° C di siang hari, turun menjadi 23° C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 13 – 20° C pada malam hari dan 21 – 22° C di siang hari. Hujan turun hampir sepanjang tahun. rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 2000 mm.

#### F. Gambaran Umum Demografis

Desa Kembaran merupakan bagian dari gambaran wilayah Kabupaten Wonosobo yang memiliki berbagai potensi, Penduduk merupakan sumber daya utama yang dapat berperan sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan guna terwujudnya visi dan misi suatu bangsa. Tanpa adanya keterlibatan penduduk dalam memberikan partisipasi dan kontribusi yang positif maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Letak geografis suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di daerah tersebut. Desa Kembaran yang berada di daerah pegunungan, sebagian besar masyarakatnya hidup bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian mendominasi dalam kegiatan perekonomian Desa Kembaran, dimana sebagian besar masyarakat Desa Kembaran bermata pencaharian sebagai petani. komoditas utama adalah Padi, Jagung, Cabai serta Sayur - sayuran.

#### G. Perekonomian Desa

Perekonomian desa didukung adanya fasilitas jalan penghubung dengan kota kabupaten dengan jarak  $\pm$  14 KM dan jarak dengan Kota Kecamatan  $\pm$  5 KM, jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan Selain mayoritas penghasilan penduduk dari pertanian dan dagang ada pula yang berprofesi sebagai Jasa ternak Lembu, Jasa Transportasi, Pertukangan Kerajinan kayu.

Letak geografis suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di daerah tersebut. Adapun Desa Kembaran yang berada di daerah pegunungan, sebagian besar masyarakatnya hidup bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian mendominasi dalam kegiatan perekonomian Desa Kembaran, dimana sebagian besar masyarakat Desa Kembaran bermata pencaharian sebagai petani.

##### a. Tanah Pertanian :

1. Tanah Sawah	: 113	Ha.
2. Tanah Kering / Tegalan / Perkebunan	: 117	Ha.

Jumlah Penduduk dirinci Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Prosentase ( % )
1	Buruh Tani	253	7,03
2	Petani Sendiri	716	19,89
3	Kontruksi	1	0,02
4	Karyawan swasta	76	2,11
5	Karyawan BUMN	2	0,05
6	Tukang cukur	4	0,11
7	Tukang listrik	1	0,02
8	Tukang batu	37	1,02
9	Tukang kayu	11	0,30
10	Tukang las	2	0,05
11	Tukag jahit	11	0,30
12	Mekanik	9	0,25
13	Ustadz/mubaligh	6	0,16
14	Guru	23	0,63
15	Bidan	1	0,02
16	Penyiar radio	1	0,02
17	Pelaut	1	0,02
18	Wiraswasta	1237	34,38
19	Peternak Unggas	2	0,05
20	Penggalian	9	0,25
21	Industri	77	2,14
22	Perangkat Desa	15	0,41
23	Perdagangan	48	1,33
24	Transportasi / sopir	46	1,27
25	PNS / Honor daerah	31	0,86
26	TNI	1	0,02
27	POLRI	2	0,05
28	Pensiunan	1	0,02
29	Pembantu rumah tangga	62	1,72
30	Buruh harian lepas	107	2,97
31	Tukang sol sepatu	1	0,02
32	Pengusaha kecil dan menengah	19	0,52

33	Dukun kampung terlatih	5	0,13
34	peternak	5	0,13
35	Buruh migran laki-laki	30	0,83
36	Buruh migran perempuan	38	1,05
37	Ojek	17	0,47
38	Nelayan	2	0,05
39	Notaris	1	0,02
	Jumlah	3598	100

a. Transportasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah
1	Panjang jalan desa kondisi baik (km)	1,3
2	Panjang jalan desa kondisi rusak (km)	2,7
3	Jumlah jembatan desa kondisi baik	8
4	Jumlah jembatan desa kondisi rusak	5
5	Jumlah Kendaraan Roda 4	112
6	Jumlah kendaraan roda 2	684
7	Jumlah Wartel / Warnet	1
8	Jumlah Televisi	1.212
9	Jumlah Radio	322

b. Perdagangan

Jumlah Sarana Perdagangan

No	Uraian	Jumlah
1	Pasar Umum	1
2	Pasar Hewan	-
3	Toko / Warung	90
4	Warung Makan	8
5	Toko Besi / Bangunan	1
6	Kios Saprotan	7
7	Koperasi	2

8	Bank	-
9	BMT / UED-SP	1

c. Data Komoditas hasil Pertanian Desa Kembaran Tahun 2019

Data Komoditas hasil Pertanian Desa Kembaran Tahun 2019.

Sistem pengelolaan lahan secara umum telah dilaksanakan dengan teknis menengah keatas sekaligus langkah penanaman dengan cara tumpangsari.

1. Luas tanam dan produksi

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha / Batang)	Produksi (Ton)
1	Padi	19,60	71,50
2	Jagung	76	278
3	Ubi Jalar	5,30	19
4	Ubi Kayu	4,50	29
5	Kacang Panjang	6,50	28
6	Cabe	74,70	734
7	Pisang	-	-
8	Klengkeng	3 batang	-
9	Kacang Merah	1,90	6
10	Tomat	13,50	436
11	Sawi	79	1800
12	Kubis	25,5	467
13	Mentimun	3,70	27,40
14	Buncis	23	87
15	Terong	7	38
16	Umbi – umbian Lain	27,5	96

2. Populasi Ternak

No	Tenak	Jumlah
1	Sapi Perah	-
2	Sapi Biasa	238
3	Kerbau	-
4	Kambing	451
5	Kuda	-
6	Domba	-

7	Ayam Kampung	2968
8	Ayam Petelur	50
9	Ayam Pedaging	3900
10	Itik	86
11	Kolam Ikan	254

d. Industri dan Kerajinan

No	Jenis	Jumlah Pengusaha / Pengrajin
1	Makanan Olahan	44 orang
2	Anyaman	34 orang
3	Tahu	-
4	Tempe	10 orang
5	Kerajinan besi tempa	2 Orang

2. Ketenagakerjaan

Salah satu modal dasar penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah tenaga kerja, lebih-lebih tenaga kerja yang berkualitas. Namun demikian tenaga kerja juga dapat menjadi masalah tersendiri dalam pembangunan, khususnya jika terjadi ledakan angkatan kerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia. Perkembangan angkatan kerja sangat pesat akibat kurang berhasilnya program keluarga berencana, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran dan menimbulkan masalah sosial antara lain kenakalan remaja dan kamtibmas. Kurangnya profesionalisme tenaga kerja berakibat ketergantungan terhadap proyek di kota serta kerja ke luar Negeri hanya sebagai pembantu rumah tangga.

H. Sosial Budaya Daerah

1. Kependudukan

Penduduk merupakan sumber daya utama yang dapat berperan sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan guna terwujudnya visi dan misi suatu bangsa. Tanpa adanya keterlibatan penduduk dalam memberikan partisipasi dan kontribusi yang positif maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

a. Jumlah Penduduk :

Desa Kembaran mempunyai jumlah penduduk 5.523 jiwa yang tersebar dalam 4 ( empat ) wilayah dusun sebagaimana table dibawah ini :

1) Perkembangan Penduduk Tahun 2019

No	Dusun	Jml Penduduk Akhir Tahun 2018		Jumlah Perkembangan Penduduk								Jml Penduduk Akhir Tahun 2019 ( 31 Desember 2019 )	
				Lahir		Mati		Datang		Pergi			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kembaran	1372	1348	7	8	9	7	5	11	6	10	1439	1398
2	Patran	183	174	-	-	1	-	1	2	-	1	192	175
3	Luwihan	564	559	3	5	5	5	3	5	2	4	588	560
4	Wonokriyo	571	565	3	4	7	4	3	6	1	5	589	566
JUMLAH		2762	2680	13	17	22	16	12	24	09	20	2808	2715
JUMLAH SELURUHNYA												5523	

No	Dusun	Jumlah KK
1	2	3
1	Kembaran	793
2	Patran	91
3	Luwihan	339
4	Wonokriyo	361
JUMLAH		1.585

b. Kewarganegaraan :

1. Warga Negara Indonesia ( WNI ) : 5.523 orang
2. Warga Negara Asing ( WNA ) : ----- orang

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama :

1. Islam : 5.523 orang
2. Kristen : ----- orang
3. Katholik : ----- orang
4. Hindu : ----- orang
5. Budha : ----- orang

d. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan :

1. Kelompok Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak Sekolah / belum tamat SD		-
2	Tamat SD	2881	73.73
3	Tamat SLTP	626	16.60
4	Tamat SLTA	399	7.93
5	D-1	1	0.02
6	D-2	15	0.39
7	D-3	14	0.37
8	D-4	-	-
9	S-1	33	0.87
10	S-2	2	0.05
11	S-3	-	-
	Jumlah	3871	100

Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Pasangan Usia Subur	954
2	Wanita Usia Subur	1293
3	Peserta KB MOP	6
4	Peserta KB MOW	43
5	Peserta KB IUD / Spiral	68
6	Peserta KB Kondom	12
7	Peserta KB Implan / Susuk	120
8	Peserta KB Suntik	530
9	Peserta KB Pil	30

2. Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Kader Posyandu	45
2	Anggota Kelompok Donor Darah	114
3	Anggota Ambulan Desa	4

4	Jumlah Bayi Lahir Hidup	89
5	Jumlah Kelahiran Bayi yang ditolong Bidan	89
6	Jumlah Kelahiran Bayi yang ditolong Dukun Bayi	-
7	Jumlah Kematian Bayi (umur 0 – 1 th)	-
8	Jumlah Kematian Balita (umur > 1 th – 5 th)	-
9	Jumlah Kematian Ibu	-

#### DATA PAUD DAN TK

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah Guru		No. SK Pendirian	Ket.
			PNS	Wiyata		
1	Paud Bina Sakti I	Dusun Kembaran	-	4		
2	Paud Bhina Sakti III	Dusun Patran	-	3		
2	Paud Bina Sakti V	Dusun Wonokriyo	-	5		
3	Paud Insan Mulia	Dusun Luwihan	-	3		
4	TK Pertiwi	Dusun Kembaran	-	3		
5	TK Habiburrohmah	Dusun Luwihan	-	3		

I. Pemerintahan Umum

a. Kades dan Perangkat Desa lainnya

No.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN		AGAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
			L	P				
1	AGUNG HERMAWAN	Wsb, 22-10-1987	L		Islam	SMA	Kepala Desa	Rekapitulasi jumlah tiap jenis jabatan SOTK Pemdes :
2	ADY SETIAWAN	Wsb, 10-12-1989	L		Islam	S1	Sekretaris Desa	
3	IRLADI IDRIS	Wsb, 05-06-1977	L		Islam	SMA	Kaur Umum & Perencanaan	
4	PAWIT WIBOWO	Wsb, 04-04-1981	L		Islam	SMA	Kaur Keuangan	- Kepala Desa : 1
5	EKO YULIONO	Wsb, 23-07-1978	L		Islam	SMA	Kasi Pemerintahan	- Sekretaris Desa : 1
6	SURANTO	Wsb, 19-03-1968	L		Islam	SMP	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	- Kepala Dusun : 4
7	SUBKHI	Wsb, 02-03-1979	L		Islam	SMA	Kadus Kembaran	- Kepala Urusan : 2
8	NUGROHO	Wsb, 20-01-1988	L		Islam	SMA	Kadus Patran	- Kepala Seksi : 2
9	SUYOTO	Wsb, 20-07-1975	L		Islam	SMA	Kadus Luwihan	- Staf : 4
10	SUPRIYONO	Wsb, 01-08-1970	L		Islam	SMA	Kadus Wonokriyo	
11	TUHONO	Wsb, 31-12-1955	L		Islam	SD	Staf pada Urusan Umum & Perencanaan	
12	MUHTAR	Wsb, 05-10-1960	L		Islam	SD	Staf pada Urusan Keuangan	
13	TOLIB	Wsb, 08-07-1976	L		Islam	SD	Staf pada Seksi Pemerintahan	
14	M. YUSUP	Wsb, 15-02-1962	L		Islam	SMP	Staf pada Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	

NO.	NAMA	TEMPAT, TGL.LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	SK PENGANGKATAN PERTAMA PERANGKAT DESA	TMT AKHIR MASA JABATAN
1	ADY SETIAWAN	WSB, 10-12-1989	Laki-laki	S1	Sekretaris Desa	SK Kades Nomor : 140/10/2017 Tanggal 25/07/2017	10 Desember 2049
2	IRLADI IDRIS	WSB, 05-06-1977	Laki-laki	SLTP	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	SK Kades Nomor : 141/08/SK/2013 Tanggal 05/07/2013	05 Juni 2037
3	PAWIT WIBOWO	WSB, 04-04-1981	Laki-laki	SLTA	Kepala Urusan Keuangan	SK Kades Nomor : 141/06/2012 Tanggal 04/05/2012	04 April 2041
4	EKO YULIONO	WSB, 23-07-1978	Laki-laki	SLTA	Kepala Seksi Pemerintahan	SK Kades Nomor : 141/001/SK/I/2005 Tanggal 20/01/2005	23 Juli 2038
5	SURANTO	WSB, 19-03-1968	Laki-laki	SLTP	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	SK Kades Nomor : 141/02/SK/III/2005 Tanggal 21/03/2005	19 Maret 2028
6	SUBKHI	WSB, 02-03-1979	Laki-laki	SLTA	Kepala Dusun Kembaran	SK Kades Nomor : 141/06/2012 Tanggal 04/05/2012	2 Maret 2039
7	NUGROHO	WSB, 20-01-1988	Laki-laki	SLTA	Kepala Dusun Patran	SK Kades Nomor : 140/11/2017 Tanggal 27/07/2017	20 Januari 2048
8	SUYOTO	WSB, 20-07-1975	Laki-laki	SLTA	Kepala Dusun Luwihan	SK Kades Nomor : 141/05/SK/XII/2009 Tanggal 10/12/2009	20 Juli 2035
9	SUPRIYONO	WSB, 01-08-1970	Laki-laki	SLTA	Kepala Dusun Wonokriyo	SK Camat Nomor : 141/020/1999 Tanggal 05/05/1999	01 Agustus 2035
10	TUHONO	WSB, 31-12-1955	Laki-laki	SD	Staf pada Urusan Umum dan Perencanaan	SK Camat Nomor 141/048/SKC/84 Tanggal 01/03/1984	31 Desember 2020

11	MUHTAR	WSB, 05-10-1960	Laki-laki	SD	Staf pada Urusan Keuangan	SK Camat Nomor 141/007/1991 Tanggal 15/03/1991	05 Oktober 2025
12	TOLIB	WSB, 08-07-1976	Laki-laki	SD	Staf pada Urusan Pemerintahan	SK Camat Nomor 141/008/1998 Tanggal 18/02/1998	08 Juli 2041
13	M. YUSUP	WSB, 15-02-1962	Laki-laki	SLTA	Staf pada Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan	SK Kades Nomor : 141/02/SK/III/2005 Tanggal 21/03/2005	15 Februari 2022

## J. Permasalahan Desa

### 1. Permasalahan dalam Bidang Ekonomi

- a. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi desa Kembaran. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat produktifitas masyarakatnya masih rendah sehingga belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal.
- b. Masih tingginya tingkat kesenjangan Sosial Ekonomi, sehingga pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih bergantung dari dana-dana subsidi dari pemerintah.
- c. Masih tingginya tingkat kemiskinan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah keluarga Pra KS dan KS I alasan ekonomi, sehingga dalam tahun 2019 mencapai 512 KK
- d. Masih banyaknya jumlah angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan kerja, yaitu pada tahun 2019 mencapai  $\pm$  200 orang.
- e. Rendahnya tingkat pendidikan rata-rata sehingga sulit untuk di bawa kearah kemajuan, serta mudah terbawa oleh arus atau pengaruh negatif, serta sangat mudah dibodohi oleh iming-iming yang tidak bertanggung jawab.

### 2. Permasalahan dalam Bidang Sosial Budaya

- a. Memudarnya nilai-nilai keagamaan dan moralitas masyarakat akibat modernisasi dan pembangunan yang lebih mementingkan fisik dengan mengabaikan pembangunan moral.
- b. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2019 baru mencapai 6 tahun atau tingkat dasar. Tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah yang ditandai dengan pola hidup yang kurang sehat, gizi masyarakat yang rendah, dan sarana dan prasana pelayanan kesehatan yang masih kurang dari memadai. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah tenaga medis, sarana dan prasana kesehatan.
- c. Masih rentannya hubungan sosial masyarakat yang ditandai dengan mudahnya terjadi kerusuhan sosial
- d. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal yang mampu memberikan kekhasan desa Kembaran, yang berakibat pada lunturnya identitas desa.

### 3. Permasalahan dalam Bidang Pemerintahan

- a. Masih rendahnya etos kerja aparat pemerintah yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi mereka, sehingga pelayanan birokrasi justru menghambat akselari pembangunan.

- b. Adanya kecenderungan pencampuradukan antara kepentingan politik tertentu dengan pelayanan masyarakat, sehingga kualitas dan fungsi pelayanan publik terganggu.
  - c. Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Selama ini proses perencanaan pembangunan, musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, hanya memenuhi standart formal, belum menyentuh pada kebutuhan dan kehendak masyarakat secara nyata.
  - d. Hubungan eksekutif dan legislatif selama ini sudah baik dan dinamis, namun masih perlu ditingkatkan khususnya dalam menjadikan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi nilai-nilai yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.
  - e. Dalam bidang hukum, masih ditemukan perangkat peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ataupun perkembangan peraturan perundang-undangan, pelanggaran hukum baik oleh aparat maupun masyarakat.
4. Permasalahan Lingkungan Hidup
- a. Belum pulihnya kondisi hutan sebagai akibat penjarahan hutan.
  - b. Semakin berkembangnya usaha pertambangan yang selalu merubah bentang alam dan mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam sekala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup. Kondisi seperti itu diperburuk dengan semakin banyaknya usaha pertambangan yang belum berijin.
  - c. Masih tingginya tingkat erosi di kawasan atas, akibat pengelolaan lahan yang tidak kaidah konservasi dan pengusahaan lahan yang terlalu intensif.
  - d. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
  - e. Belum dikembangkannya sistem mitigasi bencana alam, sehingga kejadian bencana alam tidak dapat dideteksi secara akurat.
  - f. Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup.
  - g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

## K. Legenda dan Sejarah Pembagunan Desa Kembaran

### I. Sejarah Terbentuknya Desa Kembaran

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Kemerdekaan Negara Kasatuan Republik Indonesia dapat diraih oleh para pejuang Kemerdekaan pada Hari jum'at Tanggal 17 Agustus 1945 dengan susah payah dan mengorbankan harta benda, nyawa yang tiada ternilai harganya, yang mana bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pejuang secara umum dengan langkah perang gerilya.

Berdasarkan cerita rakyat dari mulut ke mulut ( secara umum sesepuh yang menceritakan saat ini sudah meninggal dunia ), bahwa pada Tahun 1825 – 1830 terjadilah perang gerilya melawan kaum penjajah bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, pada saat itu pangeran diponegoro bekerjasama dengan Keraton Jogjakarta dan mendirikan pesanggrahan dimana-mana, termasuk juga di wilayah Desa Kembaran yang pada saat itu kondisi secara umum Desa Kembaran masih kategori hutan belantara.

Setelah mendirikan pesanggrahan di wilayah Desa Kembaran pada saat itu, Pangeran Diponegoro beserta Punggawa dari Keraton Jogjakarta mengirim 6 ( enam) tokoh terkemuka untuk diposisikan di pesanggrahan di wilayah Desa Kembaran, adapun 6 ( enam ) tokoh dimaksud adalah :

1. Kanjeng Dhipo
2. Pangeran Merto Koesoemo
3. Pangeran Merto Merto
4. Pangeran Merto Yoso
5. Pangeran Udrodono
6. Pangeran Suryo Koesoemo

Sehingga punggawa dari 6 ( enam) orang tersebut merekrut rakyat untuk bergabung melawan kaum penjajah, namun karena pada saat itu wilayah Desa Kembaran belum mempunyai nama, maka dari 6 ( enam) orang tersebut menamai pesanggrahan yang didudukinya dengan nama “ KEMBARAN “

Adapun Pendiri dan Sejarah Nama “ Desa Kembaran “ adalah :

Suatu saat pada waktu itu dari ke 6 ( enam ) orang tersebut diatas, ada 2 ( dua ) orang yang kembar, dan kedua orang kembar tersebut bersemedi di suatu telaga dengan cara berendam di air telaga selama 7 malam ( kungkum : bahasa jawa ), namun 1 ( satu ) diantara 2 ( dua ) orang kembar tersebut menggigil kedinginan ( Patheren : bahasa jawa)

Dengan kejadian hal tersebut diatas, maka :

1. Karena yang melakukan semedi adalah 2 ( dua ) orang yang kembar, maka pesanggrahan yang didudukinya dinamakan “ Kembaran ” dan sekarang disebut dengan nama “ Dusun Kembaran”
2. Karena ketika berendam di air telaga ada 1 ( satu ) orang yang menggigil kedinginan ( Patheren ; bahasa jawa ), maka diwilayah telaga tersebut dinamakan “ Patran “. Dan saat ini disebut dengan nama “ Dusun Patran “
3. Adapun wilayah lain disebelah timur Dusun Kembaran, dijumpai bahwa wilayah tersebut sangat melimpah sumber mata airnya, maka oleh ke 6 ( enam ) orang tersebut dianaman “ Luwihan “ dan sekarang disebut dengan nama “Dusun Luwihan“
4. Sedangkan disebelah Timur Laut dari Dusun Luwihan terdapat hutan ( Wono ; Bahasa Jawa ) yang masih jarang sekali dilalui warga, namun sangat strategis sebagai pesanggrahan pertahanan jika terdesak oleh kaum penjajah, sehingga di hutan tersebut dibuat pesanggrahan pula dengan memposisikan seorang Tokoh Agama diwilayah Desa Kembaran yang bernama “ Mbah Kriyawana “, sehingga pesanggrahan tersebut setelah mbah Kriyawana wafat, oleh generasi penerusnya dinamakan “ Wonokriyo” dan sekarang disebut dengan nama “Dusun Wonokriyo “
5. Bahwa dari ke 4 ( empat ) dusun tersebut diatas yang merupakan pusat musyawarah dalam mengatur strategi perang melawan penjajah berkedudukan di Dusun Kembaran, maka wilayah dari ke 4 ( empat ) dusun dimaksud dinamakan “ Desa Kembaran “ sampai sekarang.
6. pada tahun 1942 ( sampai Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ) Pasukan T. Ronggolawe bermarkas di Desa Kembaran dalam upaya untuk mengusir kaum penjajah yang dipimpin oleh Soedarmono, SH ( Pernah Menjabat Wakil Presiden RI dalam masa Pemerintahan Orde Baru ), sebagai cinderamata dan atau sejenisnya terhadap masyarakat Desa Kembaran yang telah bekerjasama dengan Pasukan T. Ronggolawe, bahwa beliau Bapak Soedarmono, SH. Cs dimasa menjabat Sekretaris Negara RI tepatnya pada tahun 1976 berkenan membantu hal - hal sebagai berikut :
  - a. Membangun ( mendirikan ) Kantor Kepala Desa Kembaran serta Gedung Balai Desa Kembaran dengan nama “Balai Desa Ronggolawe“
  - b. Membangun ( mendirikan ) Masjid di Dusun Luwihan Desa Kembaran.
  - c. Pengadaan jaringan lampu penerangan ( Listrik Masuk Desa Kembaran
  - d. Pembangunan Infrastruktur ( Jalan Aspal Masuk Desa Kembaran )

## 7. Makam pendiri “ Desa Kembaran “

Perlu diketahui bahwa, Pendiri Desa Kembaran adalah :

1. Kanjeng Dhipo
2. Pangeran Merto Koesoemo
3. Pangeran Merto Merto
4. Pangeran Merto Yoso
5. Pangeran Udrono
6. Pangeran Suryo Koesoemo

Dari keenam tokoh tersebut ada 2 orang yang bergelar dengan nama “ Pangeran Abu Djogopati “ dan “ Pangeran Juru “

Adapun beliau pada saat itu tetap bertahan di Desa Kembaran sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Khusus ( TPK ), dan kepada ahli warisnya telah ditinggalkan “ Tanah Juru Kunci “, dan berwasiat, kepada para ahli waris, barang siapa yang bersedia menjadi juru kunci, maka sebagai upahnya diberikan tanah juru kunci yang berkedudukan di sebelah tenggara makam.

Mengingat pada waktu itu tanah yang dijadikan Tempat Pemakaman Khusus ( TPK ) sangat luas, maka paska wafatnya beliau ( enam Tokoh Pendiri Desa Kembaran ), tempat makam dimaksud dijadikan Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) khusus warga Dusun Kembaran dan Dusun Patran.

- bahwa dari keenam tokoh tersebut, sampai saat ini yang masih dikenal oleh warga masyarakat hanya 3 ( tiga ) makam, antara lain :

1. Makam yang dikenal warga masyarakat dengan sebutan “Makam Jangpati” ( sopo sing nerjang mati : bahasa jawa ), namun gelar nama yang sesungguhnya bernama “ Pangeran Abu Djogopati”
2. Makam yang dikenal warga masyarakat dengan sebutan “ Makam Pangeran Juru “
3. Makam yang dikenal masyarakat dengan sebutan “ Makam Tumenggung Buntung”

Sejarah ini ditulis berdasarkan cerita secara turun-temurun, dari mulut ke mulut, Salah satu narasumber yang menjadi rujukan penulisan sejarah Desa Kembaran ini adalah

- a. R. Samsoe Hoedo Hardono ( Mantan Kepala Desa Kembaran )
- b. Rahmat ( Mantan Sekretaris Desa Kembaran yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Kembaran sejak 27 Januari 1993 sampai Tahun 2016)

--	--

	
R. SAMSOE H.	RAHMAT

I. Pemimpin Desa Kembaran

Kepemimpinan di Desa Kembaran sudah berjalan sejak Tahun 1828, adapun nama – nama pendiri Desa Kembaran adalah :

1. Kanjeng Dhipo
2. Pangeran Merto Koesoemo
3. Pangeran Merto Merto
4. Pangeran Merto Yoso
5. Pangeran Udrodono
6. Pangeran Suryo Koesoemo

Namun nama – nama pemimpin Desa Kembaran yang dapat diketahui sebagaimana yang tercover tersebut dibawah ini, walaupun ada 2 ( dua ) pemimpin yang belum diketahui masa kepemimpinannya.

Adapun para pemimpin Desa Kembaran sebagai berikut :

1. Masa Kepemimpinan “ TUMENGGUNG BUNTUNG ”  
( Tahun memimpin belum dapat diketahui )

Uraian sejarah	Foto
Berdasarkan cerita Bapak Hardo Upomo ( sekarang telah meninggal dunia ), bahwa pada masa kepemimpinan beliau, di era cengkeraman penjajah belanda, beliau sosok pemimpin yang sangat pemberani dan tegas, namun sayangnya beliau kurang perhitungan, bahwa ketika berangkat berperang dengan berkuda, beliau mendahului pasukan dan hanya sendirian, sehingga beliau dalam	Belum mendapatkan fotonya

<p>berperang gugur di medan laga dengan kondisi yang mengenaskan, ialah pulang ke Desa Kembaran diikat diatas kudanya tanpa kepala, sehingga sejak saat itu sampai sekarang disebut oleh masyarakat dengan nama " TUMENGGUNG BUNTUNG " dan dimakamkan di Makam Dusun Patran sampai sekarang masih ada.</p>	
--	--

## 2. Masa Kepemimpinan " TUMENGGUNG UDRADANA "

( Tahun memimpin belum dapat diketahui )

Uraian sejarah	Foto
<p>Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, bahwa " TUMENGGUNG UDRADANA " adalah pemimpin yang sangat ganas terhadap orang – orang manca negara, lebih – lebih terhadap kaum penjajah. Beliau mempunyai pedang yang sangat tajam, dan konon kabarnya jika dalam waktu 40 hari pedang dimaksud tidak digunakan membunuh penjajah / orang asing, maka pedang dimaksud selalu bergejolak ( ngorok → bahasa jawa ), dulu banyak orang china dibunuh oleh beliau dan pembunuhannya dibawa ke lokasi khusus yaitu diperempatan jalan Dusun Kembaran ( sebrang jalan Pasar Desa Kembaran ), sehingga tempat tersebut sampai sekarang dikenal oleh masyarakat disebut dengan nama pecinan.</p>	<p>Belum mendapatkan fotonya</p>

## 3. Masa Kepemimpinan " GLONDONG GABUK "

( Tahun 1907 s.d 1918 )

Uraian sejarah	Foto
<p>Masa kepemimpinan " GLONDONG GABUK " sejak Tahun 1907 sampai</p>	<p>Belum mendapatkan fotonya</p>

<p>dengan 1918, berdasarkan cerita dari mulut ke mulut di masa pemerintahannya sangat berhasil dibidang pertanian, adapun glondong gabuk sebenarnya bukan nama yang sebenarnya, karena beliau dalam hidup berumah tangga tidak dikaruniai anak, maka masyarakat pada waktu itu menyebutnya dengan nama mbah “ GLONDONG GABUK “</p>	
--	--

4. Masa Kepemimpinan “ LURAH KARTO WIJOYO “  
( Tahun 1918 s.d 1932 )

Uraian sejarah	Foto
<p>Lurah Karto Wijoyo memimpin Desa Kembaran selama 14 ( empat belas ) tahun, berdasarkan cerita para sesepuh ( saat ini sudah meninggal dunia ), bahwa beliau adalah bukan putra Desa Kembaran, namun dari wilayah Desa Lamuk.</p> <p>Hal itu terjadi karena pada waktu itu terjadi pro kontra dalam kegiatan mencalonkan kandidat, sehingga pihak yang tidak setuju atas pencalonan dari putra Desa Kembaran, mereka mencari calon walaupun berasal dari wilayah lain, al hasil bahwa “ Karto Wijoyo “ terpilih sebagai Lurah di Desa Kembaran.</p> <p>Di masa pemerintahannya terkenal seorang pemimpin yang adil dan bijak, masyarakat merasa diayomi sehingga dapat menjabat selama 14 ( empat belas ) tahun.</p>	<p>Belum mendapatkan fotonya</p>

5. Masa Kepemimpinan “ LURAH ARJO PAWIRO ”

( Tahun 1932 s.d 1939 )

Uraian sejarah	Foto
Lurah Arjo Pawiro memimpin Desa Kembaran selama 7 ( tujuh ) tahun, beliau terkenal tertib administrasi, ialah tentang administrasi pajak ( sekarang → Pajak Bumi dan Bangunan ).	

6. Masa Kepemimpinan “ LURAH H. DURAHMAN ”

( Tahun 1939 s.d 1941 )

Uraian sejarah	Foto
<p>Masa pemerintahan Lurah H. Durahman adalah di era masyarakat Desa Kembaran bergejolak akibat perebutan kepemimpinan, pada saat itu perkembangan politik berkembang sangat signifikan, masyarakat pro kontra, dapat dibayangkan setiap malam bahwa masyarakat secara berkelompok mendiskusikan tentang politik pemerintahan, sehingga hanya dapat bertahan menjabat selama 2 ( dua ) Tahun.</p> <p>Namun demikian di masa pemerintahan beliau sangat berhasil membina masyarakat di bidang Agama Islam dan berkelanjutan sampai sekarang bahwa masyarakat Desa Kembaran keseluruhan adalah sebagai pemeluk Agama Islam yang kuat.</p>	

7. Masa Kepemimpinan “ GLONDONG R. HOEDO HARDONO ”

( Tahun 1941 s.d 1980 )

Uraian sejarah	Foto
R. Hoedo Hardono adalah sosok pemimpin yang ahli tirakat, beliau	

melakukan tirakat dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan masyarakat, antara lain :

1. bidang kesehatan, untuk keselamatan / kesehatan masyarakat, pada saat pemerintahannya pernah terjadi wabah penyakit koreng yang sangat susah disembuhkan, hasil dari tirakatnya beliau mendapatkan petunjuk, bahwa obatnya adalah Telek lancung ( telek ayam yang sangat berbau ) dan dicampur dengan dogol kubis. Dan ternyata penyakit tersebut sembuh.
2. bidang ekonomi, beliau berhasil mewujudkan perekonomian masyarakat Desa Kembaran sangat berhasil, dengan mendirikan Pasar Desa Kembaran pada Tahun 1951 dan berjalan sampai sekarang, bahwa pasar kembaran pada saat itu sangatlah ramai dan menjadi pusat jual beli sembako maupun klembak.
3. melawan penjajah, bahwa Desa Kembaran dijadikan Markas utama pasukan T. Ronggolawe yang dipimpin oleh Bapak Soedarmono, SH. ( beliau pernah menjabat Wakil Presiden di masa Pemerintahan Presiden Soeharto ) sejak Tahun 1942 s.d 1945. Perlu dipaparkan bahwa, Pasukan T. Ronggolawe setiap hendak menyerang penjajah belanda senantiasa mohon petunjuk kepada mbah R. Hoedo Hardono tentang waktu yang tepat untuk menyerang, hal tersebut selalu



<p>dilakukan karena setiap penyerangan yang dilakukan tanpa izin mbah R. Hoedo Hardono, ternyata mendapat kekalahan.</p> <p>Selain hal tersebut, bahwa sebagai bukti kepeduliannya, pada Tahun 1976 beliau Bapak Soedharmono, SH berkenan membangun Desa Kembaran, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gedung Balai Desa Ronggolawe Desa Kembaran ( masih berdiri sampai sekarang );</li> <li>b. membangun Aspal Jalan masuk Desa Kembaran;</li> <li>c. Membangun jaringan listrik masuk Desa Kembaran;</li> <li>d. Membangun Masjid di Dusun Luwihan ( namun sekrang sudah di renovasi )</li> </ol>	
--	--

8. Masa Kepemimpinan “ KEPALA DESA Ir. R. DARSONO “  
( Tahun 1980 s.d 1981 )

Uraian sejarah	Foto
<p>Ir. R. Darsono adalah putra pertama dari mbah Glondong Hoedo Hardono, sebagai warga masyarakat yang berwawasan luas tentunya harus bangga dengan mengingat di era waktu itu masih sangatlah jarang warga masyarakat yang berkemauan tinggi untuk menyekolahkan putra putrinya, namun ternyata pada saat itu di Desa Kembaran dipimpin oleh seorang putra desa yang telah mempunyai gelar Ir. Di masa pemerintahannya beliau mengembangkan potensi perekonomian ialah pasar desa, sebenarnya sudah cukup dirasakan oleh masyarakat tentang</p>	

kemajuan perekonomiannya, namun sayangnya pemerintahannya hanya berjalan 1 ( satu ) tahun karena meninggal dunia.	
---	--

9. Masa Kepemimpinan “ Pj. KADES Drs. SUPANDI “  
( Tahun 1981 s.d 1984 )

Uraian sejarah	Foto
<p>Dengan wafatnya Ir. Darsono untuk pemerintahan Desa Kembaran secara otomatis kosong, sehingga pada tahun yang sama ( 1981 ) Desa Kembaran tidak melaksanakan Pilkades, melainkan pengangkatan Pj. Kepala Desa, adapun Penjabat Kepala Desa dimaksud adalah Bapak Drs. Soepandi ( Mantri Polisi Kec. Kalikajar pada waktu itu ).</p> <p>Masa pemerintahannya, beliau berhasil meningkatkan tertib administrasi, termasuk Bromo Corah pada saat itu dapat diidentifikasi dan diadministrasikan secara lengkap.</p>	

10. Masa Kepemimpinan “ KEPALA DESA R. SAMSOE HOEDO HARDONO “  
( Tahun 1985 s.d 2001 → dua periode )

Uraian sejarah	Foto
<p>Bapak R. Samsoe H. Adalah putra kedua dari mbah Glondong Hoedo Hardono, beliau memimpin Desa Kembaran dalam 2 ( dua ) periode masing-masing masa jabatannya 8 ( delapan ) tahun.</p> <p>Di era pemerintahannya sangat menonjol di bidang pembangunan infrastruktur yang kegiatan / pelaksanaan setiap pembangunannya diawali melalui proses perencanaan yang matang dalam</p>	

<p>musyawarah bersama Lembaga Masyarakat Desa ( LMD ) serta Lembaga Ktahanan Masyarakat Desa ( LKMD ).</p> <p>Sehingga di masa pemerintahannya hampir semua saluran irigasi yang sangat vital guna penunjang produktifitas pertanian berhasil dibangun dengan dipelopori oleh LKMD serta gotro / partisipasi masyarakat yang tinggi.</p>	
--	--

11. Masa Kepemimpinan “ KEPALA DESA M. ILYAS ALI “  
 ( Tahun 2001 s.d 2012 → dua periode )

Uraian sejarah	Foto
<p>Bapak M. Ilyas Ali adalah Kepala Desa termuda dalam sejarah Pemerintahan Desa Kembaran. Beliau memimpin Desa Kembaran 2 ( dua ) Periode, ialah periode pertama dalam masa jabatan 5 ( lima ) tahun, periode kedua dalam masa jabatannya 6 ( enam ) Tahun.</p> <p>Di era pemerintahannya periode pertama, beliau berhasil merenovasi total / membangun ulang Pasar Desa Kembaran, yang mana pada saat itu bangunan pasar desa telah rapuh dan sangat membahayakan para pedagang / pembeli, selain itu tentang tata kios / los boleh dibilang acak-acakan, sehingga atas keberhasilannya membangun total pasar desa Kembaran, secara otomatis tertata baik dengan maksud dan tujuan untuk lebih menarik para konsumen dalam upaya meningkatkan perekonomian hasil pertanian / sembako khususnya.</p> <p>Selain hal tersebut, bahwa dalam masa pemerintahannya berhasil didirikannya</p>	

<p>Puskesmas II Kecamatan Kalikajar yang berkedudukan di Desa Kembaran, dengan demikian pelayanan bidang kesehatan sangatlah cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Kembaran. Sehat adalah tak ternilai harganya, sehat dapat aktivitas, tidak sehat badan lemas tak dapat aktivitas.</p>	
---	--

12. Masa Kepemimpinan “ KEPALA DESA MUHOTIP “  
( Tahun 2012 s.d 19 Februari 2019 )

Uraian sejarah	Foto
<p>Bapak Muhotip adalah pemimpin Pemerintah Desa Kembaran terhitung sejak Bulan Maret 2012 sampai dengan 19 Februari 2019.</p> <p>Dalam kurun waktu 6 ( Enam) tahun pemerintahannya, beliau lebih memprioritaskan tentang peningkatan administrasi umum, pada prinsip dan dasarnya bahwa masyarakat harus dilayani secara prima guna terpenuhinya segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat ( terutama surat – menyurat ), semua perangkat desa secara umum dituntut dapat mengoperasikan komputer guna peningkatan pelayanan publik, sehingga secara otomatis sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan secara bertahap dipenuhinya, sarpras kantor dimaksud antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 2 ( dua ) unit PC / komputer khusus untuk pelayanan ;</li> <li>2. Terdapat 5 ( lima ) Laptop guna pemenuhan peningkatan kapasitas</li> </ol>	

<p>aparatur pemerintah desa maupun lembaga BPD dan PKK.</p> <p>3. Adanya CCTV di kantor Desa dan juga peningkatan di bidang pelayanan administrasi.</p> <p>Selain hal tersebut diatas, bahwa bidang infrastruktur beliau memprioritaskan pembangunan dasar masyarakat, ialah pembangunan betonisasi / pavingisasi jalan lingkungan dusun yang bersumber dari dana transfer desa, secara bertahap semua jalan lingkungan dusun akan dibangun guna peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.</p> <p>Adapun pembangunan DAM maupun saluran irigasi, beliau mengagendakan dengan langkah mengajukan proposal, baik kepada pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.</p> <p>Program sanitasi berbasis air minum bisa terlaksana pada tahun 2017 dan bisa mendirikan kantor sekretariat BP-SPAMS Ronggolawe Sehat.</p> <p>Disektor ekonomi masyarakat terbentuk BUMDes yang diberi nama Bumdes Ronggolawe yang mempunyai usaha Simpan Pinjam dan juga pengelolaan Pasar Kembaran.</p>	
---	--

13. Masa Kepemimpinan “ PJ. KEPALA DESA SLAMET,S.IP”  
( 19 Februari 2019 s.d 16 Desember 2019 )

Uraian sejarah	Foto
<p>Bapak Slamet,S.IP merupakan Kasi Ekbang di Kecamatan Kalikajar yang mendapat tugas tambahan sebagai PJ. Kepala Desa Kembaran pada tahun 2019.</p>	

<p>Pada masa kepemimpinan beliau berhasil menertibkan kaitan administrasi tanah kas desa yang merupakan sumber Pendapatan Asli Desa.</p> <p>Dalam sector kemiskinan beliau mampu memperoleh program Bansos RTLH bagi masyarakat yang rumahnya layak untuk dipugar.</p> <p>Beliau juga sukses dalam melaksanakan Pilkades serentak pada tahun 2019 yang berjalan dengan aman, lancar dan damai.</p> <p>Dan juga memprakarsai program PTSL yang akan dilaksanakan tahun 2020.</p>	
---	--

14. Masa Kepemimpinan “ KEPALA DESA AGUNG HERMAWAN”  
( Tanggal 16 Desember 2019 s.d Sekarang )

Uraian sejarah	Foto
<p>Bapak Agung Hermawan merupakan Kades yang terpilih dari 2 tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak, pertama tahapan ujian dan yang kedua tahapan pemilihan. Dilantik pada tanggal 16 Desember 2019, beliau lebih memprioritaskan tentang perekonomian masyarakat khususnya di Pasar Desa Kembaran.</p> <p>Dan pada tahun 2020 dilaksanakan program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) di desa Kembaran yang diikuti oleh 900 pendaftar/bidang tanah.</p> <p>Dan juga pada tahun 2020 beliau mampu menjalankan tugas dengan baik kaitan pencegahan dan penanganan virus covid-19 yang merupakan pandemi di seluruh dunia.</p>	

<p>Adapun kegiatan Pembangunan fisik beliau lebih memprioritaskan pembangunan jalan usaha tani, betonisasi lingkungan dan juga Gedung posyandu. Adapun kegiatan Kesehatan beliau berencana mengadakan Ambulance desa, dan diharapkan bisa terwujud pada masa kepemimpinan beliau. Dan juga agenda lainnya sebagaimana yang tercover dalam lampiran RPJM Desa Kembaran 2020-2025.</p>	
--	--

## L. ASET KEUANGAN DESA

### A. Aset Desa (Kekayaan dan Potensi Desa)

Aset desa adalah segala sesuatu yang berada didesa dengan status kepemilikan oleh warga, kelompok/organisasi maupun yang dimiliki oleh desa. Pada proses menemuknenali asset desa, tim pembaharu desa (TPD) dengan program perencanaan apresiatif desanya mengklasifikasikan asset dan potensi desa menjadi 7 jenis, yakni aset sumberdaya alam, aset sumberdaya manusia, aset social, aset fisik, aset finansial/keuangan, aset kelembagaan serta aset spiritual dan budaya.

#### Matrix 2.1

#### Pemetaan Asset Desa

Membuat betah tinggal di Desa Kembaran

1. Desa Kembaran aman, tenteram dan damai senantiasa.
2. Tercukupinya air bersih yang melimpah.
3. Terbukanya bidang perdagangan yang cukup luas karena adanya pasar
4. Mudahnya bercocok tanam karena tersedianya air yang melimpah.
5. Kebutuhan sembako mudah dijangku dan murah tersedia di pasar Desa Kembaran.
6. Pelayanan surat menyurat cepat, mudah, murah (gratis) dan dilayani setiap jam kerja.

7. Pembangunan infrastruktur diperhatikan dan dibangun secara bertahap dengan asas keadilan luas wilayah jumlah penduduk.
8. Dengan adanya Puskesmas II di Desa Kembaran, Pelayanan kesehatan sangat mudah dan dekat.
9. Lapangan olahraga sepak bola tersedia dan sudah cukup bagus.
10. Gedung olahraga bulu tangkis tersedia dan tanpa biaya ( gratis ).
11. Jiwa sosial masyarakat sangat tinggi.
12. Masyarakat ramah tamah.
13. Kegiatan keagamaan berjalan dengan lancar penuh keakraban.
14. Tersedianya sekolah pendidikan usia dini ( Paud Bhina Sakti I, III, V dan TK Pertiwi, TK Khabibarohmah ), SDN 1, SDN 2, SDN 3 serta SMPN 3 Kalikajar yang berkedudukan di Desa Kembaran.

#### Cerita Sukses Desa Kembaran

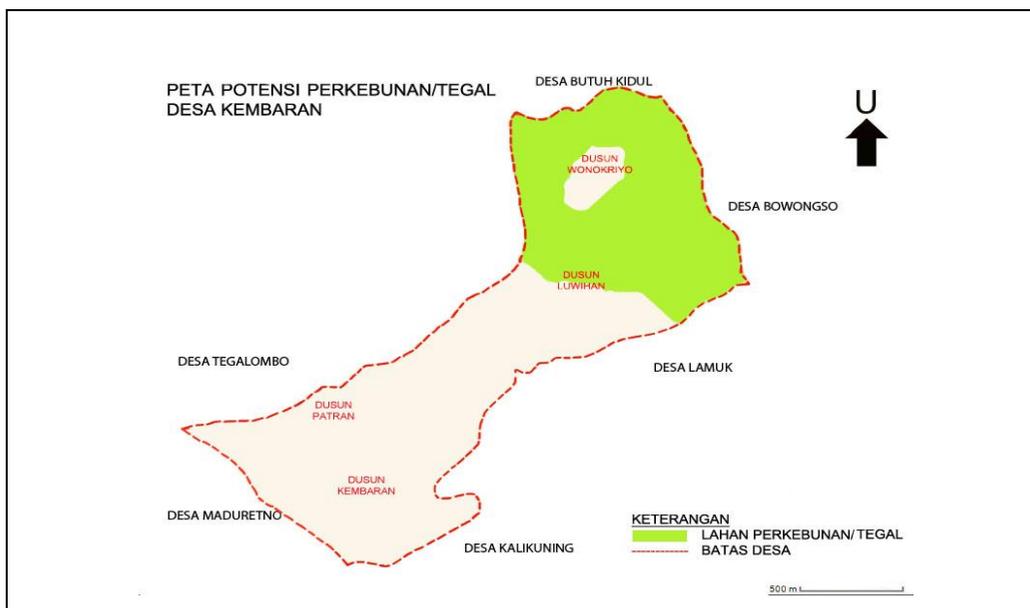
1. Mewujudkan iklim sejuk stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Terbentuknya Lembaga Desa dan Kelembagaan Desa sebagai mitra yang dapat bekerjasama seiring sejalan dengan baik.
4. Terwujudnya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Mewujudkan keharmonisan masyarakat dalam kegiatan sehari – hari.
6. Mewujudkan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan berdirinya Puskesmas II Kalikajar yang berkedudukan di Desa Kembaran.
7. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
8. Mewujudkan tersedianya pendidikan anak usia dini ( Paud & TK ), Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
9. Terlaksananya pembangunan infrastruktur yang akuntabilitas dan tepat sasaran.
10. Mewujudkan tersedianya sembako yang murah dan dekat dengan berdirinya pasar Desa Kembaran.
11. Terbentuknya UED – SP Adil Makmur Pemerintah Desa Kembaran yang dapat berkembang baik dengan sasaran diprioritaskan kepada pedagang kacil tanpa agunan.

## Peta Sketsa Desa

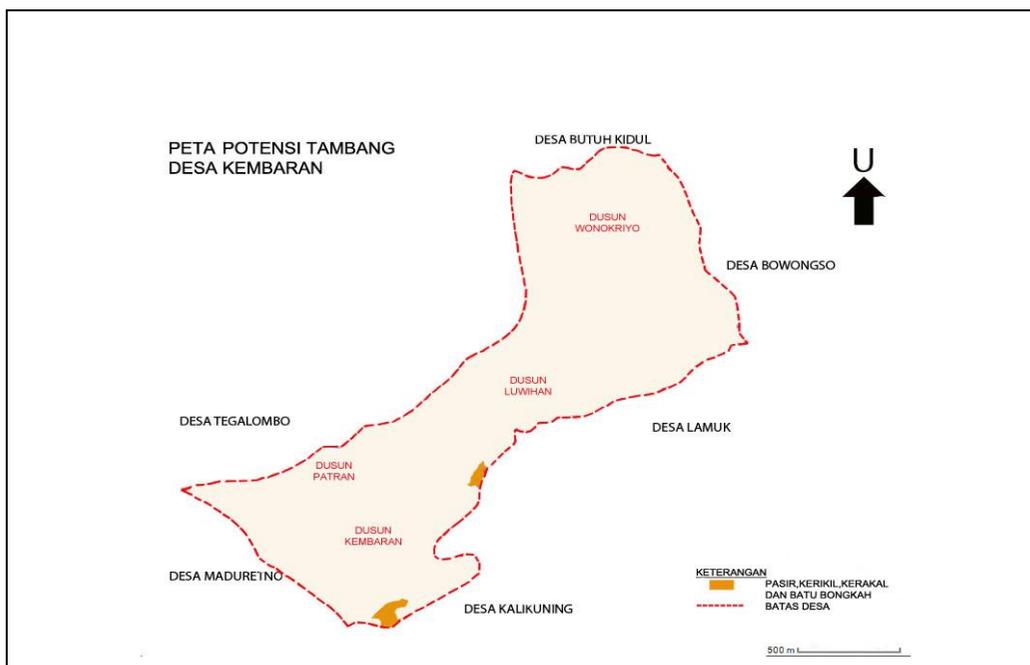
Peta wilayah Desa sederhana yang menggambarkan tentang potret Desa yang merekam informasi Sumberdaya alam Sumberdaya manusia dan Data pendukung seperti batas Desa, batas dusunan, fasilitas umum ( jalan / jembatan ), fasilitas pendidikan, dll.

Matrix 2.2  
Peta sketsa Desa

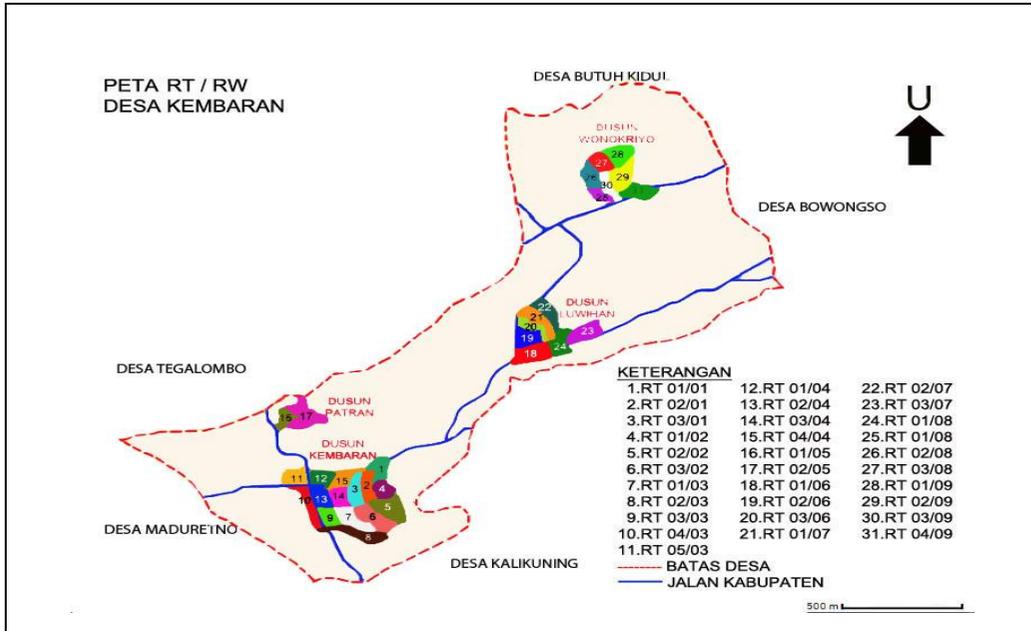
Peta 1.



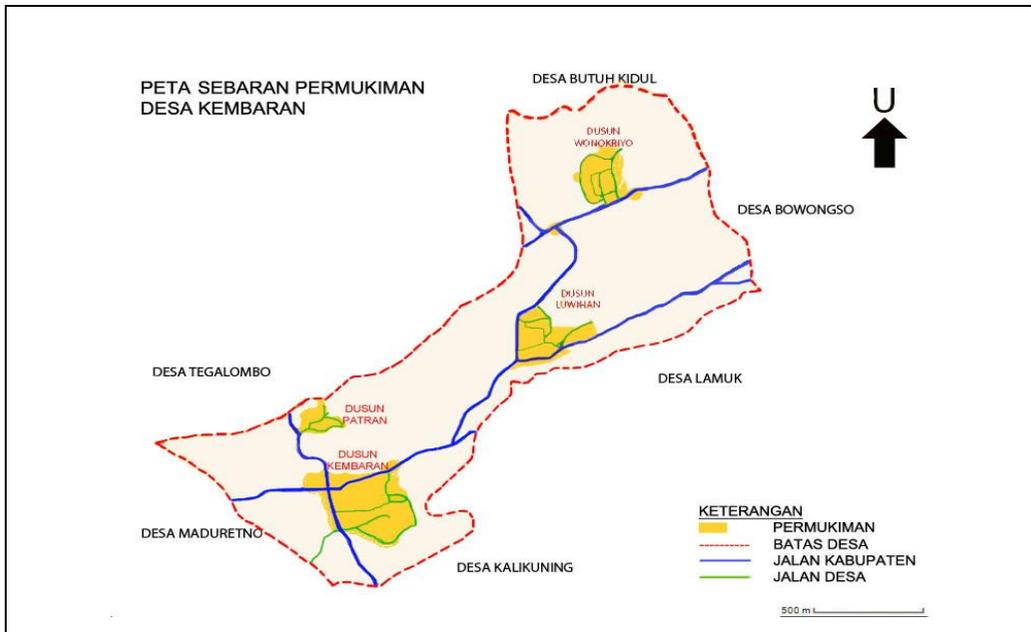
Peta 2.



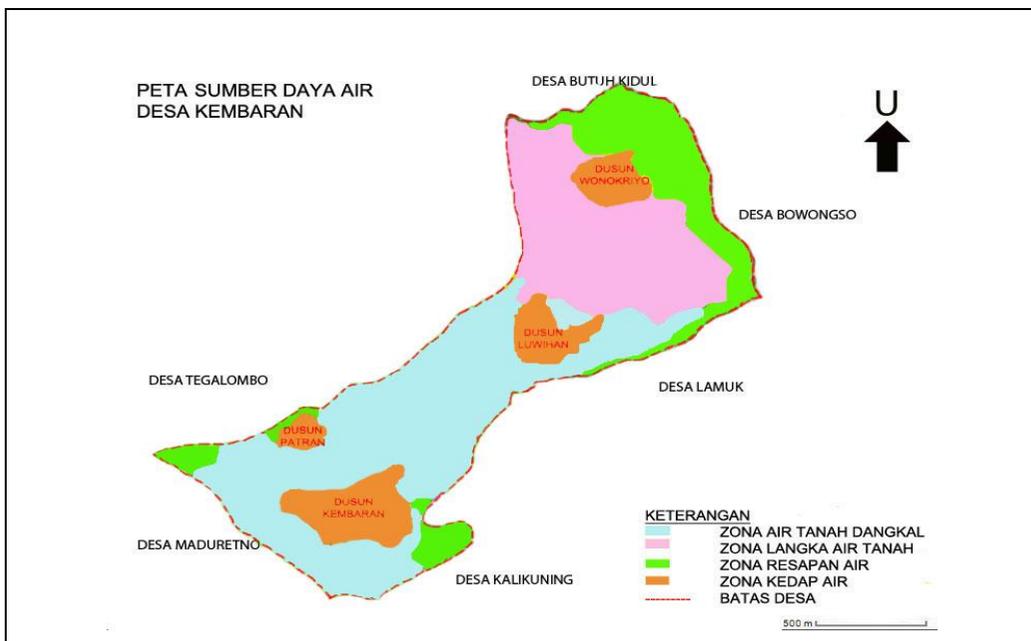
Peta 3.



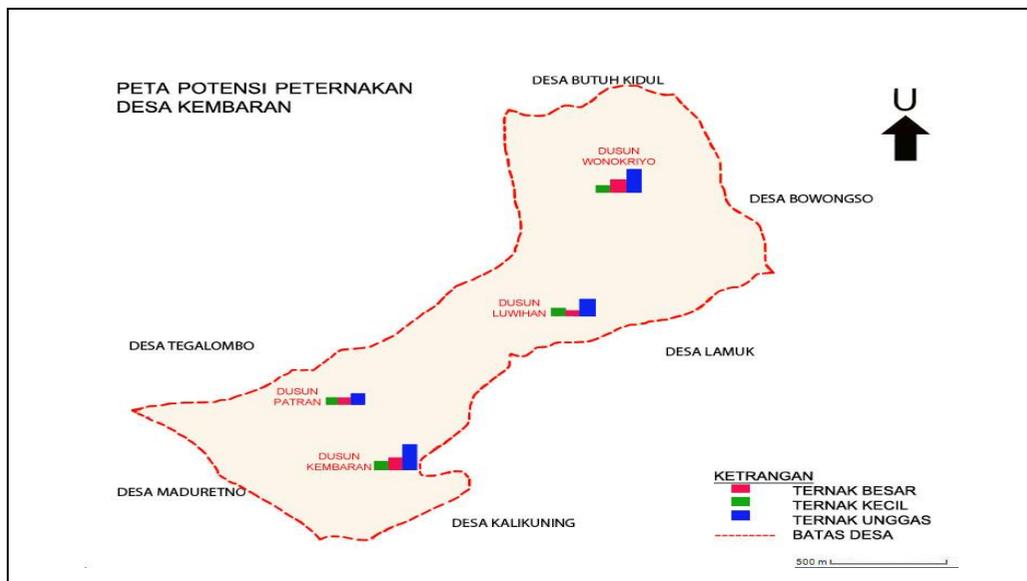
Peta 4.



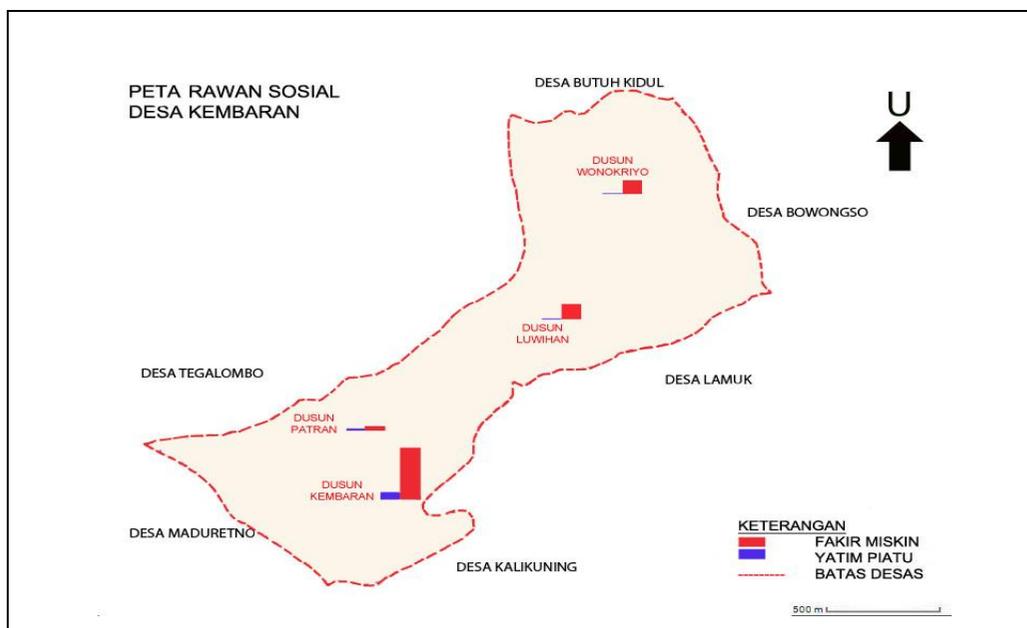
Peta 5.



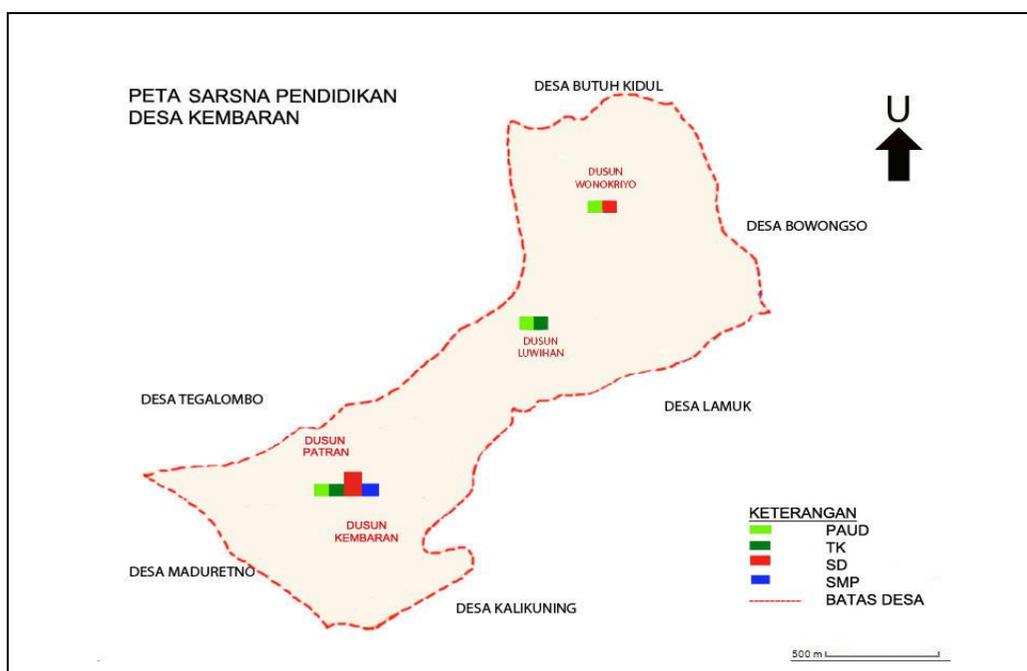
Peta 6.



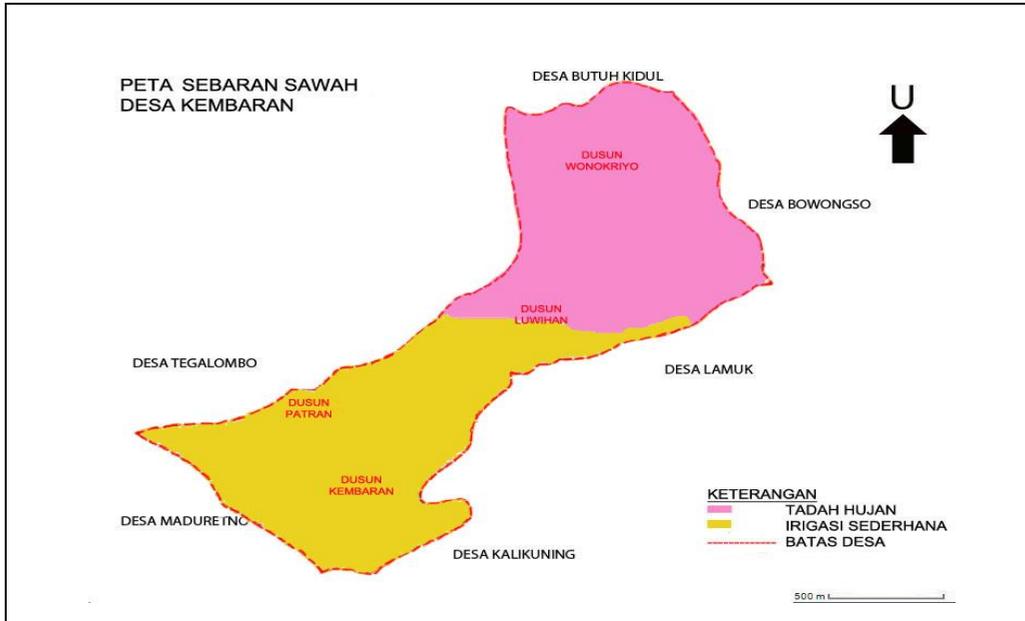
Peta 7.



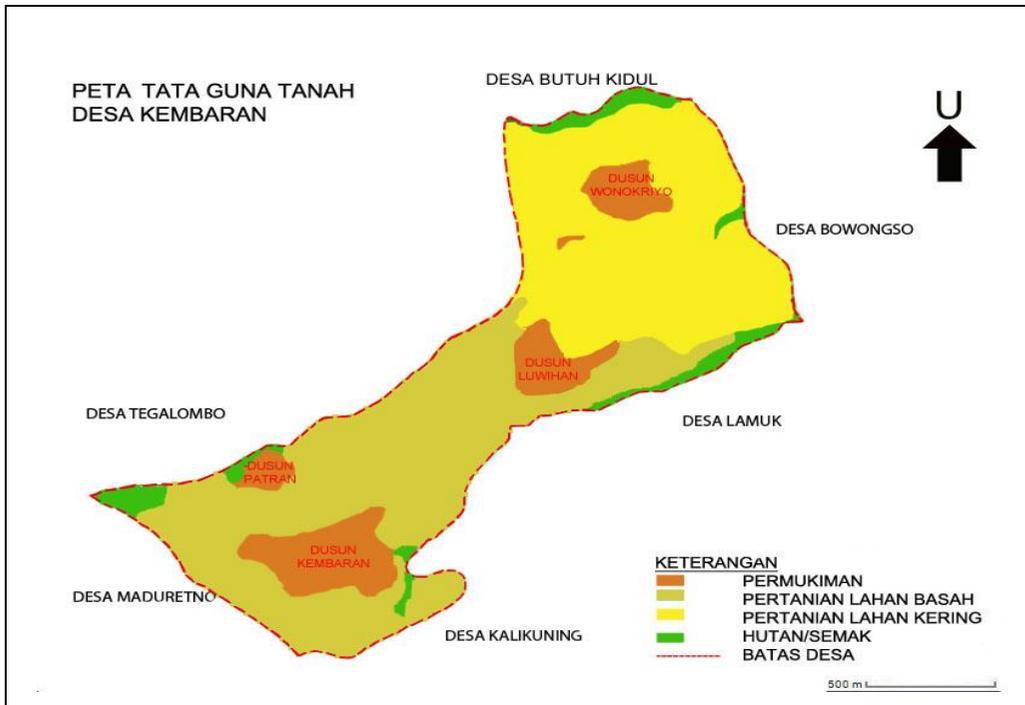
Peta 8.



Peta 9.



Peta 10.



Desa Bersama Tim Pembaharu Desa melalui perencanaan apresiatif desa berhasil mengidentifikasi aset berdasarkan letak dan kepemilikannya sebagai berikut :

Matrix 2.3

Identifikasi Aset Berdasarkan Letak dan Kepemilikan

Jenis Asset	Nama Asset	Letak	Kepemilikan		
			War ga	Masyara kat / Kelomp ok / Organisi asi	De sa
Sumber Daya Alam	Tanah Sawah	Dusun Kembaran, Dusun Patran, Dusun Luwihan, Dusun Wonokriyo	√		
	Tanah Kering	Dusun Luwihan dan Dusun Wonokriyo	√		
	Perikanan	Dusun Kembaran, Dusun Patran, Dusun Luwihan, Dusun Wonokriyo	√		
	Sumber Mata Air	Dusun Kembaran, Dusun Patran, Dusun Luwihan, Dusun Wonokriyo	√		
	Sungai Siceger	Dusun Kembaran dan Dusun Luwihan			√

	Sungai Kelben	Dusun Patran			√
	Pohon penghijauan	Dusun Kembaran, Dusun Patran, Dusun Luwihan, Dusun Wonokriyo			√
Kelembagaan	Pendidikan :				
	a. Paud Bhina Sakti I	1. Dusun			
	b. Paud Bhina Sakti III	Kembaran			
	c. Paud Bhina Sakti V	2. Dusun Patran			
	d. TK Pertiwi	3. Dusun			
e. TK RA. Khabibarohmah	Wonokriyo				
f. SDN 1	4. Dusun				
g. SDN 2	Kembaran				
h. SDN 3	5. Dusun				
i. SMPN 3	Luwihan	√	√	√	
	6. Dusun				
	Kembaran				
	7. Dusun				
	Kembaran				
	8. Dusun				
	Wonokriyo				
	9. Dusun				
	Kembaran				
	Keagamaan				
	1. Ponpes	1. Dusun			
	2. TPQ	Kembaran RT.			
	3. Kelompok Fatayat & Muslimat	01 RW. 04			
	4. Majelis Taklim	2. Semua Dusun	√	√	√
	5. Kelompok Tahlilan	3. Semua Dusun			
	6. Kelompok Yasinan	4. Semua Dusun			
		5. Semua Dusun			
		6. Semua Dusun			
	Kesehatan				

	1. Puskesmas 2. Posyandu Balita 3. Posyandu Lansia	1. Dusun Kembaran 2. Semua Dusun 3. Semua Dusun	√	√	√
	Kelompok Tani				
	1. Poktan Kembar Jaya 2. Poktan Subur 3. Poktan Linuwih 4. Poktan Wonokriyo 5. Gapoktan Suka Maju	1. Dusun Kembaran 2. Dusun Patran 3. Dusun Luwihan 4. Dusun Wonokriyo 5. Desa Kembaran	√	√	√
	PKK	Semua Dusun	√	√	√
	BKB	Semua Dusun	√	√	√
	SATGAS BENCANA	Semua Dusun	√	√	√
	BANSER	Semua Dusun	√	√	√
	LINMAS	Semua Dusun	√	√	√
	KARANG TARUNA	Semua Dusun	√	√	√
	LPMD	Semua Dusun	√	√	√
	BPD	Semua Dusun	√	√	√
	RT	Semua Dusun	√	√	√
	RW	Semua Dusun	√	√	√
	PERANGKAT DESA	Semua Dusun	√	√	√
Sosial	Sosial Keagamaan				
	1. Fatayat 2. Muslimat 3. Tahlilan 4. Yasinan 5. Mujahadah 6. Istighosah 7. Ta'mir masjid 8. Sholawat Albarjanji	Semua RT	√	√	√
	Sosial Kemasyarakatan				
	1. Gugur gunung	Semua RT	√	√	√

	2. Gotro 3. Kerja Bakti 4. Sambatan 5.				
	Sosial Kepemudaan				
	4. Irmis 5. Kumpulan Pemuda	Semua Dusun	√	√	√
	Kesenian & Olahraga				
	15. Kuda lumping	1. Dusun		√	
	16. Ayun-ayun	Wonokriyo		√	
	17. Rebana	2. semua Dusun		√	
	18. Drum Band	3. Dusun			
	19. Rewa Rewo	Kembaran,		√	
	20. Tek-Tek / Angklung	Luwihan, Wonokriyo.		√	
	21. Angguk	4. Dusun		√	
	22. Sepak bola	Kembaran		√	
	23. Bulu tangkis	5. Dusun		√	
	24. Pingpong	Kembaran			
	25. voley	6. Dusun Kembaran		√	
		7. Dusun Wonokriyo		√	
		8. Semua Dusun			
		9. Dusun Kembaran, Dusun Patran			
		10. Dusun Kembaran			
		11. Dusun Kembaran, Dusun Luwihan			
Keuangan	Kerajinan besi timpa	Dusun Kembaran	√		
	Makanan olahan	Semua Dusun	√		

	Tahu	Dusun Kembaran	√		
	Tempe	Dusun Kembaran	√		
	Aneka kue	Semua Dusun	√		
	Bengkel motor	Dusun Kembaran, Luwihan, Wonokriyo	√		
	Simpin	Semua Dusun		√	
	Penggilingan padi	Dusun Kembaran, Luwihan, Wonokriyo	√		
	Tratak	Semua Dusun		√	
	Sound System	Dusun Kembaran	√		
	Drum Band	Dusun Kembaran		√	
	Kuda Lumping	Dusun Wonokriyo		√	
	Ayun-ayun	Semua Dusun		√	
	Rebana	Dusun Kembaran, Dusun Wonokriyo		√	
	Rewa rewo	Dusun Kembaran		√	
	Tek-tek	Dusun Kembaran		√	
Sumber Daya Manusia	Buruh Tani	Semua dusun		√	
	Petani Sendiri	Semua dusun	√		
	Kontruksi	Dusun Kembaran	√		
	Karyawan swasta	Semua Dusun	√		

Karyawan BUMN	Dusun Kembaran	√		
Tukang cukur	Semua dusun	√		
Tukang listrik	Dusun Patran, Dusun Kembaran	√		
Tukang batu	Semua Dusun	√		
Tukang kayu	Semua Dusun	√		
Tukang las	Dusun Kembaran	√		
Tukag jahit	Semua Dusun	√		
Mekanik	Semua Dusun	√		
Ustadz/mubaligh	Semua Dusun	√		
Guru	Semua Dusun		√	
Bidan	Dusun Kembaran		√	
Penyiar radio	Dusun Kembaran, Dusun Luwihan		√	
Pelaut	Dusun Kembaran	√		
Wiraswasta	Semua Dusun	√		
Peternak Unggas	Semua Dusun	√		
Penggalian	Dusun Kembaran, Dusun Luwihan	√		
Industri olahan	Semua Dusun	√		
Perangkat Desa	Semua Dusun			√
Perdagangan	Semua Dusun	√	√	
Transportasi / sopir	Semua Dusun	√	√	
PNS / Honor daerah	Semua Dusun		√	√
TNI	Dusun Kembaran		√	
POLRI	Dusun Luwihan, Dusun Kembaran		√	

	Pensiunan	Dusun Kembaran, Dusun Luwihan	√		
	Pembantu rumah tangga	Semua Dusun	√		
	Buruh harian lepas	Semua Dusun	√		
	Tukang sol sepatu	Dusun patran	√		
	Pengusaha kecil dan menengah	Semua Dusun	√		
	Dukun kampung terlatih	Dusun Kembaran, Dusun Luwihan, Dusun Wonokriyo	√		
	peternak	Semua Dusun	√		
	Buruh migran laki-laki	Semua Dusun	√		
	Buruh migran perempuan	Semua Dusun	√		
	Ojek	Semua Dusun	√		
	Nelayan	Dusun Kembaran	√		
	Notaris	Dusun Kembaran		√	
Spiritual	PHBI				
Budaya	1. Peringatan Maulid Nabi SAW 2. Peringatan Isro' dan Mi'roj 3. Peringatan Nuzulul Qur'an 4. Peringatan 10 Muharam 5. Nisfu sa'ban 6. khoul Ruwahan	1. semua dusun 2. semua dusun 3. Semua Dusun 4. Semua Dusun 5. Semua Dusun 6. Semua Dusun	√	√	√
	Selamatan Dusun				
	Tahun baru Hijriyah	Semua Dusun	√	√	√
	Ritual Islami				
	1. Tahlilan	Semua Dusun	√	√	√

2. Yasinan 3. Istighozah				
Selamatan kandungan (mbobot)				
1. Ngapati ( 4 bulan ) 2. Mitoni ( 7 bulan ) 3. Syukuran Kelahiran 4. Walimatul Ismi & motong rambut 5. Bancakan ( selapan bayi lahir ) 6. Medun lemah ( pengenalan perdana diturunkan ditanah, usia 5-6 bulan ) 7. Aqiqoh	Semua Dusun	√	√	√
Ritual Kematian ( jangka wkt mati )				
1. Nusur tanah ( 1 hari ) 2. Nlung dina / Tahlilan ( 3 hari ) 3. Metung dina / Tahlilan (7 hari) 4. Tahlilan (40 hari) 5. Tahlilan (100 hari) 6. Tahlilan (1 tahun) 7. Tahlilan (2 tahun ) 8. Tahlilan ( 1000 hari ) 9. Khoul	Semua Dusun	√	√	√
Tradisi Sunatan				
1. Selamatan malam H 2. Sunatan 3. Syukuran ( Hotmil Qur'an )	Semua Dusun	√	√	√
Tradisi Pernikahan				
1. Lamaran	Semua Dusun	√	√	√

2. Maskawin 3. Ijab Qobul 4. Resepsi ( Syukuran / kenduri ) 5. Balik bantal (Temu besan & Klrga)				
Ritual mendirikan Rumah				
1. Selamatan Mondasi 2. Mayu ( pasang atap ) 3. Selamatan memasuki rumah	Semua Dusun	√	√	√
Gugur Gunung				
1. Bersih-bersih saluran irigasi 2. Bersih-bersih makam/kl makam 3. Bersih-bersih jalan/tepi jalan 4. Pembangunan Masjid/Mushola 5. Pembangunan Siskamling 6. Pemb. sarpras sosial 7. Pemakaman Jenazah 8. Mayu umah (pasang atap rumah) 9. PHBI 10. Khajatan warga (sambatan)	Semua Dusun	√	√	√

## B. Potensi Keuangan Desa

Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa, sebagai berikut :

### 1. Rencana Pendapatan dan Belanja Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
REKENING		(Rp.)	
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>	1,721,033,000.00	
4.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	27,000,000.00	
4.1.2	<i>Hasil Aset</i>	27,000,000.00	
4.2	<b>Transfer</b>	1,688,033,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	1,016,909,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	21,090,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	595,034,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	55,000,000.00	
4.3	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	6,000,000.00	
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	6,000,000.00	
4.3.7	<i>Lain-lain pendapatan Desa yang sah</i>		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,721,033,000.00</b>	
5	<b>BELANJA</b>	1,746,033,000.00	
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	607,894,000.00	
1.1	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	566,134,000.00	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	54,000,000.00	
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	350,400,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	344,400,000.00	
1.1.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,000,000.00	
1.1.03	<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	40,796,160.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	40,796,160.00	

1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	39,727,840.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	39,727,840.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	28,200,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	28,200,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	5,010,000.00	
1.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,010,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48,000,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	48,000,000.00	
1.2	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	15,100,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	14,500,000.00	
1.2.01.5.3	<i>Belanja Modal</i>	14,500,000.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	600,000.00	
1.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	600,000.00	
1.3	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	5,580,000.00	
1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,030,000.00	
1.3.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,030,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3,550,000.00	
1.3.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,550,000.00	
1.4	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	16,630,000.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	3,600,000.00	
1.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,600,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	3,900,000.00	

1.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,900,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	5,360,000.00	
1.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,360,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1,220,000.00	
1.4.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,220,000.00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	900,000.00	
1.4.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	900,000.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	400,000.00	
1.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	400,000.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,250,000.00	
1.4.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,250,000.00	
1.5	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	4,450,000.00	
1.5.05	Penyuluhan Pertanahan	3,950,000.00	
1.5.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,950,000.00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500,000.00	
1.5.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	500,000.00	
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	1,270,809,000.00	
2.1	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	146,750,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	74,550,000.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	74,550,000.00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	30,000,000.00	
2.1.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30,000,000.00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	3,400,000.00	
2.1.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,400,000.00	

2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	5,000,000.00	
2.1.08.5.3	<i>Belanja Modal</i>	5,000,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	13,800,000.00	
2.1.10.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13,800,000.00	
2.1.90	Fasilitasi pelaksanaan Kejar Paket B/C	20,000,000.00	
2.1.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20,000,000.00	
2.2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	274,924,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	5,000,000.00	
2.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	91,444,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	84,944,000.00	
2.2.02.5.3	<i>Belanja Modal</i>	6,500,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	13,650,000.00	
2.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13,650,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7,500,000.00	
2.2.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,500,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	127,500,000.00	
2.2.09.5.3	<i>Belanja Modal</i>	127,500,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	11,950,000.00	
2.2.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11,950,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	8,830,000.00	
2.2.91.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,830,000.00	

2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	9,050,000.00	
2.2.93.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,050,000.00	
2.2.93.5.3	<i>Belanja Modal</i>	7,000,000.00	
2.3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	460,335,000.00	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	5,000,000.00	
2.3.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	158,000,000.00	
2.3.10.5.3	<i>Belanja Modal</i>	158,000,000.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	110,000,000.00	
2.3.12.5.3	<i>Belanja Modal</i>	110,000,000.00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	150,000,000.00	
2.3.15.5.3	<i>Belanja Modal</i>	150,000,000.00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	37,335,000.00	
2.3.20.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
2.3.20.5.3	<i>Belanja Modal</i>	35,335,000.00	
2.4	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	359,300,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	30,000,000.00	
2.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30,000,000.00	
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	104,000,000.00	
2.4.12.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,000,000.00	
2.4.12.5.3	<i>Belanja Modal</i>	100,000,000.00	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di luar prasarana jalan) **	40,000,000.00	
2.4.13.5.3	<i>Belanja Modal</i>	40,000,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	133,000,000.00	

2.4.14.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	98,000,000.00	
2.4.14.5.3	<i>Belanja Modal</i>	35,000,000.00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	4,300,000.00	
2.4.15.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,300,000.00	
2.4.90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	18,000,000.00	
2.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18,000,000.00	
2.4.91	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/ Pusat)	30,000,000.00	
2.4.91.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30,000,000.00	
2.5	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	4,000,000.00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	4,000,000.00	
2.5.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,000,000.00	
2.6	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	20,500,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	2,500,000.00	
2.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,500,000.00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18,000,000.00	
2.6.03.5.3	<i>Belanja Modal</i>	18,000,000.00	
2.8	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	5,000,000.00	
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5,000,000.00	
2.8.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	109,500,000.00	
3.1	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	30,357,000.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	7,750,000.00	
3.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,750,000.00	

3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	680,000.00	
3.1.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	680,000.00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	6,417,000.00	
3.1.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,417,000.00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15,510,000.00	
3.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15,510,000.00	
3.2	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	26,090,000.00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	5,000,000.00	
3.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	21,090,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21,090,000.00	
3.3	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	14,433,000.00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	1,000,000.00	
3.3.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,000,000.00	
3.3.02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	1,400,000.00	
3.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,400,000.00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	2,023,000.00	
3.3.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,023,000.00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	7,510,000.00	
3.3.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,510,000.00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2,500,000.00	

3.3.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,500,000.00	
3.4	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	38,620,000.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,720,000.00	
3.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,720,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	29,900,000.00	
3.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29,900,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	72,335,817.00	
4.2	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	11,250,000.00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	11,250,000.00	
4.2.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,250,000.00	
4.2.05.5.3	<i>Belanja Modal</i>	4,000,000.00	
4.3	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	18,900,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	11,900,000.00	
4.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,900,000.00	
4.3.02.5.3	<i>Belanja Modal</i>	8,000,000.00	
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	7,000,000.00	
4.3.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,000,000.00	
4.4	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	29,260,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	21,885,000.00	
4.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21,885,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	7,375,000.00	
4.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,375,000.00	
4.5	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	3,930,817.00	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	3,930,817.00	

4.5.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,930,817.00	
4.6	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	2,775,000.00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	2,775,000.00	
4.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,775,000.00	
4.7	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	6,220,000.00	
4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	6,220,000.00	
4.7.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,220,000.00	
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	10,000,000.00	
5.1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	10,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	
5.1.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	10,000,000.00	
5.3	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>		
5.3.00	Keadaan Mendesak		
5.3.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>		
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,746,033,000.00</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(25.000.000.00)</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	25.000.000.00	
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	45.000.0000,-	
6.1.1	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	45.000.0000,-	
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	20,000,000.00	
6.2.2	<i>Penyertaan Modal Desa</i>	20,000,000.00	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>25.000.000.00</b>	

### BAB III

## APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA

#### A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, periode saat ini ( 2020 s.d 2025 ) dijabat oleh Bapak Agung Hermawan berkedudukan sebagai Kepala Desa Kembaran. Dalam kurun waktu 6 ( Enam) tahun terakhir ini, dalam hal ini khususnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan, cukup jelas terlihat kepemimpinannya kearah yang lebih baik.

Adapun maksud dari pada kearah yang lebih baik disini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah desa, antara lain ;
  - a. Melaksanakan dinas setiap hari dalam 5 ( lima ) hari kerja ;
  - b. Penerapan daftar hadir dinas yang ditandatangani / paraf, dan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya bahwa absensi aparatur pemerintah desa rekapitulasinya di laporkan ke Kecamatan Kalikajar ;
  - c. Secara umum semua perangkat desa dituntut untuk mampu / bisa operasikan komputer ;
  - d. Bagi aparatur pemerintah desa yang potensi dan belum menguasai operasikan komputer, secara bertahap diadakan pelatihan komputer ;
  - e. Jumlah perangkat desa saat ini adalah 13 ( tiga belas ) orang, adapun yang telah mampu mengoperasikan komputer berjumlah 9 ( sembilan ) orang ;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik ;
  - a. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang sudah cukup memadai seperti Laptop dan PC, ialah dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada publik ;
  - b. Surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat, dilayani secara maksimal dalam 5 ( lima ) hari kerja secara gratis / tanpa ada pungutan apapun ;
  - c. Kebiasaan lama yang masih sering terjadi tentang pelayanan publik di rumah ( diluar jam kerja ), sudah tidak terjadi lagi, hal tersebut dilakukan dengan mengingat bahwa setiap surat yang dikeluarkan harus ada registrasi / nomor surat yang harus dapat dipertanggungjawabkan ;
  - d. Pelayanan surat menyurat secara umum dilayani secara elektronik / komputer ;
  - e. Pelayanan surat menyurat kepada publik dapat dilayani dengan cepat dan akurat, karena tersedianya aplikasi Simdes dan Sinta Paten ;

- f. Pemerintah desa Kembaran selain melaksanakan kegiatan / tugas sebagai pelayan masyarakat, juga melakukan perbaikan administrasi pelayanan umum, keuangan dan pembangunan ;
3. Meningkatnya kerjasama secara positif antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan / Organisasi Tingkat Desa :

Terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 secara otomatis tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa akan disesuaikan dengan ketentuan, hal tersebut akan segera dilakukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa Kembaran dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan ( Menunggu Peraturan Daerah tentang SOTK terbit ), Keberadaan anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, sangat berperan dalam menunjang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Jumlah anggota BPD Desa Kembaran adalah 9 ( sembilan ) orang dan berperan aktif dalam menunjang semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh Lembaga Desa dimaksud antara lain :

- a. BPD merencanakan dan menetapkan bersama Pemerintah Desa tentang Penggunaan Dana Transfer Desa ;
- b. BPD merencanakan dan menetapkan bersama Pemerintah Desa tentang RKP Desa ;
- c. BPD merencanakan dan menetapkan bersama Pemerintah Desa tentang RPJM Desa 2020-2025 ;
- d. selain hal tersebut, bahwa BPD senantiasa melakukan kegiatan secara rutin setiap 36 ( tiga puluh enam ) hari sekali, hal tersebut secara pasti diketahui oleh pihak pemerintah desa dalam hal melakukan kegiatan evaluasi kegiatan pemerintah desa, dan hasil daripada kegiatan selapanan dimaksud akan dibawa dalam rapat – rapat pemerintahan desa.

Selain hal tersebut diatas, bahwa Pemerintahan Desa Kembaran tidak akan dapat berjalan apabila tanpa dukungan dan peran serta dari pada kelembagaan desa, adapun kelembagaan desa dimaksud antara lain :

1. Rukun Warga ( RW )
2. Rukun Tetangga ( RT )

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD )
4. Perlindungan Masyarakat ( Linmas )
5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
6. Karang Taruna
7. Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan ) Suka Maju
8. Kader Posyandu
9. Banser
10. dan Lembaga lainnya.

Hal tersebut diatas sepenuhnya merupakan upaya desa dalam hal untuk terwujudnya Visi Kepala Desa “ Membangun Bersama Masyarakat “ sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa selama ini Desa hanyalah dijadikan sebagai obyek pembangunan, maka sesuai amanat Undang-Undang bahwa Pemerintahan Desa Kembaran bertekad mewujudkan masyarakat Desa Kembaran diposisikan sebagai subyek pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera sesuai yang diharapkan oleh semua pihak.

Adapun tantangannya adalah SDM Aparatur Pemerintah Desa dalam kapasitasnya tidak merata, ada beberapa aparat desa yang sama sekali tidak dapat mengoperasikan komputer dan bahkan ada yang sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan surat menyurat ( karena keterbatasan kemampuan ), selain hal tersebut tentang aplikasi Sinta Paten yang merupakan program dari Pemerintah Kabupaten sampai saat ini belum dapat dioperasikan secara menyeluruh ( hanya sebatas pelayanan umum saja ).

## B. Bidang Pembangunan

RPJM Desa Kembaran transisi ( 2020 s.d 2025 ) merupakan rencana prioritas pembangunan di Desa Kembaran, penyusunan RPJM Desa Kembaran tersebut dimaksudkan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dalam “ MIMPI DESA “ akan terarah dan tepat sasaran menuju Pemerintahan Desa Kembaran “ Membangun Bersama Masyarakat “.

Adapun yang tertuang dalam RPJM Desa Kembaran 2020 s.d 2025 dengan memperhatikan dan mengembangkan pembangunan yang berbasis asset dan potensi Desa Kembaran sebagaimana tersebut dibawah ini :

### 1. Sumber Daya Alam

Wilayah Desa Kembaran merupakan daerah perbukitan, namun demikian wilayah Desa Kembaran secara umum hanyalah terbagi menjadi 2 ( dua )

bagian, ialah Tanah Sawah dan Tanah Kering.

Luas areal Desa Kembaran adalah 252,250 Ha. Terdiri dari :

- a. Luas persawahan : 113 Ha.
- b. Luas tanah kering : 114 Ha.
- c. Lain – lain : 25,250 Ha.

Hal tersebut diatas adalah merupakan luas wilayah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kembaran, dan didalamnya terkandung Asset Sumber Daya Alam ( SDA ) terdiri dari :

- a. Area persawahan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian palawija / hortikultura, perikanan, peternakan dan pepohonan ;
- b. Area tanah kering dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan ( tembakau ), tanaman ketahanan pangan ( Jagung, padi gaga ) dan pepohonan ;
- c. Sumber mata air yang melimpah dan dimanfaatkan sebagai sarana kebutuhan air bersih, pertanian, perikanan ;
- d. Sungai siceger dan kelben yang merupakan area pembuangan air ketika datang musim penghujan, serta sebagai sarana saluran irigasi untuk keperluan pertanian ;
- e. Dan lain-lain.

Foto Sumber Daya Alam



Bahwa Aset SDA tersebut diatas merupakan salah satunya faktor penunjang perekonomian masyarakat Desa Kembaran, namun mengingat kondisi saat ini tentang saluran irigasi secara umum rusak berat, maka sudah barang tentu menggugah Pemerintah Desa Kembaran untuk lebih memperhatikan guna kelangsungan perekonomian yang bersumber dari produksi pertanian. Sehingga dalam kurun waktu 6 ( enam) tahun mendatang untuk penanganan sarana prasarana pertanian akan diprioritaskan melalui kegiatan sosialisasi pengamanan lahan pertanian dan / atau sejenisnya, pelatihan-pelatihan tentang pertanian melalui wadah Kelompok Tani di masing – masing Dusun serta melalui Gapoktan “ Suka Maju “ Desa Kembaran, juga penganggaran pembangunan dasar saluran irigasi secara berkesinambungan menuju kesejahteraan para petani dan penguatan tanaman ketahanan pangan ( khususnya padi dan jagung ).

Adapun tantangan / keluhan yang dihadapi adalah : mahalnya obat-obatan / pupuk pertanian, sulitnya transportasi dan murahny nilai jual hasil pertanian. Sehingga terkait dengan melemahnya harga hasil pertanian dimaksud, Pemerintah sudah sepatutnya menciptakan solusi terbaik ( misalnya system penerapan harga standard tingkat nasional ) menuju perekonomian para petani yang lebih baik dan mandiri.

## 2. Sumber Daya Manusia

Bahwa Desa Kembaran ditinjau tentang Aset Sumber Daya Manusia ( SDM ) terdapat beberapa latar belakang profesi, terdiri atas : Buruh tani, Petani sendiri, Kontruksi, Karyawan Sasta, Karyawan BUMN, Tukang cukur, Tukang Listrik, Tukang batu, Tukang kayu, Tukang las, Tukang Jahit, Mekanik, Ustadz/Mubaligh, Guru, Bidan, Penyiar radio, Pelaut, Wiraswasta, Peternak unggas, Penggalian, Perangkat Desa, Sopir, industri, Pembantu rumah tangga, Tukang sol sepatu, ojek dll.

Adapun jumlah terbesar dari Asset SDM tersebut adalah Petani sendiri mencapai angka : 716 jiwa dan Buruh Tani : 253 jiwa.

Foto buruh laki-laki



Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah besarnya angka petani sendiri namun minimnya tenaga buruh tani, hal tersebut terkait minimnya ongkos pekerja buruh tani ( Rp. 25.000 s.d Rp. 35.000 per hari ) sehingga cukup banyak yang urbanisasi. Walaupun sebenarnya terkait upah kepada buruh tani tersebut sudah dirasakan cukup berat bagi pihak petani yang memburuhkan karena mahalnya pupuk dan obat-obatan, namun bagi buruh petani dinyatakan upah tersebut masih minim.

Selain hal tersebut, tantangan yang dihadapi adalah guru tenaga honorer yang pendapatan honorinya juga masih sangat minim, padahal sudah ada personil yang wiyata bhakti selama 20 tahun.

Sehingga tantangan aset SDM tersebut diatas, merupakan tantangan yang harus dapat dipecahkan dan mencari solusi melalui strategi yang tepat dan akurat guna peningkatan kapasitas serta mobilisasi Sumber Daya Manusia di Desa Kembaran khususnya.

### 3. Sosial

Desa Kembaran adalah salah satu desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar jika dilihat dari luas wilayah, Luas wilayah Desa Kembaran : 252,250 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak : 5335 jiwa.

Dari sejumlah jiwa 5335 tersebut diatas, semua sebagai pemeluk Agama Islam. Sehingga tidak mustahil jika semua warga dalam menjalankan hubungan sosial keagamaan berjalan dengan lancar dan harmonis, adapun

kegiatan yang berjalan di Desa Kembaran tersedianya forum kegiatan keagamaan, diantaranya adalah : adanya Pondok pesantren, Kelompok Fatayat Muslimat, Kelompok Tahlilan, Kelompok Yasinan, Kelompok Mujahadah, PHBI, Istiqosah dan lain sebagainya. Kegiatan - kegiatan tersebut diselenggarakan secara rutin dan berfungsi menjadi penyanggah hubungan sosial keagamaan tetap berjalan di dalam kehidupan sehari – hari dengan penuh keharmonisan menuju masyarakat yang madani dan berakhlakul karimah.

Selain hal tersebut juga terdapat adanya hubungan sosial yang terjalin melalui organisasi kepemudaan seperti kelompok pecinta alam, Irmas, Satgas Bencana, Banser. Sedangkan dalam hubungan sosial kemasyarakatan terdapat kegiatan gotong royong, BKB, PKK Dawis, PKK RT, PKK RW, kerja bakti sosial dan lain sebagainya. Dan di bidang kesenian / olah raga, di desa Kembaran terdapat ragam kegiatan berupa : Marching Band, Rebana, Ayun-ayun, Kuda lumping, Rewa – rewo, Calung, Sepak bola, Bulu tangkis, Bola Voley, Tenis meja, Catur dan lain-lain.

Bahwa dari Aset - aset Sosial tersebut diatas terbentuk oleh adanya peran organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Interaksi antar individu ataupun antar organisasi, baik yang bergerak di bidang yang sama ataupun berbeda telah mendorong terbentuknya hubungan sosial yang beragam. Hubungan sosial tersebut selanjutnya menjadi ruang - ruang dialog dalam kehidupan sehari-hari antar anggota masyarakat. Dan selanjutnya membawa pengaruh penting dalam menyumbangkan keharmonisan dalam kehidupan berdesa. Sehingga dengan demikian, kehadiran organisasi di desa merupakan faktor penting dalam membangun hubungan sosial dan kebudayaan di Desa Kembaran.

Adapun tantangan yang dijumpai dari pelbagai aset sosial sebagaimana tersebut diatas, setelah dicermati secara seksama terdapat beberapa tantangan, antara lain :

- a. Sosial Keagamaan :
  - Keterlibatan masyarakat belum mencapai angka yang besar ;
  - Sarana dan prasarana belum memadai ;
  - Swadaya masih minim.
- b. Sosial Kepemudaan :
  - Program kegiatan masih lemah ;
  - Regenerasi belum berjalan / terbangun dengan baik ;

- Melemahnya kegiatan gotong royong ;
  - Melemahnya partisipasi terhadap pembangunan desa ;
- c. Sosial Kemasyarakatan :
- Angka partisipasi menurun drastis ;
  - Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan menurun ;
  - Konsolidasi antar kelompok tidak berjalan ;
- d. Sosial Kesenian dan Olahraga :
- Sarana dan prasarana tidak terpelihara dengan baik ;
  - Sarana dan prasarana minim ;
  - System organisasi masih cukup lemah ;

#### 4. Finansial

Desa Kembaran sebeanrnya memiliki asset finansial yang cukup memadai, diantaranya adalah : Simpan Pinjam UP2K Ronggolawe dengan modal dasar sebesar Rp. 20.000.000,- dan telah dikembangkan sampai saat ini menjadi sekitar Rp. 40.000.000,-, namun terkait adanya rekomendasi Pemerintah tentang pendirian Bumdes, hal tersebut telah dimusyawarahkan yang merupakan tantangan bagi Desa Kembaran, maka dari semula dari UP2K akan dijadikan menjadi BUM Desa Simpan Pinjam. Disamping Simpin UED – SP dan / atau BUM Desa Simpin, terdapat juga simpin – simpin lainnya yang berkembang ditengah masyarakat Desa Kembaran.

Selain hal tersebut juga terdapat produksi makanan olahan, Bengkel Mobil, Bengkel Sepeda Motor, usaha aneka kue dan lain-lain, serta Pasar Desa Kembaran, adapun pengelolaan tentang pasar desa tersebut masih perlu pembenahan manajemen, sehingga hal tersebut merupakan tantangan bagi Desa Kembaran, dengan perencanaan tentang pengelolaan pasar desa dimaksud juga akan dijadikan sebagai BUM Desa tentang Pasar Desa.

#### 5. Fisik

Desa Kembaran terdapat banyak Aset fisik yang tersebar di wilayah Desa Kembaran, diantaranya adalah : Tanah kas desa, Tanah makam, Tanah masjid yang tersebar di 4 ( empat ) Dusun, Tanah Mushola tersebar di 4 ( empat ) Dusun, madrasah, SDN 1, SDN 2, SDN 3, TK Pertiwi, Paud Bhina Sakti I, Paud Bhina Sakti III, Paud Bhina Sakti V, Lapangan bola Ronggolawe, Lapangan Sepak bola Sadan, Lapangan Voley Ball, Kantor Pemerintah Desa, Balai Desa, Gedung PKK, Posyandu dan lain-lain.

Gambar 3.4

Foto Gapura & Kantor Pemerintah Desa Kembaran



Dengan adanya asset fisik tersebut diatas telah memberikan manfaat secara nyata dalam pembangunan Desa Kembaran. Misalnya, dalam memberikan fungsi pelayanan administrasi masyarakat telah terdapat Kantor pemerintah Desa Kembaran dan untuk pelayanan Kesehatan bagi masyarakat telah tersedia Puskesmas II Kecamatan kalikajar yang berkedudukan di Desa Kembaran. juga fungsi pelayanan pendidikan dasar dengan adanya Paud Bhina Sakti I, Paud Bhina Sakti III, Paud Bhina Sakti V, TK Pertiwi, TK Khabibarrohmah, SDN 1, SDN 2, SDN 3, Madrasah, juga SMPN 3 Kalikajar yang berkedudukan di Desa Kembaran.

Adapun tantangan yang dihadapi adalah :

1. Area tanah makam telah sempit, sehingga perlu pengadaan tanah makam yang cukup memadai, namun sampai saat ini belum terdapat pembahasan secara khusus dalam upaya pengadaan tanah makam dimaksud, misalnya dengan iuran swadaya dari masyarakat;
2. Sarpras tempat ibadah kebutuhan air bersih belum sepenuhnya tercukupi, sehingga perlu pembangunan DAM Blok Siwatu yang merupakan sumber mata air yang sangat besar dan diprediksikan akan memenuhi kebutuhan air semua masyarakat Desa Kembaran ;
3. Madrasah perlu adanya perluasan area, namun hal tersebut sangat sulit untuk dikembangkan, mengingat batas tanah madrasah sudah berbatasan dengan tempat pemukiman, sehingga solusi pembangunan yang terbaik adalah dengan cara pembangunan lantai 2 dan seterusnya ;
4. Lapangan sepak bola masih belum terpelihara dengan baik, perlu benteng memutar, juga senderan lapangan guna pengamanan area serta keindahan untuk menarik pihak lain untuk peningkatan pendapatan ;
5. Bidang pendidikan, masih rendahnya angka pendidikan usia dini yang masuk di Paud maupun TK, sehingga perlu penggalakan pendidikan usia dini dimaksud, guna mencapai sesuai harapan pemerintah Desa ;

6.

Kelembagaan

Desa Kembaran terdapat Aset Kelembagaan terdiri dari : Lembaga Pendidikan yaitu : Paud Bhina Sakti I, Paud Bhina Sakti III, Paud Bhina Sakti V, Paud Insan Mulia, TK Pertiwi, TK Khabibarrohmah, SDN 1, SDN 2, SDN 3, SMPN 3 Kalikajar, Madrasah, Ponpes, Kelompok Fatayat Muslimat, Kelompok Yasinan, Kelompok Tahlilan, TPQ, Karang Taruna,

Perangkat Desa, BPD, LPMD, PKK, Linmas, RT, RW, Banser dan lain-lain.

Lembaga tersebut diatas merupakan asset yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pembangunan disegala bidang di Desa Kembaran, yang secara pasti bahwa lembaga dimaksud sebagai kekuatan utama yang memiliki peran masing-masing sesuai potensi dan fungsinya masing-masing dalam berkehidupan di Desa Kembaran.

Selain bahwa Asset Kelembagaan merupakan kekuatan Desa Kembaran sebagai mesin penggerak roda Pemerintahan di Desa Kembaran sebagaimana tersebut diatas, dijumpai pula hal-hal yang merupakan tantangan bagi Desa, antara lain :

1. Minimnya tenaga pengajar yang profesional ;
  2. Fasilitas kependidikan masih sangat minim ;
  3. Minimnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya di Lembaga Pendidikan Usia Dini ;
  4. Kerjasama strategis antara Pemerintah Desa dengan Lembaga pertanian belum terprogram ;
  5. Perlu adanya pembinaan secara menyeluruh guna peningkatan kerjasama strategis guna kesinambungan pembangunan segala bidang di Desa Kembaran.
7. Spritual dan Budaya

Desa Kembaran memiliki Asset Spritual dan Budaya bermacam-macam, diantaranya adalah :

- a. Peringatan Hari-hari Besar Islam ( PHBI ) :
  - Peringatan Maulid Nabi SAW ;
  - Peringatan Isro' dan Mi'roj ;
  - Peringatan Nuzulul Qur'an ;
  - Peringatan 10 Muharam ;
  - Nisfu sa'ban ;
  - Khoul Ruwahan .
- b. Selamatan Dusun.
- c. Selamatan Tahun Baru Hijriyah
- d. Tahlilan
- e. Yasinan
- f. Istighozah
- g. Selamatan kandungan ( mbobot ) :

- Ngapati ( 4 bulan )
- Mitoni ( 7 bulan )
- Syukuran Kelahiran
- Walimatul Ismi & motong rambut
- Bancakan ( selapan bayi lahir )
- Medun lemah ( pengenalan perdana diturunkan ditanah, usia 5-6 bulan )
- Aqiqoh

h. Ritual Kematian ( jangka waktu meninggal dunia ) :

- Nusur tanah ( 1 hari )
- Nlung dina / Tahlilan ( 3 hari )
- Metung dina / Tahlilan (7 hari)
- Tahlilan (40 hari)
- Tahlilan (100 hari)
- Tahlilan (1 tahun)
- Tahlilan (2 tahun )
- Tahlilan ( 1000 hari )
- Khoul

i. Tradisi Sunatan :

- Selamatan malam H
- Sunatan
- Syukuran ( Hotmil Qur'an )

j. Tradisi Pernikahan :

- Lamaran
- Maskawin
- Ijab Qobul
- Resepsi ( Syukuran / kenduri )
- Balik bantal (Temu besan & Klrga

k. Ritual Mendirikan Rumah :

- Selamatan Mondasi
- Mayu ( pasang atap )
- Selamatan memasuki rumah

l. Gugur Gunung :

- Bersih-bersih saluran irigasi
- Bersih-bersih makam/kl makam
- Bersih-bersih jalan/tepi jalan

- Pembangunan Masjid/Mushola
- Pembangunan Siskamling
- Pemb. sarpras sosial
- Pemakaman Jenazah
- Mayu umah (pasang atap rumah)
- PHBI
- Khajatan warga (sambatan)

Gambar 3.6

Foto Aset Spiritual dan Budaya di desa Kembaran



Keberadaan Asset Spiritual dan Budaya di Desa Kembaran tersebut diatas, memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan antar sesama warga masyarakat dan juga terhadap alam semesta. Selain itu ia juga berperan penting dalam menjaga menumbuhkembangkan solidaritas sosial antar warga masyarakat. Tantangan- tantangan terhadap aset spiritual budaya ini adalah: berkurangnya kesadaran anggota masyarakat dalam menjaga tradisi, semakin menguatnya budaya individualistik, belum lahirnya kesadaran bahwa teradapat nilai penting dalam ritual-ritual tertentu yang membawa pengaruh positif terhadap masyarakat di Wilayah Desa Kembaran.

### C. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Di desa Kembaran terdapat berbagai macam kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi tersebut terdiri dari : Paud Bhina Sakti I, Paud Bhina Sakti III, Paud Bhina Sakti V, Paud Insan Mulia, TK Pertiwi, TK Khabibarrohmah, SDN 1, SDN 2, SDN 3, SMPN 3 Kalikajar, Madrasah, Ponpes, Kelompok Fatayat Muslimat, Kelompok Yasinan, Kelompok Tahlilan, TPQ, Karang Taruna, Perangkat Desa, BPD, LPMD, PKK, Linmas, RT, RW, Banser, Kelompok tani ( Gapoktan ) dan lain-lain.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan di desa telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan (fisik dan non fisik) yang ada di desa. Di mulai dari keberadaan PKK selain membina terhadap ibu-ibu desa, juga turut berperan aktif dalam kegiatan Posyandu desa, karena anggota Posyandu merupakan anggota PKK desa. Karang taruna membantu keterlibatan pemuda di dalam pembangunan desa.

Dalam praktiknya, kelompok posyandu membantu proses pelayanan kesehatan masyarakat serta membantu di dalam perencanaan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di desa. Gapoktan perannya meningkatkan nilai kesejahteraan anggota lewat program peningkatan hasil pertaniannya. RT/RW membantu mengakomodir masyarakat di dalam program pemberdayaan masyarakat desa, serta membantu di dalam proses partisipasi pembangunan dan meningkatkan kegotongroyongan masyarakat. Linmas sangat membantu di dalam terciptanya keamanan dan keadaan kondusif desa lewat patroli rutinnnya. Selanjutnya di kelompok-kelompok pengajian ( termasuk imam masjid ) dan kesenian berperan di dalam pembinaan agama dan mental masyarakat desa Kembaran.

Organisasi kemasyarakatan yang berada di desa, keberadaan dan eksistensinya tidak terlepas dari kontribusi desa terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut melalui berbagai dukungan. Pada kelompok PKK dan posyandu, desa mengalokasikan dana operasional, insentif bagi kader dan memberikan pelatihan kepada kader melalui dana APB Desa, begitu juga kepada kelompok pemuda, Linmas dan RT / RW selain mendapatkan alokasi dana insentif dari APB Desa pemerintah desa juga memberikan bantuan seragam. Sedangkan untuk kelompok olah raga, pemerintah desa telah memfasilitasi adanya lapangan sepak bola dan gedung badminton. Untuk kelompok seni juga mendapatkan dana yang di alokasikan dari APB Desa dan termasuk juga Lembaga / Organisasi lainnya secara umum juga mendapatkan anggaran dari APB Desa walaupun jumlahnya belum sesuai yang diharapkan, mengingat keterbatasan / kemampuan keuangan Desa.

Tantangan-tantangan di dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yang sedang di hadapi antara lain: Pertama, lemahnya peningkatan sumberdaya manusia dan regenerasi dalam pengelolaan organisasi. Kedua, minimnya peningkatan kerjasama (pola komunikasi) antara pemerintah desa dan lembaga/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang berada di desa sehinggakemitraan dalam pembangunan desa belum terjalin kuat. Ketiga, perlunya peningkatan sarana organisasi kemasyarakatan terutama untuk PKD dan sarana olah raga. Keempat, perlunya peningkatan komitmen lembaga terkait dalam pengadaan dan realisasi progam kerja, terutama untuk PKK dan GAPOKTAN. Kelima peningkatan insentif/kesejahteraan bagi pengurus/anggota/kader organisasi kemasyarakatan terutama bagi RT/RW, FKD, (termasuk imam masjid) serta kelompok kesenian. Keenam, pengadaan komputer/laptop bagi lembaga/kelompok yang ada didesa terutama untuk kelompok BPD, Fatayat dan muslimat serta kelompok tim pembaharu desa ( TPD ).

#### D. Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan

Desa Kembaran dalam melaksanakan kegiatan / proses pembangunan pada dasarnya melibatkan berbagai unsur, baik Lembaga Desa maupun Kelembagaan Desa, diantaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Kelompok RT dan RW, Organisasi - organisasi Kepemudaan, Agama dan perbagai tokoh yang ada di Desa Kembaran. Proses pembangunan dimaksud diawali dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan kegiatan

pembangunan. Masyarakat juga diberikan ruang dalam mengevaluasi seluruh proses yang ada, langkah ini bertujuan agar transparansi dan akuntabilitas pembangunan menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

Bahwa dengan keterlibatan semua lembaga tersebut diatas, maka terkoordinasi terkait upaya peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat guna memotivasi kearah pemberdayaan masyarakat dengan langkah kongkrit dibahas secara detil dalam wadah Tim Pencerah Desa yang diberikan misi untuk membuat perencanaan pembangunan berlandaskan asset yang dimiliki oleh Desa Kembaran dengan system *Asset Based Community Development* ( ABCD ).

Perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pencerah Desa menghasilkan berbagai dokumen perencanaan, diantaranya adalah dokumen asset potensi desa, dokumen kewenangan desa serta dokumen kesejahteraan local desa yang pada proses pembuatannya melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara penuh. Dalam menentukan indikator yang dijadikan *tool* sensus kesejahteraan local juga merupakan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Dokumen yang dihasilkan Tim Pencerah Desa kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun RPJM Desa Kembaran dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMDesa periode 2020 – 2025. Selain dari dokumen asset yang dihasilkan, langkah penyusunan program prioritas untuk RPJMDes juga melibatkan usulan dari tingkatan Dusun yang merupakan kumpulan aspirasi dari lapisan masyarakat dalam wilayah dusun yang diangkat dan dibahas secara bersama untuk menentukan usulan prioritas dala forum Musrenbangdes..

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Desa Kembaran secara garis besar sebagai berikut :

1. Gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa menurun ;
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkurang ;
3. Langkah – langkah rekrutmen sumberdaya manusia profesional yang dimiliki untuk dijadikan sebagai pelopor pembangunan di Desa Kembaran.

Matrik 3.1  
Apresiasi Sektor Pembangunan Desa

Jenis Sektor Pembangunan Desa	Kondisi Saat ini	Potensi/Kekuatan yang dimiliki	Tantangan dan peluang	Perubahan apa yang diharapkan
-------------------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

<p>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p>		<p>1. Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah desa, antara lain :</p> <p>a. Melaksanakan dinas setiap hari ( 5 hari kerja )</p> <p>b. Penerapan daftar hadir dinas yang ditandatangani / paraf, dan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya bahwa absensi aparatur pemerintah desa dalam form rekapitulasi absensi dilaporkan ke Kecamatan Kalikajar ;</p> <p>c. Secara umum perangkat desa dituntut mampu untuk mengoperasikan komputer ;</p>	<p>1. Aplikasi pelayanan surat menyurat belum berjalan sesuai harapan, seperti Program Pemerintah Kabupaten tentang on line Sinta Paten belum dapat diaktifkan secara menyeluruh ;</p> <p>2. Kapasitas aparatur pemerintah desa ( perangkat desa ) belum menyeluruh menguasai pengoperasian komputer ;</p> <p>3. Ada 4 ( empat ) perangkat desa yang kemungkinan besar tidak dapat mengoperasikan komputer, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan yang bersangkutan ;</p>	<p>Berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa.</p> <p>1. Terdapatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;</p> <p>2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.</p> <p>Adapun Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, kebijakan pembangunannya diarahkan pada :</p> <p>a. Perwujudan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sebagai prioritas pembangunan,</p>
---	--	--	--	---

		<p>d. Bagi aparatur pemerintah desa yang potensi dan belum menguasai operasikan komputer, secara bertahap diadakan pelatihan komputer ;</p> <p>e. Jumlah perangkat desa 13 orang, adapun yang telah dapat berjalan operasikan komputer 8 orang.</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik :</p> <p>a. Tersedianya sarpras kantor yang sudah cukup memadai, seperti Laptop, PC dalam upaya meningkatkan</p>	<p>4. Aset tanah desa yang sebenarnya produktif, namun belum dapat dikelola dengan baik, sehingga boleh dikatakan tidak ada retribusi yang masuk sebagai sumber pendapatan desa ;</p> <p>5. Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, hal tersebut akibat lemah ekonomi sehingga kepedulian terhadap pembangunan belum berjalan dengan maksimal.</p>	<p>bukan sekedar latah politik dalam mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan semasa Orde Baru. Akan tetapi pelembagaan <i>good govermant, clean and stronght govermant</i> di tingkat pemerintahan Desa, lebih merupakan perwujudan dari semangat reformasi politik yang diarahkan untuk mewujudkan otonomi dan demokrasi. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan Desa selama tahun 2016 – 2018 diupayakan melalui perwujudan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan</p>
--	--	--	---	---

		<p>pelayanan prima kepada publik ;</p> <p>b. Surat menyurat yang dibutuhkan publik dilayani secara maksimal dalam 5 hari kerja, gratis tanpa ada pungutan biaya ;</p> <p>c. Kebiasaan lama yang sering terjadi tentang pelayanan dirumah ( diluar jam kerja ), sudah tidak terjadi lagi, hal tersebut dilakukan dengan mengingat bahwa setiap surat yang dikeluarkan harus ada regiatrasi / nomor surat yang harus dapat dipertanggungjawabkan</p>		<p>hal itu secara khusus sasaran yang ingin dicapai antara lain :</p> <p>b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab dengan menghindarkan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta masyarakat, mengembangkan etika dan moral serta melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap setiap kegiatan pemerintah Desa.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan menyuntikkan semangat <i>enterpreneurial</i>,</p>
--	--	--	--	---

		<p>;</p> <p>d. Pelayanan surat menyurat secara umum dengan komputer ;</p> <p>e. Melakukan perbaikan administrasi pelayanan umum, keuangan dan pembangunan.</p> <p>3. Meningkatnya kerjasama secara positif antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan / Organisasi Tingkat Desa.</p>		<p>memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan.</p>
<p>Bidang Pembangunan Desa</p>		<p>1. Aset Sumber Daya Alam ( SDA ) memiliki keragaman, seperti :</p> <p>a. Area persawahan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian palawija /</p>	<p>1. mahalnya obat-obatan / pupuk pertanian, sulitnya transportasi dan murahny nilai jual hasil pertanian. Sehingga terkait dengan melemahnya harga hasil</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa, yang ditandai dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Desa;</p>

		<p>hortikultura, perikanan, peternakan dan pepohonan ;</p> <p>b. Area tanah kering dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan ( tembakau ), tanaman ketahanan pangan ( Jagung, padi gaga ) dan pepohonan ;</p> <p>c. Sumber mata air yang melimpah dan dimanfaatkan sebagai sarana kebutuhan air bersih, pertanian, perikanan ;</p> <p>d. Sungai siceger dan kelben yang merupakan area pembuangan air ketika datang musim penghujan, serta sebagai sarana saluran irigasi untuk keperluan pertanian ;</p>	<p>pertanian dimaksud, Pemerintah sudah sepatutnya menciptakan solusi terbaik ( misalnya system penerapan harga standard tingkat nasional ) menuju perekonomian para petani yang lebih baik dan mandiri.</p> <p>2. besarnya angka petani sendiri namun minimnya tenaga buruh tani, hal tersebut terkait minimnya ongkos pekerja buruh tani ( Rp. 25.000 s.d Rp. 35.000 per hari ) sehingga cukup banyak yang urbanisasi. Walaupun sebenarnya terkait upah kepada buruh tani tersebut sudah dirasakan cukup berat bagi pihak petani yang memburuhkan karena mahalnya pupuk dan obat-obatan, namun bagi buruh</p>	<p>2. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat desa yang ditandai dengan semakin besarnya nilai swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa;</p> <p>3. Meningkatkan peran kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.</p> <p>Oleh karena itu kebijakan pembangunan pedesaan diarahkan pada :</p> <p>a. Memperkuat Perencanaan Pembangunan Desa;</p> <p>b. Memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat Desa untuk menyelenggarakan pembangunan dilingkungannya;</p>
--	--	---	---	--

		<p>e. Dan lain-lain.</p> <p>2. Aset Sumber Daya Manusia ( SDM ) memiliki keragaman, yang merupakan mobilisasi untuk melaksanakan pembangunan.</p> <p>3. Aset Sosial :</p> <p>a. Aset Sosial Keagamaan</p> <p>b. Aset Sosial Kepemudaan</p> <p>c. Aset Sosial Kemasyarakatan</p> <p>d. Aset Soaial Kesenian dan Olahraga</p> <p>4. Aset Finansial :</p> <p>a. Aset Finansial UED-SP dan dijadikan sebagai BUM Desa Ronggolawe.</p> <p>b. Aset Finansial Pasar Desa.</p> <p>5. Aset Fisik memiliki beragam, antara lain :</p>	<p>petani dinyatakan upah tersebut masih minim. Selain hal tersebut, tantangan yang dihadapi adalah guru tenaga honorer yang pendapatan honorinya juga masih sangat minim, padahal sudah ada personil yang wiyata bhakti selama 20 tahun. Sehingga tantangan aset SDM tersebut diatas, merupakan tantangan yang harus dapat dipecahkan dan mencari solusi melalui strategi yang tepat dan akurat guna peningkatan kapasitas serta mobilisasi Sumber Daya Manusia di Desa Kembaran</p> <p>3. Tantangan bidang sosial, antara lain :</p> <p>a. Sosial Keagamaan :</p>	<p>c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan;</p> <p>d. Memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama.</p>
--	--	---	---	--

		<p>Tanah kas desa, Tanah makam, Tanah masjid yang tersebar di 4 ( empat ) Dusun, Tanah Mushola tersebar di 4 ( empat ) Dusun, madrasah, SDN 1, SDN 2, SDN 3, TK Pertiwi, Paud Bhina Sakti I, Paud Bhina Sakti III, Paud Bhina Sakti V, Lapangan bola Ronggolawe, Lapangan Sepak bola Sadan, Lapangan Voley Ball, Kantor Pemerintah Desa, Balai Desa, Gedung PKK, Posyandu dan lain-lain.</p> <p>6. Aset Kelembagaan memiliki beragam yang telah berjalan membangun desa, antara lain :</p> <p>Lembaga Pendidikan yaitu : Paud Bhina Sakti I, Paud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan masyarakat belum mencapai angka yang besar ;</li> <li>- Sarana dan prasarana belum memadai ;</li> <li>- Swadaya masih minim.</li> </ul> <p>b. Sosial Kepemudaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program kegiatan masih lemah ;</li> <li>- Regenerasi belum berjalan / terbangun dengan baik ;</li> <li>- Melemahnya kegiatan gotong royong ;</li> <li>- Melemahnya partisipasi terhadap pembangunan desa ;</li> </ul> <p>c. Sosial Kemasyarakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka partisipasi menurun drastis ;</li> <li>- Kepedulian terhadap</li> </ul>	
--	--	---	---	--

		<p>Bhina Sakti III, Paud Bhina Sakti V, Paud Insan Mulia, TK Pertiwi, TK Khabibarrohmah, SDN 1, SDN 2, SDN 3, SMPN 3 Kalikajar, Madrasah, Ponpes, Kelompok Fatayat Muslimat, Kelompok Yasinan, Kelompok Tahlilan, TPQ, Karang Taruna, Perangkat Desa, BPD, LPMD, PKK, Linmas, RT, RW, Banser dan lain-lain.</p> <p>7. Aset Spiritual dan budaya memiliki beragam, keberadaan Asset Spiritual dan Budaya di Desa Kembaran memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan antar</p>	<p>kelestarian lingkungan menurun ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsolidasi antar kelompok tidak berjalan ;</li> </ul> <p>d. Soaial Kesenian dan Olahraga :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana tidak terpelihara dengan baik ;</li> <li>- Sarana dan prasarana minim ;</li> <li>- System organisasi masih cukup lemah ;</li> </ul> <p>4. Bidang finansial terdapat tantangan, antara lain : Lemahnya Manajemen pengelolaan pasar Desa dan UED – SP.</p> <p>5. Tantangan bidang fisik, antara lain :</p> <p>a. Area tanah makam telah</p>	
--	--	---	--	--

		<p>sesama warga masyarakat dan juga terhadap alam semesta. Selain itu ia juga berperan penting dalam menjaga menumbuhkembangkan solidaritas sosial antar warga masyarakat. Tantangan-tantangan terhadap aset spiritual budaya ini adalah: berkurangnya kesadaran anggota masyarakat dalam menjaga tradisi, semakin menguatnya budaya individualistik, belum lahirnya kesadaran bahwa terdapat nilai penting dalam ritual-ritual tertentu yang membawa pengaruh positif terhadap masyarakat di Wilayah Desa</p>	<p>sempit, sehingga perlu pengadaan tanah makam yang cukup memadahi, namun sampai saat ini belum terdapat pembahasan secara khusus dalam upaya pengadaan tanah makam dimaksud, misalnya dengan iuran swadaya dari masyarakat;</p> <p>b. Sarpras tempat ibadah kebutuhan air bersih belum sepenuhnya tercukupi, sehingga perlu pembangunan DAM Blok Siwatu yang merupakan sumber mata air yang sangat besar dan diprediksikan akan memenuhi kebutuhan air semua masyarakat Desa Kembaran ;</p>	
--	--	--	---	--

		Kembaran.	<p>c. Madrasah perlu adanya perluasan area, namun hal tersebut sangat sulit untuk dikembangkan, mengingat batas tanah madrasah sudah berbatasan dengan tempat pemukiman, sehingga solusi pembangunan yang terbaik adalah dengan cara pembangunan lantai 2 dan seterusnya ;</p> <p>d. Lapangan sepak bola masih belum terpelihara dengan baik, perlu benteng memutar, juga senderan lapangan guna pengamanan area serta keindahan untuk menarik pihak lain untuk peningkatan pendapatan ;</p> <p>e. Bidang pendidikan, masih</p>	
--	--	-----------	---	--

			<p>rendahnya angka pendidikan usia dini yang masuk di Paud maupun TK, sehingga perlu penggalakan pendidikan usia dini dimaksud, guna mencapai sesuai harapan pemerintah Desa ;</p> <p>6. Tantangan bidan kelembagaan antara lain :</p> <p>a. Minimnya tenaga pengajar yang profesional ;</p> <p>b. Fasilitasi kependidikan masih sangat minim ;</p> <p>c. Minimnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya di Lembaga Pendidikan Usia Dini ;</p> <p>d. Kerjasama strategis antara Pemerintah Desa dengan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Lembaga pertanian belum terprogram ;</p> <p>e. Perlu adanya pembinaan secara menyeluruh guna peningkatan kerjasama strategis guna kesinambungan pembangunan segala bidang di Desa Kembaran.</p> <p>7. Tantangan terhadap aset spiritual budaya adalah: berkurangnya kesadaran anggota masyarakat dalam menjaga tradisi, semakin menguatnya budaya individualistik, belum lahirnya kesadaran bahwa terdapat nilai penting dalam ritual-ritual tertentu yang membawa pengaruh positif terhadap masyarakat di Wilayah Desa</p>	
--	--	--	--	--

			Kembaran.	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Potensi dan kekuatan yang dimiliki adalah berbagai macam kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di desa telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan (fisik dan non fisik) yang ada di desa dan telah berjalan sesuai kapasitas organisasinya masing-masing.	Tantangan-tantangan di dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yang sedang di hadapi antara lain: Pertama, lemahnya peningkatan sumberdaya manusia dan regenerasi dalam pengelolaan organisasi. Kedua, minimnya peningkatan kerjasama (pola komunikasi) antara pemerintah desa dan lembaga/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang berada di desa sehinggakemitraan dalam pembangunan desa belum terjalin kuat. Ketiga, perlunya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kamtibmas ;</li> <li>b. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana ;</li> <li>c. Pembentukan ronda malam ;</li> <li>d. Memperkuat musyawarah di tingkat RT, RW dan Dusun ;</li> <li>e. Peningkatan mediasi terhadap konflik internal &amp; eksternal ;</li> <li>f. Fasilitasi kadarkum ;</li> <li>g. Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya adat</li> <li>h. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;</li> <li>i. Penyelenggaraan upaya pencegahan, kesiapsiagaan,</li> </ul>

			<p>peningkatan sarana organisasi kemasyarakatan terutama untuk PKD dan sarana olah raga. Keempat, perlunya peningkatan komitmen lembaga terkait dalam pengadaan dan realisasi program kerja, terutama untuk PKK dan GAPOKTAN. Kelima peningkatan insentif/kesejahteraan bagi pengurus/anggota/kader organisasi kemasyarakatan terutama bagi RT/RW, FKD, (termasuk imam masjid) serta kelompok kesenian. Keenam, pengadaan komputer/laptop bagi lembaga/kelompok yang ada di desa terutama untuk kelompok BPD, Fatayat dan muslimat serta kelompok tim pembaharu desa ( TPD ).</p>	<p>pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat;</p> <p>j. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;</p> <p>k. Pemanfaatan radio komunitas untuk sistem keamanan Desa;</p> <p>l. Pengaturan siskamling Desa;</p> <p>m. Pembinaan kerukunan warga melalui penggiatan kegiatan kemasyarakatan;</p> <p>n. Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan fasilitasi mediasi di Desa;</p> <p>o. Penetapan peraturan Desa tentang penyelesaian konflik di Desa;</p> <p>p. Peningkatan kapasitas masyarakat tentang kesadaran hukum; dan</p> <p>q. Pelestarian dan pengembangan</p>
--	--	--	---	---

				<p>gotong royong masyarakat Desa melalui penggiatan kegiatan kemasyarakatan.</p> <p>r. Menciptakan hubungan yang baik antar elemen, kelompok dan organisasi masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan Desa.</p> <p>l. .Penguatan peran organisasi masyarakat untuk optimalisasi pembangunan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan.</p> <p>m..Memberikan dukungan secara penuh terhadap organisasi masyarakat demi lahirnya kader desa yang handal.</p> <p>n.Mendukung penguatan kelompok dan organisasi masyarakat untuk terciptanya kelestarian budaya..</p>
--	--	--	--	--

				s.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Potensi dan kekuatan yang dimiliki, bahwa di Desa Kembaran dalam melaksanakan kegiatan / proses pembangunan pada dasarnya melibatkan berbagai unsur, baik Lembaga Desa maupun Kelembagaan Desa, diantaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Kelompok RT dan RW, Organisasi - organisasi Kepemudaan, Agama dan perbagai tokoh yang ada di Desa Kembaran. Proses pembangunan dimaksud diawali dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan kegiatan pembangunan. Masyarakat juga diberikan ruang dalam	Adapun tantangan yang dihadapi oleh Desa Kembaran secara garis besar sebagai berikut : 1. Gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa menurun ; 2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkurang ; 3. Langkah – langkah rekrutmen sumberdaya manusia profesional yang dimiliki untuk dijadikan sebagai pelopor pembangunan di Desa Kembaran.	a. Meningkatkan semua potensi desa dengan cara melakukan penguatan kapasitas dan kaderisasi terhadap kelompok masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. b. Mendukung penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (tani, pengrajin, pemuda, perempuan) dalam optimalisasi pembangunan desa ; c. Mendayagunakan semua potensi desa dengan cara membangun kerjasama antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan ;

		<p>mengevaluasi seluruh proses yang ada, langkah ini bertujuan agar transparansi dan akuntabilitas pembangunan menjadi lebih baik dan tepat sasaran.</p>		<p>d. Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin dan usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi ;</p> <p>e. Penguatan kader pembangunan desa ;</p>
--	--	--	--	--

## BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM DESA

### A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintahan desa Kembaran mengambil langkah untuk memperkuat Sistem Perencanaan, Mengefektifkan Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

#### 1. Perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab dengan menghindari dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta masyarakat, mengembangkan etika dan moral.

#### b. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas perangkat desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
- Menata dan menyempurnakan sistem dan struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;

#### 2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan menyuntikkan semangat *enterpreneurial*, memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan

##### a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan

- Penyempurnaan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efisien dan efektif;
- Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip;
- Pengembangan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Satuan Kerja Perangkat Desa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- Pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas perangkat desa lainnya;
- Peningkatan kualitas pelayanan perijinan usaha dan legalisasi surat menyurat dan dokumen administrasi;
- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui dialog dan musyawarah terbuka.

3. Mewujudkan Sistem Perencanaan yang Berbasis Partisipasi Masyarakat

- a. Memperkuat Basis Data Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Pengisian Buku Administrasi Desa Secara Continew dan Benar serta Evaluasi Berkelanjutan;
- c. Pembinaan dan Pelatihan Kepada Kaur-kaur sebagai ujung tombak falidnya data dan administrasi desa minimal 1 minggu 1 kali;
- d. Sharing antar sekdes se-Kabupaten Wonosobo Guna meningkatkan Kemajuan bersama serta mempercepat akses informasi perkembangan tugas-tugas Kesekretariatan Desa;
- e. Program Penguatan Data Base

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

Penyusunan dan Aktualisasi data desa Secara Berkelanjutan dengan Komputerisasi Simstem Informafi Data Desa;

4. Mewujudkan Proses Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan yang Transparan

- a. Program Peningkatan Intensitas Konsultasi Publik

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Peningkatan efektivitas pelaksanaan dialog dengan masyarakat;
- Peningkatan intensitas pelaksanaan kunjungan langsung ke semua lapisan masyarakat.

b. Program Pengembangan Sistem Perencanaan

Program ini dilaksanakan secara bersinergi dengan program fasilitasi penyusunan perencanaan desa guna memperkuat perencanaan pembangunan desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian melalui upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek;
- Peningkatan kualitas pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat dusun, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pengusaha.

5. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pemerintahan Desa

a. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.

b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan keuangan desa,

2) Program Peningkatan Kapasitas BPD

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Fasilitasi peningkatan kapasitas anggota BPD baik dalam bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan;
- b) Fasilitasi peningkatan efektivitas penjangkaran aspirasi
- c) Fasilitasi peningkatan kualitas kegiatan BPD;
- d) Fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan rapat-rapat BPD.

c. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Desa

1) Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini dilaksanakan secara simultan dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja Desa, program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur desa Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Penyempurnaan perangkat Desa tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Desa;
- b) Penyusunan standar analisa biaya sebagai kelanjutan dari penyusunan standar pelayanan minimal;
- c) Peningkatan kualitas indeks harga satuan setiap tahunnya.
- d) Penyempurnaan sistem administrasi penatausahaan keuangan Desa;
- e) Pengembangan transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme dalam pengelolaan keuangan Desa

## 2) Program Peningkatan Pendapatan Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Intensifikasi sumber-sumber pendapatan Desa;
- b) Mencari sumber-sumber pendapatan Desa baru yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi;
- c) Membangun sistem pengelolaan kas sehingga dapat menghasilkan pendapatan;
- d) Meningkatkan sistem penetapan target pendapatan sehingga dapat sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan.

## 3) Program Peningkatan Pengelolaan Kekayaan (Aset) Desa

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Menginventarisir barang milik Desa;
- b) Pengamanan aset Desa melalui
- c) Efisiensi dan efektivitas penggunaan aset Desa
- d) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah Desa
- e) Pengelolaan Barang Desa
- f) Penyusunan Buku Daftar Kebutuhan Barang Desa
- g) Pengamanan Aset tanah milik Desa melalui pembuatan dan pemasangan plang.

## 6. Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pembangunan Pedesaan

- a. Memperkuat Perencanaan Desa.

Program ini dilaksanakan secara simultan dengan program pengembangan sistem perencanaan, sehingga dengan kuatnya sistem perencanaan di tingkat desa diharapkan akan mempercepat perkembangan sistem perencanaan yang komprehensif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Fasilitasi pelaksanaan musrenbangdes dan musrenbangdes;
  - b) Fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Desa.
- b. Memberi Ruang yang lebih Besar Kepada Masyarakat Untuk Menyelenggarakan Pembangunan di Lingkungannya;
- Program Penguatan Kemampuan Keuangan Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Fasilitasi peningkatan pendapatan asli desa;
  - b) Peningkatan efektivitas penyaluran dan pemanfaatan alokasi dana transfer desa (DTD);
  - c) Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa.
7. Memberi Ruang yang lebih Besar kepada Masyarakat dan Swasta untuk Mengawasi dan Mengevaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Program Peningkatan Kualitas Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Swasta Atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a. Mengefektifkan pemanfaatan kotak saran / pengaduan;
  - b. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan swasta;
  - c. Pemberian peluang kepada swasta dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

1. Pertama Strategi bidang pelaksanaan pembangunan dengan langkah mengembangkan sistem kelembagaan pemerintahan desa yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan landasan sistem kelembagaan yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari efektifitas pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Strategi penguatan sistem Kelembagaan Desa juga dimaksudkan untuk membangun demokrasi lokal yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggungjawab dan hak, sehingga proses pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak hanya mengedepankan proses Kelembagaan Desa tetapi harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu seluruh masyarakat Kembaran kedepan perlu memastikan bahwa :

- a. Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tidak lagi diperdebatkan namun betul-betul dapat diterima oleh semua warga masyarakat sebagai Dasar Negara dan Pandangan hidup bangsa Indonesia secara utuh ;
- b. Kewenangan berskala lokal desa tetap dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia ;
- c. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam lambang negara harus dihayati dan dipraktekkan ;
- d. Pemerintahan dipilih dan diganti melalui proses pemilu yang demokratis oleh rakyat secara langsung ;
- e. Seluruh peraturan desa harus dijiwai oleh semangat Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- f. Peraturan desa disusun dan diajukan dengan sejauh mungkin melalui proses debat publik ;
- g. Menghindari peraturan desa yang diskriminatif terhadap warga masyarakat ;
- h. Nilai-nilai luhur yang telah ada di masyarakat terus diperkuat untuk menghindarkan pemaksaan individu oleh individu lain atau pemaksaan golongan oleh golongan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Pemerintahan Desa harus menjaga dan menghormati hak-hak asasi warga masyarakatnya.

2. Strategi kedua, Strategi Pembangunan Desa Kembaran, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar warga masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.

Hak-hak dasar warga masyarakat yang berbentuk hak sipil dan Kelembagaan Desa serta hak ekonomi, sosial dan budaya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Pemenuhan hak dasar tersebut meliputi :

- (a) hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- (b) hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (pangan, sandang, papan) yang terjangkau;
- (c) hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan;
- (d) hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan;
- (e) hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
- (f) hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
- (g) hak untuk memperoleh rasa aman;
- (h) hak untuk memperoleh keadilan;
- (i) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan Kelembagaan Desa dan perubahan; dan
- (j) hak untuk berinovasi. Pemenuhan hak-hak dasar ini sejalan dengan tujuan *Millennium Development Goals (MDGs)*, yang meliputi :
  - Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
  - Memenuhi pendidikan dasar untuk semua;
  - Mendorong kesetaraan jender & pemberdayaan perempuan;
  - Menurunkan angka kematian balita;
  - Meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan;
  - Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain;
  - Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sedangkan landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan generasi yang akan datang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat, ada jaminan dan kepastian hukum serta regulasi yang pasti, kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat.

### 3. Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Pembangunan Infrastruktur

#### Sumber Daya Air

- a. Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air dalam Rangka Menjaga Kuantitas dan Kualitasnya

Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai Dan Sumber Air Lainnya

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Penatagunaan sumberdaya air dan konservasi air tanah;
- Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi air.

- b. Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi dan Air Bersih

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- b) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

#### Transportasi

- a. Mempercepat dan Memperluas Jangkauan Pembangunan Infrastruktur Prasarana Jalan

- 1) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan :

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kampung / jalan Desa.

- 2) Program Peningkatan / Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan yang dilaksanakan :

Peningkatan / pembangunan jalan kampung / Desa.

#### Perumahan dan Permukiman

- a. Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman

- 1) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a) Fasilitasi dan penggalan pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam;

- b) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat utamanya bagi kelompok rentan / miskin;
  - c) Peningkatan dan normalisasi saluran drainase.
- 2) Program Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a) Penyuluhan tentang pemisahan sampah organik dan anorganik;
  - b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menaggulangi sampah.
- b. Melaksanakan Sistem Pengelolaan Tanah yang Efisien dan Efektif
- 1) Program Penataan dan Pelayanan Pertanahan
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Pengembangan sistem informasi pertanahan yang transparan;
  - b) Pengembangan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan melalui pendataan ulang kepemilikan tanah;
  - c) Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sampai kabupaten.
- c. Mengupayakan Akselerasi Pertumbuhan Lapangan Kerja
- 1) Program Perluasan Lapangan Kerja
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Peningkatan informasi pasar kerja;
  - b) Fasilitasi kerjasama antara masyarakat dengan lembaga bursa kerja;
  - c) Memfasilitasi informasi upaya-upaya penempatan kerja baik melalui model Antar Kerja Antar Negara, Antar Kerja Antar Desa maupun melalui transmigrasi dan sebagainya.
- d. Memberikan Perlindungan kepada Pekerja
- Program Perlindungan Tenaga Kerja
- Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :
- a) Fasilitasi penyelesaian permasalahan tenaga kerja;
  - b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
  - c) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan;
  - d) Fasilitasi pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan.

e. Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

a. Menggiatkan pemasyarakatan masalah pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup kepada masyarakat dalam rangka mengetuk hati para pelaku pemerintahan dan pembangunan serta ekonomi yang bersentuhan dengan konversi dan konservasi sumber daya alam

1) Program Pengembangan Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

Penyusunan data sumber daya alam dan lingkungan hidup baik potensi maupun daya dukung.

2) Program Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

a) Pemberian penyuluhan tentang perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali.

b) Pengembangan koordinasi dalam perlindungan dan rehabilitasi sumber daya hutan;

c) Rehabilitasi hutan dan lahan;

d) Pengembangan koordinasi pengelolaan DAS;

e) Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan;

f) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam;

g) Peningkatan koordinasi pengelolaan hutan dengan Perum Perhutani.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

a) Pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian ijin usaha atau kegiatan;

b) Pemantauan kualitas udara dan air;

c) Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan pembangunan;

- d) Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal khususnya pemulung dalam upaya pemisahan sampah dan 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di TPA;
  - e) Pengembangan teknologi ramah lingkungan;
  - f) Peningkatan efektivitas kegiatan penghijauan;
  - g) Pengkayaan atau restocking sumber daya alam khususnya pertanian dan perikanan.
- b. Menegakkan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang Berlaku
- 4) Program Penataan Hukum Dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Evaluasi pelaksanaan peraturan Desa dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b) Peninjauan kembali terhadap peraturan Desa yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - c) Penyusunan peraturan Desa tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 5) Program Penegakan Hukum Dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan;
  - b) Pembinaan dan Pengawasan kegiatan penjarangan keanekaragaman hayati ( Ikan dan burung );
  - c) Evaluasi, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan.
- c. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Swasta untuk Melakukan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 6) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Sosialisasi kebijakan dan regulasi dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup utamanya pertambangan;

- b) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan.

### C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

#### A. Mewujudkan Desa Kembaran yang Aman, Tentram Sejahtera

##### 1. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas

###### a. Mewujudkan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Stabil

###### 1) Program Pemberdayaan dan Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

- a) Deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Pengkajian sistem keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c) Pemberdayaan LINMAS dan Anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;
- d) Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e) Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat, swasta dan pemerintah guna mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil;
- f) Penyelenggaraan kerjasama Masyarakat dan POLRI serta TNI dalam rangka pemantapan keamanan dan ketertiban;
- g) Penanggulangan dan penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.

###### 2) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

- a) Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi anti narkoba;
- b) Fasilitasi dan peningkatan kualitas penegakan peraturan perundang-undang dibidang narkoba;
- c) Peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

b. Memberikan Jaminan Rasa Aman bagi Masyarakat

1) Program Penanggulangan Tindak Kriminalitas

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

- a) Fasilitasi dan peningkatan penanggulangan dan penanganan terhadap kriminalitas dan kejahatan lainnya;
- b) Penyelenggaraan kerjasama dengan Polri dan TNI;
- c) Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penanggulangan tindak kriminalitas.

2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

a. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

1) Program Peningkatan Pendidikan Keagamaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pengembangan wawasan dan pendalaman materi melalui berbagai lokakarya, workshop, seminar dan sebagainya bagi tenaga pendidik dan kependidikan agama;
- b) Pelaksanaan lomba karya ilmiah agama, dan pementasan seni keagamaan, pesantren kilat dan sebagainya bagi peserta didik, santri;

2) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, perpustakaan tempat peribadatan, sertifikasi tanah wakaf;
- b) Fasilitasi dan pemberian bantuan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan, MTQ, dan sejenis lainnya;
- c) Peningkatan pembinaan keluarga sakinah;
- d) Peningkatan pelayanan nikah melalui fasilitasi peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah;
- e) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodakoh, dan lainnya;
- f) Peningkatan sistem informasi keagamaan.

3) Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Fasilitasi pemberdayaan melalui peningkatan kualitas lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jamaah keagamaan, organisasi keagamaan, pengelolaan dana sosial keagamaan;

- b) Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan;

## B. Mewujudkan Kembaran yang Adil dan Demokratis

### 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Berpolitik dan Hukum

Meningkatkan Budaya Hukum

Program Peningkatan Kesadaran Hukum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Sosialisasi dan penyuluhan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan;
- b) Melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum sesuai dengan materi yang teruji dan menggunakan metodologi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Mewujudkan Pemerintahan yang Tidak Diskriminatif dalam Memberikan Pelayanan dan Memberdayakan Masyarakat.

Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya.

## D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

#### a. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Berperspektif Gender

Program Penghapusan Ketimpangan Gender

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan;

#### b. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Kesejahteraan Anak Dan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi;
- Peningkatan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

c. Memberikan Jaminan dan Perlindungan kepada Anak dan Perempuan

Program Perlindungan Hukum dan Hak Azasi Manusia bagi Anak dan Perempuan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyedia ruang publik yang aman untuk bermain;
- Peningkatan upaya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
- Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
- Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus misalnya bencana alam dan sosial;
- Peningkatan peran masyarakat dan media masa dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

C. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

1) Program Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja

Program ini dilaksanakan secara simultan dengan upaya peningkatan kapasitas keuangan Desa, sehingga melalui upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas keuangan Desa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas dan prioritas alokasi belanja secara proporsional.

2) Program Peningkatan Pendapatan Desa dengan tanpa Membebani Masyarakat

Program ini dilaksanakan secara simultan dengan program peningkatan pendapatan Desa dari prioritas pembangunan meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi Desa, sehingga pelaksanaan otonomi Desa mampu meningkatkan pendapatan Desa dan tidak menambah beban masyarakat serta tidak menambah hutang.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Penertiban sumber-sumber pendapatan desa yang belum optimal masuk ke kas Desa;
- Membangun sistem pengelolaan kas sehingga dapat menghasilkan pendapatan.

b. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

Menjamin Tersedianya Kebutuhan Bahan Pokok

Program Subsidi Ketersediaan Bahan Pokok bagi Masyarakat Miskin

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Pencegahan dan penanggulangan masalah bahan pokok melalui bantuan bahan pokok (RASKIN);
- Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;

c. Mengembangkan Jiwa Usaha Mandiri atau Kewirausahaan

Program Peningkatan Ketrampilan Usaha Dan Fasilitasi Akses Modal

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Peningkatan ketrampilan usaha masyarakat miskin dengan kemampuan berbeda sesuai dengan potensi yang ada;
- Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar tanpa diskriminasi gender;
- Peningkatan penyebarluasan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan bermutu;

d. Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Miskin

Program Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- Pemberian kemudahan perijinan dan perlindungan usaha dari pungutan informal bagi lembaga sosial ekonomi masyarakat miskin;
- Pembinaan dalam memulai berusaha;

- Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin guna mendukung pengembangan ekonomi pedesaan.
- f. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Peningkatan Kemampuan Petani, Peternak, dan Pelaku Usaha Sektor Pertanian dan Penguatan Kelembagaan
- 1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Pertanian  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
    - Peningkatan penggunaan rekayasa teknologi pertanian;
    - Peningkatan SDM petani dalam alih teknologi pertanian.
  - 2) Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Perkebunan dan Kehutanan  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
    - Pengembangan balai benih dan lahan budidaya;
    - Penyempurnaan iptek dan sistem pembenihan.
    - Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- g. Peningkatan Produktivitas, Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
    - a) Peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pangan utama;
    - b) Pengamanan ketersediaan pangan antara lain melalui pengamanan lahan sawah di Desa irigasi teknis dan peningkatan mutu intensifikasi;
    - c) Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat-alat pertanian untuk pasca panen serta pengolahan hasil dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
    - d) Diversifikasi pangan melalui ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran;
    - e) Peningkatan kemampuan partisipasi dan keswadayaan petani.
  - 2) Program Pengembangan Agribisnis  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Diversifikasi usaha tani melalui pengembangan usaha tani dengan komoditas bernilai tinggi;
- b) Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan pasca panen, mutu, pengolahan hasil, pemasaran;
- c) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- d) Pengembangan usaha perdagangan dengan peningkatan kualitas produk local menuju kualitas nasional.

h. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas dan Murah

Meningkatkan taraf pendidikan warga masyarakat, dengan meningkatkan prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun dan meningkatkan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah.

1) Program Pendidikan Pra Sekolah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Bantuan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah;
- b) Sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah;
- c) Monitoring dan pengawasan pelaksanaan pendidikan pra sekolah.

2) Program Pendidikan Dasar

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan tenaga pendidikan;
- b) Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- d) Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;
- e) Pemberian bea siswa bagi anak berprestasi dan anak dari keluarga kurang mampu lewat pemerintah daerah dan pusat;

- f) Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pembiayaan maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar.
- 3) Program Pendidikan Menengah
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Ikut Mengusahakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan tenaga pendidikan lewat pemerintah daerah maupun pusat;
  - b) Ikut mengusulkan adanya materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya;
  - c) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa lewat perlombaan tingkat desa;
  - d) Ikut mengusulkan bea siswa bagi anak berprestasi dan anak dari keluarga kurang mampu;
  - e) Mengupayakan bantuan/subsidi bagi sekolah swasta.
- 4) Program Pendidikan Non Formal
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Penyelenggaraan kelompok belajar Keaksaraan Fungsional, Kejar Paket A, B, dan C;
  - b) Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara;
  - c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal yang bermutu serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non formal;
  - d) Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin relevansi dan kesetaraan kualitas dengan pendidikan formal.

5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

Didirikannya Madrasah Diniyah disetiap Dusun dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

- Program Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sekolah

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pengembangan manajemen kependidikan secara terpadu dan holistik serta penerapan tata kelola satuan pendidikan yang baik;
- b) Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan.

i. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan yang Berkualitas dan Murah

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berperilaku Sehat

1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, seperti Posyandu,) dan Usaha Kesehatan Sekolah;
- b) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat;
- c) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS ).

b. Membangun Lingkungan yang Sehat

1) Program Lingkungan Sehat

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;
- b) Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan;
- c) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan;
- d) Pengembangan wilayah sehat.

c. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya;

- b) Ikut Mengusulkan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;
  - c) Ikut Mengusulkan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;
  - d) Mengusulkan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi.
- 2) Program Upaya Kesehatan Perorangan dan masyarakat
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Membantu proses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin;
  - b) Membantu masyarakat untuk mendapatkan Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
- 3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko lewat penyuluhan;
  - b) Peningkatan imunisasi lewat Posyandu;
  - c) Penanggulangan wabah dan Kejadian Luar Biasa ( KLB);
  - d) Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular lewat penyuluhan.
- 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Peningkatan pendidikan gizi lewat kegiatan PKK dan Posyandu;
  - b) Melalui Posyandu mengupayakan Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKI), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
  - c) Penanggulangan gizi lebih;
  - d) Peningkatan surveylens gizi;
  - e) Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.
- 5) Program Pengembangan Obat Tradisional
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
- a) Memasyarakatkan Kembali Penanaman tanaman obat tradisional;
  - b) Peningkatan promosi pemanfaatan obat tradisional;
  - c) Pembinaan obat tradisional.

j. Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- a. Membantu/mengarahkan kepada Warga Masyarakat, Khususnya Penyandang Masalah Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Peningkatan pembinaan pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat dan tuna sosial;
- b) Mengusahakan bantuan kursus pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi PKSM.

- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin dan PMKS lainnya melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- b) Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin dan PMKS lainnya melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

- c. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
- b) Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat korban bencana alam dan konflik sosial.

- d. Program Penanggulangan Bencana Dan Bantuan Kemanusiaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Mengupayakan bantuan pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam lewat Pemerintah Daerah;

- e. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Warga Masyarakat

- 1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial dan masyarakat (relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial );

- b) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat;

2) Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial khususnya diDusun rawan bencana;
- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui selapanan Dusun ataupun selapanan Desa;
- c) Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi.

3) Program Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

Memfasilitasi bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial;

k. Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pemberdayaan dalam Berusaha

1) Program Perbaikan Iklim Usaha bagi Koperasi dan UMKM

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Fasilitasi dan penyediaan formalisasi badan usaha (Rekomendasi );
- b) Pelayanan perijinan usaha yang mudah, cepat, murah dan terjangkau;

l. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga

a. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk serta Peningkatkan Keluarga Kecil Berkualitas

1) Program Pengendalian Reproduksi Remaja

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV / AIDS dan bahaya NAPZA;
- b) Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.

2) Program Keluarga Berencana

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Fasilitasi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja;
- b) Peningkatan penggunaan kontrasepsi melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi;
- c) Fasilitasi penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya;
- d) Penyelenggaraan promosi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling.

3) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b) Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- c) Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS
- d) Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga balita, remaja dan lanjut usia.

4) Program Penguatan Pelembagaan dan Jaringan KB

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

Penyuluhan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat dalam ber KB;

a. Peningkatan Pengelolaan Penduduk

Program Pengembangan Registrasi dan Administrasi Kependudukan

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan :

- Peningkatan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi kependudukan;
- Peningkatan efektivitas kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan.
- b. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan berorganisasi sebagai wahana pendewasaan, serta menumbuhkan budaya olah raga untuk kesehatan dan kebugaran serta prestasi

#### 1) Program Peningkatan Kualitas Generasi Muda

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Memberikan wawasan dan sikap mental generasi muda dalam pembangunan;
- b) Fasilitasi peningkatan pengetahuan, kerampilan dan kewirausahaan generasi muda;
- c) Fasilitasi peningkatan kreativitas dan inovasi generasi muda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat;

#### 2) Program Pembinaan Keolahragaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- a) Pemasyarakatan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- b) Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga.
- c) Peningkatan prestasi olah raga;
- d) Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat;
- e) Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana olah raga di masyarakat khususnya olah raga prioritas;
- f) Peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga.

Matrik

4.1

Strategi Pengembangan Aset dan Potensi

Aset Desa

Cita-cita masa depan Desa	Aset yang dimiliki untuk mendukung masa depan	Pengembangan potensi untuk mendukung tercapainya masa depan Desa	Strategi optimalisasi aset	Langkah-langkah baru untuk optimalisasi aset	Bidang
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel	Desa Kembaran memiliki Perangkat Desa yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab dengan menghindari dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,	1. Meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintah desa, antara lain : a. Melaksanakan dinas setiap hari ( 5 hari kerja ) b. Penerapan daftar hadir dinas yang ditandatangani / paraf, dan paling lambat	1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik ; 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas perangkat desa ; 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ;	Penyelenggaraan Pemerintahan

	<p>dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.</p>	<p>meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta masyarakat, mengembangkan etika dan moral serta melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap setiap kegiatan pemerintah Desa.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan</p>	<p>tanggal 5 di bulan berikutnya bahwa absensi aparatur pemerintah desa dalam form rekapitulasi absensi dilaporkan ke Kecamatan Kalikajar ;</p> <p>c. Secara umum perangkat desa dituntut mampu untuk mengoperasikan komputer ;</p> <p>d. Bagi aparatur pemerintah desa yang potensi dan belum menguasai operasikan komputer, secara bertahap diadakan pelatihan komputer ;</p> <p>e. Jumlah perangkat desa 13 orang, adapun yang</p>	<p>4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ;</p> <p>5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan ;</p> <p>6. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur</p> <p>7. Program Peningkatan Kapasitas BPD ;</p> <p>8. Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa ;</p> <p>9. Program Peningkatan Pendapatan Desa ;</p> <p>10. Program Peningkatan Pengelolaan Kekayaan (Aset) Desa ;</p>	
--	---	--	---	---	--

		<p>menyuntikkan semangat <i>enterpreneurial</i>, memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta menerapkan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi;</p>	<p>telah dapat berjalan operasikan komputer 8 orang.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik :</p> <p>a. Tersedianya sarpras kantor yang sudah cukup memadai, seperti Laptop, PC dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada publik ;</p> <p>b. Surat menyurat yang dibutuhkan publik dilayani secara maksimal dalam 5 hari kerja, gratis tanpa ada pungutan biaya ;</p> <p>c. Kebiasaan lama yang sering terjadi tentang</p>	<p>11. Program Penguatan Kemampuan Keuangan Desa ;</p> <p>12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>           pelayanan dirumah ( diluar jam kerja ),            sudah tidak terjadi lagi,            hal tersebut dilakukan dengan mengingat bahwa setiap surat yang dikeluarkan harus ada regiatrasi / nomor surat yang harus dapat dipertanggungjawabkan ;            d. Pelayanan surat menyurat secara umum dengan komputer ;            e. Melakukan perbaikan administrasi pelayanan umum, keuangan dan pembangunan.         </p> <p>           3. Meningkatnya kerjasama secara positif antara         </p>		
--	--	--	---	--	--

			Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan / Organisasi Tingkat Desa.		
Mengedepankan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, menuju desa yang mandiri, partisipatif, terbuka dan kerjasama yang baik menuju Desa Kembaran lebih maju.	Desa Kembaran memiliki asset diantaranya : 3. Sumber Daya Alam 4. Sumber Daya Manusia ; 5. Sosial ; 6. Finansial ; 7. Fisik ; 8. Kelembagaan ; 9. Spiritual dan Budaya.			1. Pelaksanaan pembangunan dengan langkah mengembangkan sistem kelembagaan pemerintahan desa yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan landasan sistem kelembagaan yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem	Pelaksanaan Pembangunan

				<p>peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari efektifitas pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.</p> <p>2. Pembangunan Desa Kembaran, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar warga masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.</p> <p>3. Hak-hak dasar warga masyarakat yang berbentuk hak sipil dan Kelembagaan Desa serta hak ekonomi, sosial dan budaya memperoleh prioritas untuk diwujudkan dengan pengembangan pembangunan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aset Sumber Daya Alam.</li> <li>b. Aset Sumber Daya Manusia.</li> <li>c. Aset sosial.</li> <li>d. Aset Finansial.</li> <li>e. Aset Kelembagaan, dan</li> <li>f. Aset Spiritual budaya.</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--

Terwujudnya hubungan yang dinamis antar organisasi masyarakat, yang dilakukan lewat kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat menuju masyarakat bersatu padu membangun desa disegala bidang yang berkelanjutan	Keberadaan Lembaga Desa dan Kelembagaan / Organisasi kemasyarakatan di desa sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan (fisik dan non fisik) yang ada di desa, antara lain : 4. BPD ; 5. LPMD ;			Mewujudkan Desa Kembaran yang Aman, Tentram Sejahtera, adapun langkah yang akan ditempuh adalah : 1.Program Pemberdayaan dan Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 2.Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba. 3.Program Peningkatan Pendidikan Keagamaan.	Pembinaan Kemasyarakatan

	6. Kader Posyandu ; 7. Kader PKK ; 8. Kelompok RT dan RW ; 9. Pemuda ; 10. Dan lain-lain.			4. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama. 5. Program Peningkatan Kesadaran Hukum	
Penguatan dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan peningkatan potensi desa menuju optimalisasi pembangunan desa yang berkelanjutan.	Keterlibatan lembaga dan kelembagaan desa yang terkoordinasi terkait upaya peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat guna memotivasi kearah pemberdayaan			1. Program Penghapusan Ketimpangan Gender 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan 3. Program Perlindungan Hukum dan Hak Azasi Manusia bagi Anak dan Perempuan 4. Program Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja	Pemberdayaan Masyarakat

	<p>masyarakat dengan langkah kongkrit dibahas secara detil dalam wadah Tim Pencerah Desa yang diberikan misi untuk membuat perencanaan pembangunan berlandaskan asset yang dimiliki oleh Desa Kembaran dengan system <i>Asset Based Community Development</i> ( ABCD ).</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Program Peningkatan Pendapatan Desa dengan tanpa Membebani Masyarakat</li> <li>6. Program Subsidi Ketersediaan Bahan Pokok bagi Masyarakat Miskin</li> <li>7. Program Peningkatan Ketrampilan Usaha Dan Fasilitasi Akses Modal</li> <li>8. Program Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Desa</li> <li>9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Pertanian</li> <li>10. Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Peternakan dan</li> </ol>	
--	---	--	--	--	--

				Perikanan serta Perkebunan dan Kehutanan 11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 12. Program Pengembangan Agribisnis 13. Program Pendidikan Pra Sekolah 14. Program Pendidikan Dasar 15. Program Pendidikan Menengah 16. Program Pendidikan Non Formal 17. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan	
--	--	--	--	--	--

				<p>18. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>19. Kegiatan pokok yang dilaksanakan</p> <p>20. Program Lingkungan Sehat</p> <p>21. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>22. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan masyarakat</p> <p>23. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</p> <p>24. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>25. Program Pengembangan Obat Tradisional</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>26. Membantu/mengarahkan kepada Warga Masyarakat, Khususnya Penyandang Masalah Sosial</p> <p>27. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p> <p>28. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial</p> <p>29. Program Penanggulangan Bencana Dan Bantuan Kemanusiaan</p> <p>30. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>31. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial</p> <p>32. Program Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial</p> <p>33. Program Perbaikan Iklim Usaha bagi Koperasi dan UMKM</p> <p>34. Program Pengendalian Reproduksi Remaja</p> <p>35. Program Keluarga Berencana</p> <p>36. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p> <p>37. Program Penguatan Pelembagaan dan Jaringan KB</p> <p>38. Program Peningkatan Kualitas Generasi Muda</p>	
--	--	--	--	---	--

				39. Program Pembinaan Keolahragaan	
--	--	--	--	------------------------------------	--

## BAB V PENUTUP

RPJM Desa Kembaran transisi 2020 – 2025 tersebut tentang pelaksanaannya sudah barang tentu dihadapkan berbagai tantangan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

Namun guna kelancaran dalam melaksanakan, maka Pemerintah Desa akan melakukan manajemen resiko sebagai berikut :

### A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Telah kita maklumi bersama bahwa perangkat desa diangkat dalam beberapa Undang-Undang yakni UU No. 5 Tahun 1979, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004, yang mana bahwa perangkat desa lainnya yang diangkat dengan UU No. 5 Tahun 1979 secara umum tidak dapat mengoperasikan komputer serta usia sudah lanjut. Oleh karena itulah dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah desa akan mengoptimalkan kepada perangkat desa lainnya yang potensi, serta perangkat desa lainnya yang masih muda dituntut untuk mampu mengoperasikan komputer dengan baik dengan langkah program pelatihan, pembinaan dan sejenisnya.

Terkait dengan aplikasi sinta paten yang merupakan sarana pelayanan umum, secara rutin akan melakukan kegiatan secara vertical guna pemenuhan standard pelayanan prima.

Koordinasi dan mohon petunjuk kepada instansi di atasnya guna mencapai tujuan yang diharapkan.

### B. PEBANGUNAN DESA

RPJM Desa Kembaran ( 2020 s.d 2025 ) merupakan rencana prioritas pembangunan di Desa Kembaran, penyusunan RPJM Desa Kembaran tersebut dimaksudkan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dalam “ MIMPI DESA “ akan terarah dan tepat sasaran menuju Pemerintahan Desa Kembaran “ Membangun Bersama Masyarakat “.

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik tantangan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sosial, finansial, fisik, kelembagaan, spiritual dan budaya.

Dari berbagai tantangan dimaksud, maka pemerintah desa kembaran akan mengajak Lembaga Desa sebagai mitra kerja dan Kelembagaan yang ada di Desa Kembaran untuk berembung bersama guna melakukan kegiatan bedah tantangan dan mewujudkan mimpi desa.

### C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Ada beberapa tantangan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang sedang di hadapi seperti ; lemahnya peningkatan sumberdaya manusia dan regenerasi dalam pengelolaan organisasi. Juga minimnya peningkatan kerjasama (pola komunikasi) antara pemerintah desa dan lembaga/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang berada di desa sehingga kemitraan dalam pembangunan desa belum terjalin kuat. Serta tantangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mewujudkan misi desa, maka Pemerintah Desa akan melakukan kegiatan pembinaan secara terus menerus terhadap kelembagaan yang ada di desa, sehingga harapan Pemerintah Desa Kembaran tentang Keberadaan organisasi kemasyarakatan di desa secara maksimal dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan (fisik dan non fisik) yang ada di desa Kembaran.

### D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

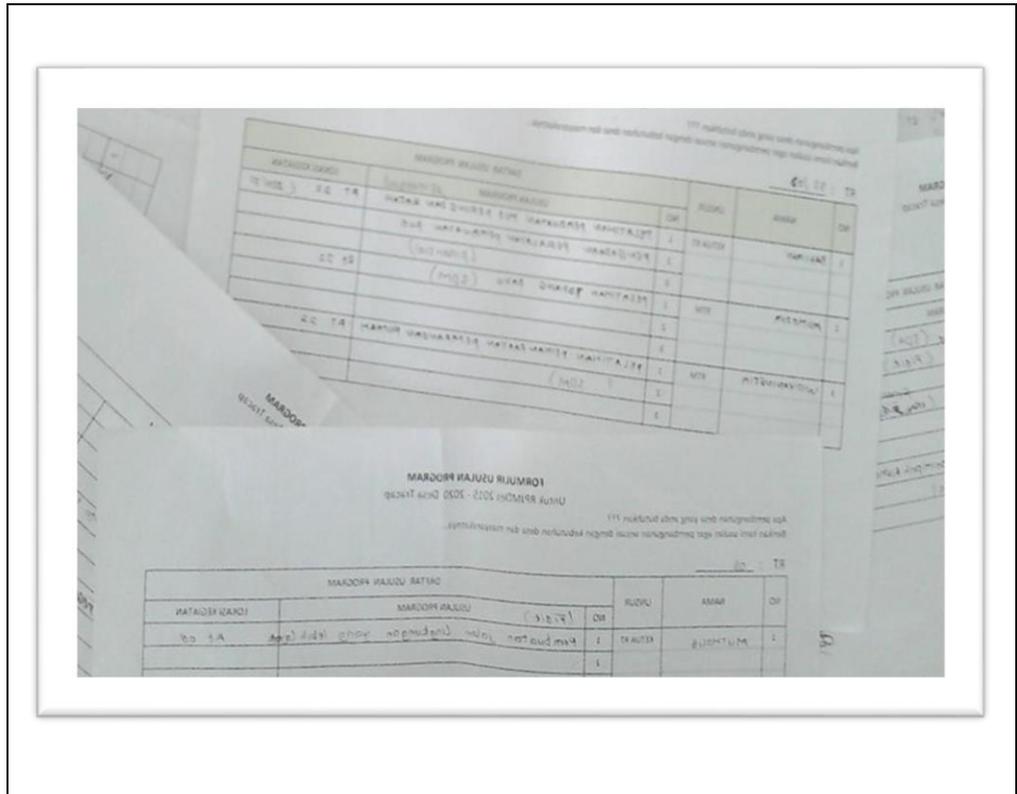
Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti ; kegiatan gotong royong masyarakat menurun, partisipasi masyarakat menurun dan lain sebagainya, dengan demikian hasil dari pada pembangunan tidak dapat berhasil secara maksimal.

Adapun langkah yang akan ditempuh adalah diawali semua kegiatan pembangunan di Desa Kembaran akan memposisikan kelembagaan desa sebagai pelopor subyek pembangunan di segala bidang, dengan keterlibatan semua lembaga tersebut diatas, maka terkoordinasi terkait upaya peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat guna memotivasi kearah pemberdayaan masyarakat dengan langkah kongkrit dibahas secara detil dalam wadah Tim Pencerah Desa yang diberikan misi untuk membuat perencanaan pembangunan berlandaskan asset yang dimiliki oleh Desa Kembaran dengan system *Asset Based Community Development ( ABCD )* menuju Desa Kembaran yang diimpikan oleh masyarakat.

**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

1. Matrik Rencana Kegiatan Mencapai Cita-cita Masa Depan Desa
2. Matrik Papan Masa Depan Desa
3. Matrik Penggalian Gagasan Masyarakat

### Matrik Papan Masa Depan Desa



## Martik 2

## Penggalian Gagasan Masyarakat

Daftar Gagasan Kelompok : Semua Masyarakat Desa

Desa : Kembaran

Kecamatan : Kalikajar

No.	Gagasan Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam	Desa Kembaran	60	Orang	15	15	30
2	Peningkatan kemampuan Kelompok Tani & Gapoktan	Desa Kembaran	60	Orang	15	15	30
3	Penanaman pohon pada kawasan jalan PU, makam dan lain-lain dalam wilayah desa	Desa Kembaran	400	Batang	10	10	20
4	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk yang berbasis potensi lokal	Desa Kembaran	30	Orang	5	5	20
5	Fasilitasi kemudahan pemberian rekomendasi perijinan pengembangan usaha	Desa Kembaran	Semua warga	Orang			
6	Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kecil / kaki lima	Desa Kembaran	20	Orang	5	15	20
7	Program Pertades	Desa Kembaran	Usaha BUMDes	Unit			
8	Pengadaan kantor BUMDesa	Desa Kembaran	1	Unit			

9	Pengadaan Sarpras BUMDesa	Desa Kembaran	1	paket			
10	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Desa Kembaran	20	Orang	20	-	20
11	Kerjasama pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Desa Kembaran					
12	Penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat	Desa Kembaran	40	Orang	20	20	25
13	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan di desa	Desa Kembaran	1	Unit			
14	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Desa Kembaran	60	Orng	60	-	-
15	Sosialisasi pelayanan kesehatan kepada warga miskin di Puskesmas II	Desa Kembaran	60	Orang	-	60	60
16	Perbaikan gizi bumil	Desa Kembaran	25	orang			
17	Optimalisasi kepada tenaga medis saat melayani warga miskin	Puskesmas	1	Orang	-	1	
18	Pemberian bantuan untuk pelayanan kesehatan akibat gizi buruk / busung lapar	Desa Kembaran	80	Balita			
19	Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas II ( Kapasitas rawat inap )	Desa Kembaran	1	unit			
20	Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu	Desa Kembaran	5	posyandu			
21	Penyuluhan 160endidika balita	Desa Kembaran	5	Posyandu			
22	Fasilitasi kegiatan imunisasi bagi anak	Desa Kembaran					

	balita terutama untuk warga miskin						
23	Pelatihan dan pendidikan perawatan balita bagi ibu dan PUS	Desa Kembaran					
24	Penyuluhan 161endidika lansia	Desa Kembaran	30	Orang	10	20	
25	Pengadaan sarpras Posyandu Terpadu (Lansia, Balita)	Desa Kembaran	5	Posyandu			
26	Penyuluhan / Pembinaan kesehatan bagi ibu hamil	Desa Kembaran	25	Orang			
27	Fasilitasi dan sosialisasi perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	Desa Kembaran	10	orang	-	10	10
28	Pemberian bantuan pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	Desa Kembaran	10	Orang	-	10	10
29	Pembinaan Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tenaga medis	Desa Kembaran	40	Orang	20	20	40
30	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi di desa	Desa Kembaran	1	kali			
31	Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin balita	Desa Kembaran	80	balita	46	34	
32	Fasilitasi kegiatan penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang iodium (GAKI), kurang	Desa Kembaran	15	Balita	8	7	15

	vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya bagi balita						
33	Penyuluhan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Desa Kembaran	30	Orang	-	30	
34	Pengadaan alat permainan Paud Bina sakti I	Dusun Kembaran	1	Paket	10	12	
35	Pengadaan alat permainan Paud Bina Sakti III	Dusun Kembaran	1	Paket	5	6	
36	Pengadaan alat permainan Paud Bina Sakti V	Dusun Wonokriyo	1	Paket	15	14	
37	Peningkatan sarana dan prasarana Paud Bina Sakti I	Dusun Kembaran	1	Paket	10	12	
38	Peningkatan sarana dan prasarana Paud Bina Sakti III	Dusun Kembaran	1	Paket	5	6	
39	Peningkatan sarana dan prasarana Paud Bina Sakti V	Dusun Wonokriyo	1	Paket	15	14	
40	Pengadaan alat permainan TK Pertiwi	Dusun Kembaran	1	Paket	32	34	
41	Pengadaan alat permainan TK Habiburrohman	Dusun Luwihan	1	Paket	11	13	
42	Peningkatan sarana dan prasarana TK Peretiwi	Dusun Kembaran	1	Paket	32	34	
43	Peningkatan sarana dan prasarana TK Habiburrohman	Dusun Luwihan	1	Paket	11	13	

44	Pembuatan Taman Bermain TK Pertiwi	Dusun Kembaran	1	paket	32	34	
45	Pembuatan Taman Bermain TK Habiburrohman	Dusun Luwihan	1	paket	11	13	
46	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	Desa Kembaran	4	Dusun	81	74	96
47	Pengadaan alat praktik dan peraga bagi siswa	Desa Kembaran	6	TK & paud	63	74	
48	Pengadaan perlengkapan sekolah	Desa Kembaran	6	TK & paud	63	74	
49	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Kec / Kab	20	Orang	-	20	
50	Penyuluhan kepada wali murid wajar dikdas 9 tahun	Desa Kembaran	90	Orang	46	45	
51	Bantuan beasiswa SD berprestasi	SD Kembaran	54	Orang			
52	Pemberian bantuan operasional 163endidikan non formal	Desa Kembaran	4	TPQ			
53	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal / tunjangan tenaga pendidik	Desa Kembaran	20	Orang	-	20	
54	Fasilitasi / Pengadaan sarpras TPQ	Desa Kembaran	4	TPQ	47	2	
55	Bantuan kepada Fakir miskin	Desa Kembaran	Menyesuaikan				
56	Bantuan Kepada Penyandang masalah kesejahteraan sosial	Desa Kembaran	Menyesuaikan				
57	Bantuan kepada Org Tua terlantar	Desa Kembaran	Menyesuaikan				
58	Bantuan Kepada Kel. Sosial Kematian	Desa Kembaran	Menyesuaikan				

59	Bantuan Kpd. Anak Yatim piatu	Desa Kembaran	Menyesuaikan				
60	Bantuan Rehab Ringan perumahan tidak layak huni bagi warga miskin	Desa Kembaran	10	Rumah	7	3	10
61	Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat miskin	Desa Kembaran	Menyesuaikan				
62	Sosialisasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Desa Kembaran	40	Orang	30	10	
63	Bantuan Perbaikan rumah akibat bencana alam	Desa Kembaran	Menyesuaikan				
64	Kebersihan pemakaman	Desa KEMBARAN	2	Kali			
65	Peningkatan pembangunan Aspal jalan Pringapus Bowongso	Dari Pringapus Desa Maduretno s.d Wonokriyo Desa Kembaran	P : 4000 L : 5,5 T : 0,8	Meter			
66	Pembangunan Sederan Jalan PU	Dari perempatan Dusun Kembaran s.d Batas Desa Maduretno	P : 100 M T : 18 M	Meter			
67	Perpipaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi	Dusun Patran	P : 2500 M.	Meter	76	76	34

	masyarakat (( Dusun Patran )						
68	Pembangunan Dam blok Siwatu	Dusun Luwihan	P : 60 M. T : 12 M	Meter	1700	1800	454
69	Pembangunan senderan irigasi blok wangan tengah	Dusun Kembaran	P : 1500 M. T : 2 M	Meter	150	100	200
70	Perpipaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat ( Dusun Wonokriyo )	Dusun Wonokriyo	P : 1500 M. Tanam:0,5 M	Meter	170	150	130
71	Pembangunan senderan Jalan blok pekarangan s.d blok galur dusun Wonokriyo	Dusun Wonokriyo	P.600m T.2m L.0,30m	Meter	50	50	45
72	Pembangunan senderan irigasi blok sidodok dusun Luwihan	Dusun Luwihan	P.60m T.2,75m L.0,30m	Meter	109	28	46
	Pembangunan betonisasi jalan lingkungan	Dusun Luwihan	P.700m T.0,07m L.1,5m	Meter	300	280	
73	Pembangunan jalan aspal jln dusun Luwihan s.d batas dusun Bakalan Desa Bowongso	Dusun Luwihan	P 1000m T.0,12m L. 3 m	Meter			
74	Pembangunan betonisasi / pavingisasi jalan lingkungan	Dusun Kembaran	P.800m T.0,07m L.1,5 - 2 m	Meter	900	780	
75	Pembangunan betonisasi jalan lingkar / lingkungan	Dusun Wonokriyo	P.800m T.0,07m L.1,5 - 2 m	Meter	240	210	225
76	Penanganan Sampah setiap RT	Dusun Kembaran	31	RT			

77	Optimalisasi pelaksanaan pembagian beras untuk keluarga miskin	Desa Kembaran	4	Dusun			454
78	Kontribusi kesenian desa	Desa Kembaran	7	Jenis			
79	Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Desa Kembaran	Menyesuaikan				
80	Peningkatan jaga malam	Desa Kembaran	4	Dusun			
81	Pengadaan timbangan di 5 Posyandu	Desa Kembaran	5	Posyandu			
82	Perlengkapan administrasi posyandu	Desa Kembaran	5	Paket			
83	Pengadaan meja kursi di 5 Posyandu	Desa Kembaran	5	Paket			
84	Kontribusi penyelenggaraan turnamen olah raga	Desa Kembaran	1	Kali			
85	Pembangunan Lapangan Volley Ball	Desa Kembaran	2	Unit			
86	Fasilitasi Kegiatan pemuda Olah raga	Desa Kembaran	4	Group			
87	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga ( Stadion Ronggolawe )	Desa Kembaran	Menyesuaikan				
88	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Desa Kembaran	4	Dusun			
89	Pelatihan bidang usaha ekonomi produktif	Desa Kembaran	30	Orang	5	25	30
90	Rehab Gedung Balai Desa	Desa Kembaran	1	Gedung	14	100	1
91	Pengadaan Mobil Siaga Desa	Desa Kembaran	1	Unit	14	5	152

92	Jambanisasi Septiktank	Desa Kembaran	4	Dusun	500	500	400
93	Program Air Bersih	Dusun Wonokriyo	200	KK	248	230	112
94	Program Desa Siaga Bencana	Desa Kembaran	4	Dusun	55	20	12
95	Pengadaan Gedung Poskamling	Desa Kembaran	4	Dusun	24	24	12

Desa Kembaran, 16 Maret 2020

Mengetahui  
Kepala Desa Kembaran

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

AGUNG HERMAWAN

ADY SETIAWAN,S.Pd